



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN TATA KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur perlu adanya pengendalian dan penataan arsip secara baik dan benar;
- b. bahwa pengendalian dan penataan arsip Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan berdasarkan kode klasifikasi;
- c. bahwa Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 24/02.188.3/HK/XI/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175,

Tambahan ...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;
9. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);
10. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 tentang Standar Folder dan Guide Arsip;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Badan/Dinas/Kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan Kearsipan.
6. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.

7. Lembaga ...

7. Lembaga Kearsipan adalah Dinas/Badan/Kantor yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Statis dan pembinaan Kearsipan.
8. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
9. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan Arsip.
10. Tata Kearsipan adalah suatu cara sistematis dalam pengelolaan Arsip dinamis yang meliputi penerimaan, pencatatan, pengarahannya, pengendalian, pendistribusian, penataan, penyimpanan, dan penyusutan.
11. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
12. Arsip Aktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
13. Arsip Inaktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
14. Arsip Statis adalah Arsip yang dihasilkan oleh pencipta Arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau Lembaga Kearsipan.
15. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis Arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis Arsip dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan Arsip.
16. Kode Klasifikasi adalah penggolongan naskah dinas berdasarkan masalah yang termuat di dalamnya dan merupakan pedoman untuk pengaturan penataan dan penemuan kembali Arsip.

Pasal 2

Pedoman Tata Kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

- a. menjamin terciptanya Arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. menjamin ...

- b. menjamin ketersediaan Arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
- c. menjamin terwujudnya pengelolaan Arsip yang andal dan pemanfaatan Arsip sesuai dengan ketentuan;
- d. menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan Arsip yang autentik dan terpercaya;
- e. mendinamiskan Tata Kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. mewujudkan Tata Kearsipan sebagai suatu sistem yang terpadu; dan
- g. menjamin keselamatan dan keamanan Arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB II

TATA KEARSIPAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Arsip Dinamis; dan
 - b. Arsip Statis.
- (2) Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Arsip Dinamis Aktif;
 - b. Arsip Dinamis Inaktif; dan
 - c. Arsip Dinamis Vital.
- (3) Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di ruang khusus sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. penciptaan naskah dinas dengan sarana Tata Naskah Dinas;
 - b. pengurusan dan pengendalian naskah dinas dengan sarana Kartu Kendali;
 - c. penataan Arsip /berkas dengan sarana Kode Klasifikasi;
 - d. pengelolaan Arsip konvensional dan/atau media baru;
 - e. penyusutan ...

- e. penyusutan Arsip dengan sarana JRA;
 - f. pengelolaan dan layanan informasi Arsip dengan menggunakan sarana berbagai media sesuai kebutuhan; dan
 - g. pemeliharaan dan perawatan Arsip.
- (2) Tata kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Tata kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah bidang kearsipan.

Pasal 5

Petunjuk teknis Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Setiap SKPD menyediakan sarana dan prasarana Kearsipan sesuai kebutuhan dengan memerhatikan standarisasi dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penyusutan Arsip dilaksanakan dengan cara:
- a. pemindahan Arsip Inaktif yaitu:
 - 1. pemindahan Arsip Inaktif yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun dilakukan dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan SKPD, paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun; dan
 - 2. pemindahan Arsip Inaktif yang memiliki retensi paling singkat 10 (sepuluh) tahun dilakukan dari Unit Pengolah ke Lembaga Kearsipan Daerah, dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun;
 - b. penyerahan Arsip Statis dari Pemerintah Daerah dan SKPD ke Lembaga Kearsipan Daerah, dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 10 (sepuluh) tahun; atau
 - c. pemusnahan Arsip yang tidak memiliki nilai guna.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap Unit Pengolah pada SKPD, wajib menyediakan tempat penyimpanan Arsip Dinamis Aktif pada sentral Arsip Aktif (*Central File*) yang berfungsi memberikan layanan informasi kepada Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan.
- (3) Setiap Unit Kearsipan di SKPD dan Sekretariat Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat penyimpanan Arsip Dinamis Inaktif pada sentral Arsip Inaktif (*Record Centre*) yang berfungsi memberikan layanan informasi kepada Pimpinan SKPD atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

BAB III

PEMBINAAN

Pasal 8

Pembinaan Tata Kearsipan dilakukan secara terpadu di bawah koordinasi Lembaga Kearsipan Daerah.

Pasal 9

Unit Kearsipan pada setiap SKPD berkewajiban untuk melakukan pembinaan internal dalam pengelolaan Arsip, serta melakukan koordinasi dengan Unit Pengolah.

Pasal 10

Bupati melalui Sekretaris Daerah selain memiliki kewajiban melakukan pembinaan tentang Tata Kearsipan, dilakukan pula pembinaan terhadap tenaga Kearsipan yang meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan kearsipan;
- b. penyusunan pedoman kearsipan;
- c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kearsipan;
- d. sosialisasi kearsipan;
- e. pendidikan dan pelatihan kearsipan; dan
- f. perencanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 24/02.188.3/HK/XI/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 19 Agustus 2021

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 20 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 24

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur

Plt Kepala Bagian Hukum,



Januar Bavu Irawan, SH

Penata/IIIC

NIP. 19850112 201101 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN TATA KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PENCIPTAAN, PENGURUSAN, DAN PENGENDALIAN NASKAH DINAS

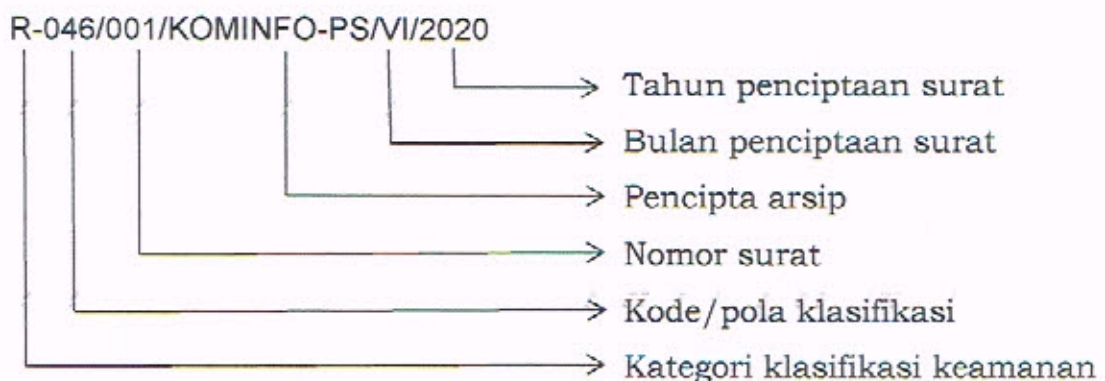
A. PENGERTIAN

1. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN/BUMD dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.
 - a. Naskah Dinas Sangat rahasia adalah naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan negara;
 - b. Naskah Dinas Rahasia adalah naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk terhadap ekonomi makro. Apabila informasi yang terdapat dalam naskah dinas bersifat sensitif baik bagi lembaga maupun perorangan akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap *privacy*, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi;
 - c. Naskah Dinas Terbatas adalah naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga, seperti kerugian finansial yang signifikan;
 - d. Naskah Dinas Biasa/Terbuka adalah naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya dibuka untuk umum tidak membawa dampak apapun terhadap keamanan negara.
2. Kartu kendali adalah lembar isian untuk pencatatan, penerimaan, penyampaian, penemuan kembali, dan sekaligus sebagai alat penyerahan arsip.

- a. Kartu Kendali Masuk adalah lembar isian untuk pencatatan, penerimaan, dan penyampaian naskah dinas masuk.
- b. Kartu Kendali Keluar adalah lembar isian untuk pencatatan dan penyampaian naskah dinas keluar.
3. Buku Agenda Surat adalah sarana berupa buku yang digunakan untuk mencatat surat masuk dan/atau surat keluar.
4. Kartu Tunjuk Silang adalah formulir yang dipergunakan untuk memberikan petunjuk tentang adanya lebih dari satu masalah pada satu naskah dinas, dan sebagai sarana petunjuk tentang adanya hubungan dengan naskah (file) yang lain.
5. Surat Pengantar adalah sarana pengiriman surat yang berfungsi sebagai tanda bukti bahwa surat sudah dikirim ke alamat tujuan dengan diantar langsung ke alamat tujuan oleh petugas dari unit pengolah yang bersangkutan atau diantar langsung dengan bantuan petugas dari Subbag Persuratan dan Penggandaan (caraka).
6. Lembar disposisi merupakan sarana yang digunakan oleh pimpinan untuk memberikan wewenang dan tugas kepada bawahan dalam bentuk perintah atau instruksi secara singkat dan jelas guna memproses dan/atau menyelesaikan suatu surat.
7. Tata Usaha Unit Pengolah adalah unit kerja ketatausahaan di unit pengolah.
8. Pengolah adalah staf yang bertugas melakukan pengolahan naskah dinas.
9. Penerima adalah pengolah yang bertugas menerima naskah dinas yang disampaikan, baik oleh pengantar pos, caraka, perorangan, atau media telekomunikasi lainnya.
10. Pengarah Naskah Dinas adalah pengolah yang bertugas mengarahkan naskah dinas masuk yang harus disampaikan kepada unit pengolah dengan mencantumkan kode klasifikasi dan indeks.
11. Pengendali/Pencatat adalah pengolah yang bertugas melakukan pencatatan dan pengendalian naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar.
12. Pengirim Naskah Dinas adalah pengolah yang bertugas melakukan pengiriman naskah dinas.
13. Penyimpan Naskah Dinas adalah pengolah yang bertugas melakukan penyimpanan dan penilaian naskah dinas.

B. PENCIPTAAN NASKAH DINAS

1. Penciptaan naskah dinas yaitu proses kegiatan sejak pembuatan draf/konsep, pengetikan, penandatanganan, penomoran sampai naskah dinas tersebut digunakan. Kegiatan yang harus diperhatikan dalam penciptaan naskah dinas:
 - a. Pemilihan jenis kertas dan tinta;
 - b. Bentuk naskah dinas dan pembagian kewenangan masalah naskah dinas;
 - c. Penentuan sifat surat;
 - d. Penggunaan kop surat;
 - e. Tata cara pengetikan;
 - f. Penulisan nomenklatur;
 - g. Penggunaan a.n. dan u.b.;
 - h. Pembubuhan paraf;
 - i. Penomoran naskah dinas;
 - j. Pengisian tembusan;
 - k. Penyampulan surat/naskah dinas.
2. Tata cara penciptaan naskah dinas mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur naskah dinas.
3. Pemberian Nomor Surat Dinas
Contoh :



C. PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN NASKAH DINAS

1. Sarana Pengurusan dan Pengendalian Naskah Dinas

Pengendalian naskah dinas meliputi kegiatan pengurusan naskah dinas masuk, naskah dinas keluar, penyimpanan, penemuan kembali, peminjaman, dan pemeliharaan naskah dinas. Dalam proses pengurusan dan pengendalian naskah dinas dipergunakan sarana pengendalian sebagai berikut:

a. Kartu Kendali

Contoh: Kartu Kendali Naskah Dinas Masuk

DINAS KARTU SURAT MASUK	Indeks :	Kode :	No. Urut :
	Isi Ringkas :		
	Dari :		
	Tanggal Surat :	Nomor Surat :	Lampiran :
	Pengolah :	Tanggal Diteruskan :	Tanda Terima :
	Catatan		
	Lembar 1		
Lembar 2			
Lembar 3			

Cara Pengisian Kartu Kendali Naskah Dinas Masuk

- Indeks : Diisikan indeks masalah naskah dinas
- Kode : Diisikan kode klasifikasi menurut pola klasifikasi
- Nomor Urut : Diisikan nomor unit berdasarkan daftar pengendali
- Isi Ringkas : Diisikan ringkasan dan isi naskah dinas
- Dari : Diisikan dari siapa naskah dinas tersebut diterima
- Tanggal Surat : Diisikan tanggal yang tercantum pada naskah dinas yang diterima
- Nomor Surat : Diisikan nomor yang tercantum pada naskah dinas yang diterima
- Lampiran : Diisikan jumlah lampiran pada naskah dinas yang diterima
- Pengolah : Diisikan unit pengolah mana yang akan menyelesaikannya
- Tanggal Diteruskan : Diisikan dengan tanggal naskah dinas diteruskan ke Unit Pengolah
- Tanda Terima : Diisikan paraf dan nama petugas yang menerima naskah dinas
- Catatan : Diisikan catatan yang diperlukan atau keterangan yang perlu sebagai catatan
- Ukuran Kartu : Lebar 10 cm, dan panjang 15 cm

Contoh: Kartu Kendali Naskah Dinas Keluar

DINAS KARTU SURAT KELUAR	Indeks :	Kode :	No. Urut :
	Isi Ringkas :		
	Kepada :		
	Pengolah :	Tanggal Surat :	Lampiran :
	Catatan :		

Lembar 1
Lembar 2
Lembar 3

Cara Pengisian Kartu Kendali Naskah Dinas Keluar

- Indeks : Diisikan indeks masalah naskah dinas
- Kode : Diisikan kode klasifikasi menurut pola klasifikasi
- Nomor Urut : Diisikan nomor urut berdasarkan daftar pengendali
- Isi Ringkas : Diisikan ringkasan dari isi naskah dinas
- Kepada : Diisikan kepada siapa naskah dinas tersebut diteruskan/ditujukan
- Pengolah : Diisikan Unit Pengolah mana yang membuat naskah dinas tersebut
- Tanggal Surat : Diisikan tanggal naskah dinas dikendaikan
- Lampiran : Diisikan berapa lembar lampira yang disertakan
- Catatan : Diisikan catatan yang diperlukan atau keterangan yang perlu dicatat
- Ukuran Kartu : Lebar 10 cm, dan panjang 15 cm.

b. Kartu Tunjuk Silang

Contoh: Kartu Tunjuk Silang

Indeks :	Kode Klasifikasi :
Hal :	
Isi Ringkas :	
Lihat	
Kode :	No. Urut :
Catatan :	

Cara Pengisian Kartu Tunjuk Silang

Indeks	: Diisikan indeks masalah naskah dinas
Kode	: Diisikan kode klasifikasi masalah
Hal	: Diisikan hal/masalah
Isi Ringkas	: Diisikan ringkasan dari masalah
Kode	: Diisikan kode masalah
Nomor Urut	: Diisikan nomor urut kartu kendali
Catatan	: Diisikan catatan yang diperlukan atau keterangan-keterangan yang perlu sebagai catatan
Ukuran kartu	: Lebar 10 cm, dan panjang 15 cm

c. Daftar Pengendali

Contoh: Daftar Pengendali Naskah Dinas

No. Urut	Kode	Nomor Naskah Dinas	Uraian/Hal	Unit Pengolah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Cara Pengisian Daftar Pengendali Naskah Dinas

Nomor Urut	: Diisikan nomor urut dari jumlah naskah dinas yang didaftar
Kode	: Diisikan kode klasifikasi naskah dinas
Nomor Naskah Dinas	: Diisikan nomor naskah dinas yang didaftar
Uraian/Hal	: Diisikan hal/uraian masalah dari naskah dinas yang didaftar
Unit Pengolah	: Diisikan Unit Pengolah yang membuat/menindaklanjuti naskah dinas.

d. Surat Pengantar (sesuai Tata Naskah Dinas)

Surat Pengantar adalah sarana pengiriman surat yang berfungsi sebagai tanda bukti bahwa surat sudah dikirim ke alamat tujuan dengan diantar langsung ke alamat tujuan. Surat pengantar dibuat rangkap 2, lembar pertama untuk alamat tujuan surat dan lembar kedua untuk unit pengolah asal surat/pengirim surat.

e. Lembar Disposisi (sesuai Tata Naskah Dinas)

Lembar disposisi merupakan sarana yang digunakan oleh pimpinan untuk memberikan wewenang dan tugas kepada bawahan dalam bentuk perintah atau instruksi secara singkat dan jelas guna memproses dan/atau menyelesaikan suatu surat. Lembar disposisi dimaksudkan agar pimpinan tidak menulis perintah/instruksinya pada surat. Lembar disposisi menjadi satu kesatuan dengan surat sehingga tidak dapat dipisahkan dengan surat baik untuk kepentingan pemberkasan maupun penyusutan Arsip. Lembar disposisi dibuat dalam bentuk formulir dengan ukuran 21,5 cm x 16,5 cm (setengah halaman F4). Setiap surat masuk yang diterima oleh unit pengolah (central file setingkat eselon III) diberi lembar disposisi rangkap 2 (dua), satu lembar untuk unit pengolah dan satu lembar lagi untuk tujuan disposisi. Lembar disposisi di unit pengolah disimpan di tickler file untuk mengingatkan unit kerja/pelaksana tujuan disposisi bila waktu penyelesaian surat sudah berakhir.

f. Buku Agenda Surat

Contoh Buku Agenda Surat Masuk

No. Urut	Tgl. Terima Surat	Asal Surat	Tgl. Surat	Nomor Surat	Isi Ringkas	Tujuan Surat	Unit Pengolah	Penerimaan		Keterangan
								Paraf & Nama	Tgl.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Cara Pengisian Buku Agenda Masuk

- No.Urut : diisi nomor urut surat masuk di unit kearsipan
- Tgl. Terima Surat : diisi tanggal surat diterima di unit kearsipan
- Asal Surat : diisi nama atau instansi pengirim surat
- Tanggal Surat : diisi tanggal yang tertera pada surat
- Nomor Surat : diisi nomor yang tertera pada surat
- Isi Ringkas : diisi isi ringkas dari surat
- Tujuan Surat : diisi alamat tujuan yang tertera pada surat
- Unit Pengolah : diisi unit pengolah tujuan surat setelah diarahkan sesuai dengan isi ringkas surat
- Paraf dan nama : diisi paraf dan nama penerima surat di unit Penerima pengolah
- Tgl. : diisi tanggal penerimaan surat di unit pengolah

Keterangan : diisi hal-hal yang tidak tercakup dalam kolom lain seperti surat berupa faks/email, tidak ada lampiran atau lampiran tidak lengkap.

g. Buku Agenda Surat Keluar

Buku agenda surat keluar adalah sarana berupa buku yang digunakan untuk mencatat surat keluar. Pencatatan dilakukan secara kronologis sesuai dengan tanggal terima surat di unit kearsipan untuk dikirim ke luar.

Contoh Buku Agenda Surat Keluar

No. Urut	Tgl. Terima Surat	Asal Surat	Tgl. Surat	Nomor Surat	Isi Ringkas	Tujuan Surat	Pengirim	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Cara Pengisian Buku Agenda Keluar

No.Urut : diisi nomor urut surat yang diterima di unit kearsipan dari unit pengolah untuk dikirim ke luar

Tgl. Terima Surat : diisi tanggal surat diterima di unit kearsipan dari unit pengolah untuk dikirim ke luar

Asal Surat : diisi nama unit pengolah pengirim surat

Tanggal Surat : diisi tanggal yang tertera pada surat

Nomor Surat : diisi nomor yang tertera pada surat

Isi Ringkas : diisi isi ringkas dari surat

Tujuan Surat : diisi alamat tujuan yang tertera pada surat

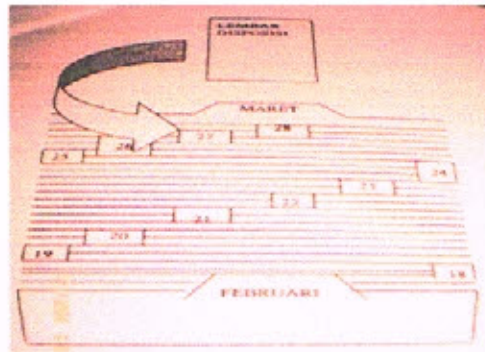
Pengirim : diisi nama petugas unit pengolah yang menyampaikan surat

Keterangan : diisi dengan hal-hal yang tidak tercakup dalam kolom lain seperti surat dikirim dengan antar langsung oleh petugas persuratan atau dengan jasa pengiriman yang disertai nama petugas yang mengirim surat dan keterangan lain yang dianggap perlu seperti disertai buku, foto atau gambar.

h. Tickler File

Tickler File yaitu sarana yang berbentuk kotak karton untuk menyimpan lembar disposisi sesuai tanggal penyelesaian disposisi. *Tickler File* digunakan oleh unit pengolah sebagai sarana pengendalian penyelesaian surat sesuai dengan batas tanggal penyelesaian surat yang tercantum pada lembar disposisi.

TICKLER FILE



i. Buku Ekspedisi

Buku ekspedisi adalah sarana pengiriman surat yang berfungsi sebagai tanda bukti bahwa surat sudah dikirim.

BUKU EKSPEDISI

No. Urut	Tanggal Surat	Nomor Surat	Isi Ringkas	Tujuan Surat	Penerimaan		Ket
					Paraf & Nama	Tanggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Cara Pengisian Buku Ekspedisi

No. Urut : diisi nomor urut surat yang dikirim

Tanggal Surat : diisi tanggal yang tertera pada surat

Nomor Surat : diisi nomor yang tertera pada surat

Isi Ringkas : diisi isi ringkas dari surat

Tujuan Surat : diisi alamat tujuan surat

Paraf dan nama : diisi paraf dan nama yang menerima surat untuk dikirim

Tanggal : diisi tanggal penerimaan surat

Keterangan : diisi dengan hal-hal yang tidak tercakup dalam kolom lain seperti nama jasa pengiriman yang diinginkan/digunakan

j. Tanda Bukti Pinjaman

Contoh Tanda Bukti Pinjaman

DINAS

TANDA BUKTI PINJAMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	
NIP	:	
Unit Kerja	:	
Nomor Telepon	:	
Telah meminjam arsip	:	
Kode	:	
Hal	:	
dan akan mengembalikan pada tanggal	:	

Kutai Timur,

Petugas yang melayani,

.....

NIP

Yang meminjam,

.....

NIP

Mengetahui/Menyetujui
Kepala Unit Kearsipan/Unit Pengolah,

.....

NIP

2. Pengurusan Surat

a. Pengurusan naskah dinas masuk

Pengurusan naskah dinas masuk meliputi kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Kearsipan dan Tata Usaha Pengolah. Pada unit kearsipan dilaksanakan melalui kegiatan penerimaan, pengarahan, pencatatan, pengendalian dan penyimpanan.

1) Penerima mempunyai tugas:

- (a) Meneliti kebenaran alamat naskah dinas;
- (b) Membubuhkan paraf pada bukti penerimaan;
- (c) Mensortir naskah dinas;
- (d) Membuka sampul dan mengeluarkan naskah dinas dari sampul;
- (e) Dalam hal alamat pengirim tidak tercantum di dalam naskah dinas, sampul diikutsertakan bersama naskah dinasnya;
- (f) Meneliti kelengkapan lampiran naskah dinas;
- (g) Menyampaikan naskah dinas kepada pengarah yang disertai lembar disposisi.

2) Pengarah mempunyai tugas:

- (a) Membaca naskah dinas dan menentukan naskah dinas yang penting atau naskah dinas biasa;
- (b) Mencantumkan disposisi pengarah pada bagian kanan atas naskah dinas;

- (c) Menentukan kode klasifikasi dan indeks pada naskah dinas penting;
 - (d) Menyampaikan naskah dinas kepada pencatat.
- 3) Pencatat mempunyai tugas:
- (a) Mencantumkan nomor urut pada kartu kendali dan disposisi;
 - (b) Mengisi kartu kendali;
 - (c) Menyampaikan naskah dinas kepada pengendali.
- 4) Pengendali mempunyai tugas:
- (a) Menerima naskah dinas beserta kartu kendali dari pencatat;
 - (b) Meneliti kebenaran nomor kode dan pengisian kartu kendali serta kelengkapan lampiran;
 - (c) Menyampaikan naskah dinas beserta kartu kendali dan disposisi lembar 2 dan 3 kepada Unit Pengolah;
 - (d) Menyusun kartu kendali dan disposisi lembar 1 dalam *Tickler File* berdasarkan urutan nomor kode. Dalam susunan kode, kartu kendali disusun berdasarkan urutan abjad pada indeks.

Pengurusan naskah dinas masuk pada tata usaha pengolah meliputi kegiatan-kegiatan:

- 1) Menerima naskah dinas, kartu kendali dan disposisi lembar 2 dan 3;
 - 2) Membubuhkan paraf pada kartu kendali lembar 1 sebagai tanda bukti bahwa naskah dinas sudah diterima;
 - 3) Mengembalikan kartu kendali dan disposisi lembar 1 kepada pengendali;
 - 4) Mengisi disposisi rangkap dua;
 - 5) Menyampaikan naskah dinas yang diterima dari unit kearsipan disertai kartu kendali dan disposisi lembar 2 kepada pengolah;
 - 6) Menyimpan kartu kendali dan disposisi lembar 3 dalam *Tickler File* (atau almari katalog) berdasarkan urutan nomor kode.
- b. Pengurusan naskah dinas keluar

Pengurusan naskah dinas keluar meliputi kegiatan yang dilaksanakan oleh tata usaha unit pengolah dan unit kearsipan.

- 1) Tata Usaha Pengolah mempunyai tugas:
 - (a) Mencatat naskah dinas keluar dalam kartu kendali rangkap 3;
 - (b) Menyampaikan konsep dan net beserta 3 rangkap kartu kendali kepada pengendali di unit kearsipan;
 - (c) Mengendalikan naskah dinas yang belum selesai pengolahannya dan menyampaikan naskah dinas yang sudah

selesai pengolahannya kepada penyimpan disertai kartu kendali lembar 1 dan 3;

- (d) Menyimpan kartu kendali lembar 2 menurut urutan nomor kode setelah mendapat tanda tangan penyimpan.

2) Unit Kearsipan

Unit kearsipan melaksanakan kegiatan pengendalian, dan penyimpanan, yaitu:

- (a) Pemberian nomor kode klasifikasi pada kartu kendali dan mengembalikan kepada tata usaha pengolah;
- (b) Penyimpanan kartu kendali lembar 1 menurut urutan nomor kode.

c. Penyimpanan arsip

- 1) Penyimpanan arsip aktif dipusatkan pada Unit Pengolah (*Central File*), caranya:

- (a) Tata Usaha Unit Pengolah menyimpan arsip aktif menurut urutan kode klasifikasi;
- (b) Arsip disusun dalam folder dan dimasukkan dalam map gantung pada filing kabinet sesuai urutan kode klasifikasi.

- 2) Penyimpanan arsip inaktif dipusatkan pada Unit Kearsipan (*Record Centre*), caranya:

- (a) Menempatkan arsip pada folder untuk dimasukkan ke dalam boks arsip dan disusun secara vertikal;
- (b) Boks arsip ditempatkan pada rak arsip;

- 3) Penyimpanan dan pemeliharaan arsip statis dilakukan oleh Lembaga Kearsipan Daerah sebagai Unit Kearsipan I.

d. Penemuan kembali arsip

Cara penemuan kembali arsip dapat dilakukan menggunakan daftar arsip baik untuk arsip-arsip aktif, inaktif maupun statis.

3. Pemberkasan Surat Berdasarkan Kode Klasifikasi

- a. Klasifikasi kearsipan Pemerintah Daerah merupakan klasifikasi yang disusun berdasarkan masalah, mencerminkan fungsi dan kegiatan pelaksanaan tugas dari semua satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah yaitu menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah, ideologi, politik, pembangunan desa dan agraria, diberi kode angka, diperinci secara *DECIMAL*, dengan mempergunakan *TIGA ANGKA DASAR*, dilengkapi dengan kode

pembantu, kode wilayah dan singkatan nama komponen.

- b. Pola klasifikasi disusun secara berjenjang dengan mempergunakan prinsip perkembangan dari umum kepada khusus dalam hubungan masalah, didahului oleh 3 (tiga) perincian dasar, masing-masing perincian pertama, perincian kedua dan perincian ketiga sebagai pola dasar yang berfungsi sebagai jembatan penolong dalam menemukan kode masalah yang tercantum dalam pola klasifikasi.
- c. Sesuai dengan sifat desimal arsip dikelompokkan dalam 10 (sepuluh) pokok masalah, diberi kode 000 s/d 900. Dari 10 pokok masalah ini terlebih dahulu dibedakan antara tugas substantif (pokok) dan tugas fasilitatif (penunjang). Angka 100 s/d 600 merupakan kode tugas-tugas substantif, sedangkan angka 000, 700, 800, dan 900 merupakan kode tugas-tugas fasilitatif. Kode 000 menampung masalah-masalah fasilitatif di luar masalah pengawasan, kepegawaian dan keuangan. Di samping itu juga ditampung masalah-masalah yang berkaitan dengan kerumahtanggaan, seperti protokol urusan dalam dan masalah-masalah yang tidak dapat dimasukkan dalam kelompok lainnya, seperti perjalanan dinas, peralatan, lambang negara atau daerah, tanda-tanda kehormatan dan sebagainya.
- d. Dengan demikian maka sepuluh pokok masalah tersebut telah menampung seluruh kegiatan pelaksanaan tugas. Sepuluh masalah tersebut adalah sebagai berikut:

000	Umum
100	Pemerintahan
200	Politik
300	Keamanan dan Ketertiban
400	Kesejahteraan
500	Perekonomian
600	Pekerjaan Umum dan Ketenagaan
700	Pengawasan
800	Kepegawaian
900	Keuangan

e. Kode Pembantu

Kode pembantu merupakan bentuk penyajian dari masalah tertentu yang merupakan aspek yang selalu timbul berkaitan dengan masalah lainnya, ditambah tiap kode yang memerlukan perincian lebih lanjut, untuk dapat memberikan dimensi ekstra pada arsip. Kode Pembantu di bawah ini tidak bisa dipakai sendiri, tetapi dapat dipakai sebagai pelengkap dari yang mana pun, dengan menambahkannya di belakang tiap kode.

Contoh : Seminar Penerbitan : 481.06

Statistik Produksi Padi : 521.21.07

Survey Ketahanan Pangan: 526.021

- 01 PERENCANAAN
- 02 PENELITIAN
- 021 Survey
- 022 Riset
- 03 PENDIDIKAN
- 04 LAPORAN
- 041 Sewaktu-waktu
- 042 Monografi
- 043 Pengaduan
- 05 TIM, PANITIA, DEWAN, BADAN
- 06 SEMINAR, WORKSHOP, LOKAKARYA, RAKE, KONGRES
- 07 STATISTIK
- 071 Sensus, Cacah Jiwa
- 08 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- 09 --

f. Kode Wilayah

- 1 PUSAT
- 11 Nanggroe Aceh Darussalam
- 12 Sumatera Utara
- 13 Sumatera Barat
- 14 Riau
- 15 Jambi
- 16 Sumatera Selatan
- 17 Bengkulu
- 18 Lampung

- 19 Kepulauan Bangka Belitung
- 21 Kepulauan Riau
- 31 DKI Jakarta
- 32 Jawa Barat
- 33 Jawa Tengah
- 34 Daerah Istimewa Yogyakarta
- 35 Jawa Timur
- 36 Banten
- 51 Bali
- 52 Nusa Tenggara Barat
- 53 Nusa Tenggara Timur
- 61 Kalimantan Barat
- 62 Kalimantan Tengah
- 63 Kalimantan Selatan
- 64 Kalimantan Timur
- 65 Kalimantan Utara
- 71 Sulawesi Utara
- 72 Sulawesi Tengah
- 73 Sulawesi Selatan
- 74 Sulawesi Tenggara
- 75 Gorontalo

g. Kode Komponen

Kode komponen adalah kode untuk menunjukkan nama komponen yang menangani masalah di tingkat Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur. Kode komponen tersebut diatur sebagai berikut:

Bup	Bupati Kutai Timur
Wabup	Wakil Bupati Kutai Timur
Sekda	Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur
As 1	Asistem Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
As 2	Asisten Perekonomi dan Pembangunan
As 3	Asisten Administrasi Umum
Tapem	Bagian Tata Pemerintahan
Huk	Bagian Hukum
Prokompi	Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan
Kesra	Bagian Kesejahteraan Rakyat
Eko	Bagian Perekonomian

SDA	Bagian Sumber Daya Alam
Umum	Bagian Umum
Adpem	Bagian Administrasi Pembangunan
Org	Bagian Organisasi
Renkeu	Bagian Perencanaan & Keuangan
PBJ	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Kesam	Bagian Kerjasama
Setwan	Sekretariat DPRD
Itwil	Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur
Bapenda	Badan Pendapatan Daerah
BPKAD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BKPP	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Balitbang	Badan Penelitian dan Pengembangan
Kesbangpol	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Dishub	Dinas Perhubungan
Disdukcapil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinkop	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Dinkes	Dinas Kesehatan
Damkar	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
DKP	Dinas Kelautan dan Perikanan
DLH	Dinas Lingkungan Hidup
Dispar	Dinas Pariwisata
Perkim	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Disbud	Dinas Kebudayaan
DPU	Dinas Pekerjaan Umum
PPR	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
DP3A	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Ketapang	Dinas Ketahanan Pangan
DPMPTSP	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Dispert	Dinas Pertanian
DPPKB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Disbun	Dinas Perkebunan
DPMD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Disperindag	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Satpol PP	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
Dinsos	Dinas Sosial
Dispora	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Disnakertrans	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Diskominfo-Perstik	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik
Disdik	Dinas Pendidikan
KORPRI	Sekretariat DP KORPRI
PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum Kutai Timur

4. Cara Penggunaan

- a. Untuk memahami pola klasifikasi terlebih dahulu harus memahami perincian pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya perlu memahami hubungan antar masalah dan anak masalahnya pada pola dengan memerhatikan efek dan prinsip berjenjang. Tiap kode, kecuali kode masalah yang pokok pada perincian pertama merupakan bagian dari sub ordinat dan kode atasannya. Untuk mendapatkan gambaran yang benar masalah 518.131 harus diketahui bahwa masalah ini merupakan bagian dari 518.13, dan 518.13 bagian dari 518. 518 bagian dari 510, dan 510 bagian dari 500.

Di samping itu perlu diperhatikan khusus klasifikasi 500.

Contoh:

500	Perekonomian	(Perincian Pertama)
510	Perdagangan	(Perincian Kedua)
518	Koperasi	(Perincian Ketiga)
518.1	Bina Usaha Koperasi	(Perincian Keempat)
518.13	Permodalan Koperasi	(Perincian Kelima)
518.131	Pemupukan Modal	(Perincian Keenam)

- b. Untuk dapat mengklasifikasi surat dengan kode yang setepat-tepatnya haruslah dipahami benar masalah yang dikandungnya, dan sudut pandang mana masalah ini disajikan. Untuk menentukan masalah dalam surat tidak selalu mudah, pada umumnya "hal" tersebut merupakan petunjuk yang kurang tepat. Karena itu, untuk menentukan kode yang tepat harus membaca dan memahami masalah yang dikandung dalam surat. Harus selalu diingat bahwa penemuan kembali surat banyak sekali bergantung pada ketepatan pemberian kode.

- c. Surat yang mengandung lebih dari satu masalah.

Masalah-masalah itu dapat merupakan masalah yang terpisah satu sama lain atau masalah-masalah yang saling berkaitan. Dalam menghadapi hal yang demikian, harus berhati-hati memilih masalah yang akan ditentukan menjadi masalah pokok.

Masalah yang dipilih haruslah yang paling berat tekanannya, dan harus diyakini benar bahwa masalah itulah yang akan dikemukakan dalam penemuan kembali arsip.

- d. Pemberian kode masalah dapat ditetapkan secara umum atau lebih terperinci. Masalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat secara berturut-turut diberi kode:

188.342

- e. Kode Pembantu

Kode Pembantu merupakan kode pelengkap yang tidak dapat dipakai tersendiri. Tetapi ditambahkan di belakang kode yang memerlukan perincian lebih lanjut. Dengan ditambahkannya kode pembantu, maka dapat memberikan dimensi ekstra pada arsip.

Contoh:

591	Tata Guna Tanah
.02	Kode Pembantu Penelitian
591.02	Penelitian Tata Guna Tanah
413.2	Pemukiman Kembali Penduduk
.06	Kode Pembantu Seminar
413.2.06	Seminar Pemukiman Kembali Penduduk

- f. Menyusun Kode

Untuk memperoleh kode yang spesifik, kode-kode masalah yang satu dapat digabungkan dengan kode-kode masalah yang lain. Penggabungan ini dapat dilihat contohnya pada kode 050 dan 700.

Perencanaan (050) maupun proyek pembangunan dapat meliputi semua bidang kegiatan, karena itu untuk memperoleh kode yang terperinci, maka kode 050 dapat disambungkan dengan seluruh perincian kode dalam pola dari 000 sampai 900.

Begitu juga dengan Pengawasan (700) yang meliputi bidang apapun dapat digabungkan dengan perincian kode dalam pola.

- g. Apabila pada kode ada petunjuk "perincian tambahan" berarti harus menambahkan kode dan pola yang satu ke kode-kode pola yang lain.

Contoh I :

055	Proyek Bidang Perekonomian
-----	----------------------------

511.2 Pasar

055.112 Proyek Pembangunan Pasar

Contoh II :

056 Proyek Bidang Pekerjaan Umum

630 Jembatan

056.3 Proyek Jembatan (angka 0 paling belakang sesudah titik desimal dihilangkan).

h. Kode wilayah.

Kode wilayah dipergunakan untuk memperinci lebih lanjut arsip yang jumlahnya sangat besar dan untuk keperluan penyusunan berkas. Di kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri Arsip Kepegawaian jumlahnya sangat besar oleh karena itu memerlukan perincian dengan kode wilayah, dengan cara menempatkan kode wilayah di belakang angka kode pokok masalah. Contoh :

121.64 Gubernur Kalimantan Timur

121.51 Gubernur Bali

Dengan dipergunakannya kode wilayah, kesulitan menata arsip yang jumlahnya sangat besar itu dapat dipecahkan karena arsip berada pada file masing-masing Provinsi. Kode wilayah dimaksud hanya dipakai oleh Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, dan tidak dapat dipakai oleh Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Bagi Daerah Provinsi dapat membentuk kode wilayah sendiri untuk Kabupaten di wilayahnya. Sebelum memutuskan untuk membentuk kode wilayah tersebut, harus dipikirkan apakah hal itu memang benar-benar diperlukan oleh Provinsi. Penyusunan Kode Wilayah menganut prinsip desimal dan setelah tersusun secara mantap disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dimuat dalam pola klasifikasi edisi yang akan datang.

Penggunaan kode wilayah tidak dapat digabungkan begitu saja pada kode-kode seperti penggunaan kode pembantu, tetapi hanya digunakan pada kode-kode dimana tercantum petunjuk-petunjuk tambahan kode wilayah.

i. Ada beberapa masalah yang dapat diklasifikasikan dengan 2 (dua) macam kode, dan 2 (dua) kode yang berlainan itu sama-sama benar.

Contoh :

- 1). Peraturan Pemerintah tentang Pensiun, bisa diklasifikasikan dengan kode 188.31 Peraturan Pemerintah atau 882.08 peraturan tentang pensiun. Masalah pemberhentian dengan pensiun (882),

ditambah dengan kode pembantu untuk Peraturan Perundang-undangan (08).

- 2). Penelitian penghasilan pamong desa, dapat diklasifikasikan 070 (Penelitian) atau 142.02 (Penelitian Penghasilan Pamong Desa). Masalahnya penghasilan pamong desa (142) ditambah dengan kode pembantu untuk penelitian (02).

Kedua cara pengklasifikasian ini sama-sama benar. Cara ini dimaksudkan untuk memberi keleluasaan pada penataan berkas. Jika penataan berkas akan dilakukan dengan cara mengelompokkan semua jenis Peraturan Pemerintah, atau semua kegiatan Penelitian, maka arsip diklasifikasikan tanpa kode pembantu, tetapi jika penataan berkas diklasifikasikan ialah masalahnya, maka yang diklasifikasikan ialah masalahnya ditambah dengan kode pembantu.

j. Tunjuk Silang

Jika dijumpai surat yang mengandung dua masalah dan masalah tersebut mempunyai tekanan yang sama beratnya, maka dapat diatasi dengan jalan membuat kartu tunjuk silang. Surat tersebut diklasifikasikan dengan dua kode. Satu kode diisikan pada kartu kendali dan satu kode lagi diisikan pada kartu tunjuk silang. Dengan demikian maka penemuan kembali surat dimaksud dapat dilakukan dengan dua arah. Surat tentang "Persawahan untuk transmigrasi" dapat diberi kode 521.5 (Persawahan) dengan tunjuk silang: 475 (Transmigrasi) atau sebaliknya. Perlu diperhatikan, bahwa penggunaan tunjuk silang terbatas pada masalah yang memang sangat penting.

k. Indeks Kaitan

Untuk memudahkan menelusuri kode-kode, disusun indeks kaitan. Indeks kaitan adalah himpunan nama-nama masalah yang disusun sesuai pola klasifikasi dan urutan abjad dengan ketentuan posisi kode indek kaitan di belakang masalah sedangkan pola klasifikasi di depan masalah.

BUPATI KUTAI TIMUR,

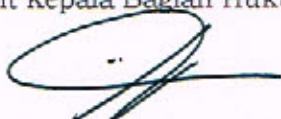
ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur

Plt Kepala Bagian Hukum,



Januar Bayu Irawan, SH

Penata/IIIC

NIP. 19850112 201101 1 003

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR TAHUN
 TENTANG PEDOMAN TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH

RINCIAN KODE KLASIFIKASI

1. Rincian Pertama

- 000 Umum
- 100 Pemerintahan
- 200 Politik
- 300 Keamanan dan Ketertiban
- 400 Kesejahteraan
- 500 Perekonomian
- 600 Pekerjaan Umum dan Ketenagaan
- 700 Pengawasan
- 800 Kepegawaian
- 900 Keuangan

2. Rincian Kedua

- 000 **Umum**
 - 010 Urusan Dalam
 - 020 Peralatan
 - 030 Kekayaan Daerah
 - 040 Perpustakaan/Dokumen/Kearsipan/Sandi
 - 050 Perencanaan
 - 060 Organisasi/Ketatalaksanaan
 - 070 Penelitian
 - 080 Konferensi/Rapat
 - 090 Perjalanan Dinas
- 100 **Pemerintahan**
 - 110 Pemerintah Pusat
 - 120 Pemerintah Provinsi
 - 130 Pemerintah Kabupaten/Kota
 - 140 Pemerintah Desa/Kelurahan
 - 150 Legislatif MPR/DPR/DPD
 - 160 DPRD Provinsi

- 170 DPRD Kabupaten/Kota
- 180 Hukum
- 190 Hubungan Luar Negeri

200 **Politik**

- 210 Kepartaian
- 220 Organisasi Kemasyarakatan
- 230 Organisasi Profesi dan Fungsional
- 240 Organisasi Pemuda
- 250 Organisasi Buruh, Tani, Nelayan dan Angkutan
- 260 Organisasi Wanita
- 270 Pemilihan Umum
- 280 Komisi Pemilihan Umum
- 290 --

300 **Keamanan/Ketertiban Umum**

- 310 Pertahanan
- 320 Kemiliteran
- 330 Keamanan
- 340 Petahanan Sipil
- 350 Kejahatan
- 360 Bencana
- 370 Kecelakaan/Sar
- 380 --
- 390 --

400 **Kesejahteraan Rakyat**

- 410 Pembangunan Desa
- 420 Pendidikan
- 430 Kebudayaan
- 440 Kesehatan
- 450 Agama
- 460 Sosial
- 470 Kependudukan
- 480 Media Massa
- 490 --

500 **Perekonomian**

- 510 Perdagangan

520	Pertanian
530	Perindustrian
540	Pertambangan/Kesamuderaan
550	Perhubungan
560	Tenaga Kerja
570	Permodalan
580	Perbankan/Moneter
590	Agraria

600 Pekerjaan Umum dan Ketenagakerjaan

610	Pengairan
620	Jalan
630	Jembatan
640	Bangunan
650	Tata Kota
660	Tata Lingkungan
670	Ketenagaan
680	Peralatan
690	Air Minum

700 Pengawasan

710	Bidang Pemerintahan
720	Bidang Politik
730	Bidang Keamanan/Ketertiban
740	Bidang Kesejahteraan Rakyat
750	Bidang Perekonomian
760	Bidang Pekerjaan Umum
770	Bidang Pejabat Publik
780	Bidang Kepegawaian
790	Bidang Keuangan

800 Kepegawaian

810	Pengadaan
820	Mutasi
830	Kedudukan
840	Kesejahteraan Pegawai
850	Cuti
860	Penilaian
870	Tata Usaha Kepegawaian

880	Pemberhentian Pegawai
890	Pendidikan Pegawai
900	Keuangan
910	Anggaran
920	Otorisasi/SKO
930	Verifikasi
940	Pembukuan
950	Perbendaharaan
960	Pembinaan Kebendaharaan
970	Pendapatan
980	--
990	Bendaharawan

3. Rincian Ketiga

000 UMUM

000 Umum

001	Lambang
002	Tanda Kehormatan/Penghargaan
003	Hari Raya/Besar
004	Ucapan
005	Undangan
006	Tanda Jabatan
007	Tanda Gambar Presiden, Wakil Presiden, dan Pejabat Pemerintah
008	--
009	--

010 Urusan Dalam

011	Gedung Kantor
012	Rumah Dinas
013	Mess/Guest House
014	Jasa Air
015	Penerangan Listrik/Jasa Listrik
016	Jasa Telepon/Faximile/Internet
017	Keamanan/Ketertiban Kantor
018	Kebersihan Kantor
019	Protokol

020 Peralatan

- 021 Alat Tulis
- 022 Mesin Kantor
- 023 Perabot Kantor
- 024 Alat Angkutan
- 025 Pakaian Dinas
- 026 Senjata
- 027 Pengadaan
- 028 Inventaris
- 029 Pengurusan Kendaraan

030 Kekayaan Daerah

- 031 Sumber Daya Alam
- 032 Asset Daerah
- 033 Barang-Barang Tidak Bergerak
- 034 Alat-alat Besar
- 035 Hewan
- 036 Barang Persediaan dalam Gudang
- 037 Alat Pengangkut (darat, laut, udara)
- 038 Peralatan Kantor/Pabrik
- 039 Peralatan Rumah Sakit

040 Perpustakaan/Dokumentasi/Kearsipan/Sandi

- 041 Perpustakaan
- 042 Dokumentasi
- 043 --
- 044 --
- 045 Kearsipan
- 046 Sandi
- 047 Website/Data Elektronik
- 048 Pengelolaan Data
- 049 Jaringan Komunikasi Data

050 Perencanaan

- 051 Proyek Bidang Pemerintahan
- 052 Bidang Politik
- 053 Bidang Keamanan/Ketertiban
- 054 Bidang Kesejahteraan Rakyat
- 055 Bidang Perekonomian

- 056 Bidang Pekerjaan Umum
- 057 Bidang Pengawasan
- 058 Bidang Kepegawaian
- 059 Bidang Keuangan

060 Organisasi/Ketatalaksanaan

- 061 Organisasi Instansi Pemerintah
- 062 Organisasi Badan Non Pemerintah
- 063 Organisasi Badan Internasional
- 064 Organisasi Semi Pemerintah, BKS-AKSI
- 065 Ketatalaksanaan
- 066 Tata Hubungan Kerja
- 067 Pelayanan Umum/Pelayanan Publik/Analisis
- 068 Evaluasi dan Pelaporan Ketatalaksanaan
- 069 Analisa Jabatan dan Pengukuran Beban Kerja

070 Penelitian

- 071 Riset
- 072 Survey/Eksplorasi/Studi Kelayakan/Studi Kasus
- 073 Kajian
- 074 Kerjasama Penelitian
- 075 Kementerian Lainnya
- 076 Non Kementerian
- 077 Provinsi
- 078 Kabupaten/Kota
- 079 Kecamatan/Desa

080 Konferensi/Rapat

- 081 Gubernur
- 082 Bupati/Walikota
- 083 Komponen Eselon Lainnya
- 084 Instansi Lainnya
- 085 Internasional di Dalam Negeri
- 086 Internasional di Luar Negeri
- 087 --
- 088 --
- 089 --

090 Perjalanan Dinas

- 091 Perjalanan Presiden/Wakil Presiden ke Daerah
- 092 Perjalanan Menteri ke Daerah
- 093 Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Eselon I) di Dalam Negeri
- 094 Perjalanan Pegawai
- 095 Perjalanan Tamu Asing ke Daerah
- 096 Perjalanan Presiden/Wakil Presiden ke Luar Negeri
- 097 Perjalanan Menteri ke Luar Negeri
- 098 Perjalanan Pejabat Tinggi ke Luar Negeri
- 099 Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri

100 PEMERINTAHAN**100 Pemerintahan**

- 101 Gerakan Disiplin Nasional
- 102 --
- 103 --
- 104 --
- 105 --

110 Pemerintah Pusat

- 111 Presiden
- 112 Wakil Presiden
- 113 Susunan Kabinet
- 114 Kementerian Dalam Negeri
- 115 Kementerian Lainnya
- 116 Lembaga Tinggi Negara
- 117 Lembaga Non Kementerian
- 118 Otonomi/Desentralisasi/Dekonsentrasi
- 119 Kerjasama Antar Kementerian

120 Pemerintah Provinsi

- 121 Gubernur
- 122 Wakil Gubernur
- 123 Sekretaris Wilayah Provinsi
- 124 Forum Koordinasi Pemerintah di Daerah
- 125 Pembentukan/Pemekaran Wilayah
- 126 Pembagian Wilayah
- 127 Penyerahan Urusan

- 128 Swapraja/Penataan Wilayah/Daerah
- 129 Likuidasi Dinas/Badan/Lembaga Provinsi

130 Pemerintah Kabupaten/Kota

- 131 Bupati/Walikota
- 132 Wakil Bupati/Walikota
- 133 Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
- 134 Forum Koordinasi Pemerintah di Daerah
- 135 Pembentukan/Pemekaran Wilayah
- 136 Pembagian Wilayah
- 137 Penyerahan Urusan
- 138 Pemerintah Wilayah Kecamatan
- 139 Likuidasi Dinas/Badan/Lembaga Kabupaten/Kota

140 Pemerintah Desa/Kelurahan

- 141 Pamong Desa, Kelurahan
- 142 Anggaran Pendapatan Pengeluaran Keuangan Desa
- 143 Kekayaan Desa
- 144 Dewan Tingkat Desa, Dewan marga, Rembug Desa, BUUD
- 145 Administrasi Desa
- 146 Kewilayahan
- 147 Pembangunan Desa
- 148 Perangkat Kelurahan/Desa
- 149 Dewan Kelurahan/Desa

150 Legislatif MPR/DPR/DPD

- 151 Keanggotaan MPR
- 152 Persidangan MPR
- 153 Kesejahteraan
- 154 Hak/Suara/Pendapat MPR
- 155 Keanggotaan DPR
- 156 Persidangan DPR
- 157 Kesejahteraan
- 158 Jawaban Pemerintah
- 159 Hak/Suara/Pendapat DPR

160 DPRD Provinsi

- 161 Keanggotaan
- 162 Persidangan

163	Kesejahteraan
164	Hak/Suara/Pendapat
165	Sekretaris DPRD Provinsi
166	--
167	--
168	--

170 DPRD Kabupaten/Kota

171	Keanggotaan
172	Persidangan
173	Kesejahteraan
174	Hak/Suara/Pendapat
175	Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota
176	--
177	--
178	--

180 Hukum

181	Perdata
182	Pidana
183	Peradilan
184	Hukum Internasional
185	Imigrasi
186	Kepenjaraan
187	Kejaksaan
188	Peraturan Perundang-Undangan
189	Hukum Adat

190 Hubungan Luar Negeri

191	Perwakilan Asing
192	Tamu Negara
193	Kerjasama dengan Negara Asing
194	Perwakilan RI di Luar Negeri
195	PBB
196	Laporan Luar Negeri
197	Hutang Luar Negeri PHLN/LOAN
198	MoU
199	--

200 POLITIK**200 Politik**

- 201 Kebijakan Umum
- 202 Orde Baru
- 203 Reformasi
- 204 Orde Lama
- 205 Perencanaan dan Program Pembinaan Politik Luar Negeri
- 206 --

210 Kepartaian

- 211 Lambang Partai
- 212 Kartu Tanda Anggota
- 213 Bantuan Keuangan Parpol
- 214 Partai Peserta Pemilu
- 215 Partai Bukan Peserta Pemilu
- 216 Program Partai
- 217 Pengurus Partai
- 218 Pertemuan Partai
- 219 Kaderisasi Partai

220 Organisasi Kemasyarakatan

- 221 Berdasarkan Perjuangan
- 222 Berdasarkan Kekayaan
- 223 Berdasarkan Kerohanian
- 224 Berdasarkan Lembaga Adat/Kedaerahan
- 225 Lembaga Swadaya Masyarakat
- 226 Organisasi Masyarakat
- 227 --

230 Organisasi Profesi dan Fungsional

- 231 Organisasi Kesehatan
- 232 Organisasi Guru
- 233 Organisasi Sarjana
- 234 Organisasi Advokat/Pengacara Indonesia
- 235 Lembaga Bantuan Hukum
- 236 Korps Pegawai Republik Indonesia
- 237 Organisasi Wartawan
- 238 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)

239 Organisasi Profesi dan Fungsional Lainnya

240 Organisasi Pemuda

- 241 Komite Nasional Pemuda Indonesia
- 242 Organisasi Mahasiswa
- 243 Organisasi Pelajar
- 244 Gerakan Pemuda Ansor
- 245 Gerakan Pemuda Islam Indonesia
- 246 Gerakan Pemuda Marhaenis
- 247 --
- 248 --

250 Organisasi Buruh, Tani, Nelayan dan Angkutan

- 251 Organisasi Pekerja
- 252 Organisasi Buruh Internasional
- 253 Himpunan Kerukunan Tani Indonesia
- 254 Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia
- 255 Keluarga Sopir Profesional Indonesia
- 256 Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA)
- 257 --
- 258 --

260 Organisasi Wanita

- 261 Dharma Wanita
- 262 Persatuan Wanita Republik Indonesia
- 263 Pemberdayaan Perempuan (Wanita)
- 264 Konggres Wanita
- 265 Persit Kartika Chandra
- 266 Bhayangkari
- 267 Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia
- 268 BKOW (Badan Koordinasi Organisasi Wanita)
- 269 LSM Wanita

270 Pemilihan Umum

- 271 Pencalonan
- 272 Nomor Urut Partai/Tanda Gambar
- 273 Kampanye/Alat Peraga Kampanye
- 274 Petugas Pemilu
- 275 Pemilih/Daftar Pemilih

- 276 Sarana/Prasarana Pemungutan Suara
- 277 Pemungutan Suara/Penghitungan Suara
- 278 Penetapan Hasil Pemilu
- 279 Penetapan Perolehan Jumlah Kursi dan Calon Terpilih

280 Komisi Pemilihan Umum

- 281 Panitia Pemilihan Indonesia
- 282 Panitia Pemilihan Provinsi
- 283 Panitia Pemilihan Kabupaten
- 284 Panitia Pemilihan Kecamatan
- 285 Panitia Pemungutan Suara
- 286 Sosialisasi Pemilu
- 287 Pelanggaran Pemilu
- 288 Pemantauan Pemilu
- 289 Sengketa Pemilu

300 KEAMANAN/KETERTIBAN

300 Keamanan/Ketertiban

- 301 Keamanan
- 302 Ketertiban
- 303 Koordinasi dan Kerjasama Keamanan dan Ketertiban Umum
- 304 Pengawasan Trantibum
- 305 Pengawasan Pelaksanaan Perda
- 306 Pembinaan/Penyuluhan Pelanggaran Perda
- 307 Patroli Wilayah

310 Pertahanan

- 311 Darat
- 312 Laut
- 313 Udara
- 314 Perbatasan
- 315 --
- 316 --
- 317 --

320 Kemiliteran

- 321 Latihan Militer dan Bela Negara

- 322 Wajib Militer
- 323 Operasi Militer
- 324 Kekayaan TNI, Pejabat Sipil dari TNI
- 325 Tentara Nasional Indonesia
- 326 Fasilitas Militer
- 327 --
- 328 --

330 Keamanan

- 331 Kepolisian
- 332 Huru-Hara/Demonstrasi
- 333 Senjata Api/Tajam
- 334 Bahan Peledak
- 335 Perjudian
- 336 Surat-Surat Kaleng
- 337 Pengaduan
- 338 Himbauan/Pengarahan/Sosialisasi/Larangan
- 339 Teroris

340 Pertahanan Sipil

- 341 Perlindungan Sipil/Masyarakat (LINMAS)
- 342 SATPAM

350 Kejahatan

- 351 Makar/Pemberontakan/Organisasi Terlarang
- 352 Pembunuhan, Penemuan Mayat, Bunuh Diri
- 353 Pencurian/Penganiayaan/Perampasan
- 354 Subversif/Penyelundupan/Narkotika, Obat-Obatan dan Zat Adiktif Lainnya
- 355 Pemalsuan
- 356 Korupsi/Penyelewengan/Penyalahgunaan Jabatan/KKN
- 357 Kejahatan/Kekerasan Terhadap Perempuan
- 358 Kenakalan/Kenakalan Remaja
- 359 Kejahatan Lainnya

360 Bencana

- 361 Gunung Berapi/Gempa
- 362 Banjir/Tanah Longsor
- 363 Angin Topan/Lissus/Badai/Putting Beliung, dll.
- 364 Kebakaran

- 365 Kekeringan
- 366 Tsunami
- 367 --
- 368 --

370 Kecelakaan/SAR

- 371 Darat/Lalu Lintas Jalan Raya
- 372 Udara
- 373 Laut
- 374 Sungai/Danau/Telaga/Waduk
- 375 Search And Rescue (Regu Penyelamat)
- 376 Pelatihan
- 377 Satkorlak dan Satlak PBP
- 378 Kecelakaan Pendakian Gunung
- 379 Kecelakaan Listrik
- 380 --

400 KESEJAHTERAAN RAKYAT

400 Kesejahteraan Rakyat

- 401 Keluarga Miskin
- 402 PNPM Mandiri Pedesaan
- 403 Kompensasi BBM/Bantuan Langsung Tunai (BLT)
- 404 Penyaluran Beras Miskin (Raskin)

410 Pembangunan Desa

- 411 Pembinaan Usaha Gotong Royong
- 412 Perekonomian Desa
- 413 Prasarana Desa
- 414 Pengembangan Desa
- 415 Koordinasi
- 416 Penerapan dan Pendayagunaan Teknologi Desa
- 417 --
- 418 --

420 Pendidikan

- 421 Sekolah
- 422 Administrasi Sekolah
- 423 Metode Belajar

424	Tenaga Pengajar
425	Sarana Pendidikan
426	Keolahragaan
427	Kepemudaan
428	Kepramukaan
429	Pendidikan Kedinasan

430 **Kebudayaan**

431	Kesenian
432	Kepurbakalaan
433	Sejarah
434	Bahasa
435	Usaha Pertunjukan
436	Kepercayaan
437	--
438	--
439	--

440 **Kesehatan**

441	Pembinaan Kesehatan
442	Obat-obatan
443	Penyakit
444	Gizi
445	Rumah Sakit
446	Tenaga Medis
447	Alat Media
448	Pengobatan Tradisional
449	Apotek

450 **Agama**

451	Islam
452	Protestan
453	Katholik
454	Hindu
455	Budha
456	Urusan Haji
457	Umroh
458	--
459	--

460 Sosial

- 461 Rehabilitasi Penderita Cacat
- 462 Tuna Sosial
- 463 Kesejahteraan Anak/Keluarga
- 464 Pembinaan Pahlawan
- 465 Kesejahteraan Sosial
- 466 Sumbangan Sosial
- 467 Bimbingan Sosial
- 468 PMI
- 469 Makam

470 Kependudukan

- 471 Pendaftaran Penduduk
- 472 Pencatatan Sipil
- 473 Informasi Kependudukan
- 474 Perkembangan Penduduk
- 475 Proyeksi dan Penyerasian Kebijakan Kependudukan
- 476 Monitoring
- 477 Evaluasi
- 478 Dokumentasi
- 479 Keluarga Berencana

480 Media Massa

- 481 Penerbitan
- 482 Radio
- 483 Televisi
- 484 Film
- 485 Pers
- 486 Grafika/Reklame
- 487 Penerangan
- 488 Operating Room
- 489 Hubungan Masyarakat
- 490 Pengaduan Masyarakat
- 491 Internet
- 492 Peningkatan Kapasitas Bidang Infokom
- 493 Hubungan Antar Lembaga
- 494 Sistem Naskah Sosialisasi Kegiatan Gubernur/Kepala Daerah

500 PEREKONOMIAN**500 Perekonomian**

- 501 Pengadaan Pangan
- 502 Pengadaan Sandang
- 503 Perizinan
- 504 --
- 505 --
- 506 --

510 Perdagangan

- 511 Pemasaran
- 512 Ekspor
- 513 Impor
- 514 Perdagangan Antar Pulau
- 515 Perdagangan Luar Negeri
- 516 Pergudangan
- 517 Aneka Usaha Perdagangan
- 518 Koperasi
- 519 --

520 Pertanian

- 521 Tanaman Pangan
- 522 Kehutanan
- 523 Perikanan dan Kelautan
- 524 Peternakan
- 525 Perkebunan
- 526 Ketahanan Pangan
- 527 --
- 528 --
- 529 --

530 Perindustrian

- 531 Industri Logam
- 532 Industri Mesin/Elektronika
- 533 Industri Kimia/Farmasi
- 534 Industri Tekstil
- 535 Industri Makanan/Minuman
- 536 Aneka Industri/Perusahaan

- 537 Aneka Kerajinan
- 538 Usaha Negara/BUMN
- 539 Perusahaan Daerah/BUMD/BULD

540 **Pertambangan/Kesamuderaan**

- 541 Bahan Galian
- 542 Gas Bumi
- 543 Aneka Tambang
- 544 Logam Mulia, Emas, Intan, Perak
- 545 Logam
- 546 Geologi
- 547 Hidrologi
- 548 Kesamuderaan
- 549 Kelautan, Pesisir Pantai

550 **Perhubungan**

- 551 Perhubungan Darat
- 552 Perhubungan Laut
- 553 Perhubungan Udara
- 554 Pos
- 555 Telekomunikasi
- 556 Pariwisata dan Rekreasi
- 557 Meteorologi
- 558 --
- 559 --

560 **Tenaga Kerja**

- 561 Upah
- 562 Penempatan Tenaga Kerja/TKI
- 563 Latihan Kerja
- 564 Tenaga Kerja/Sukarela
- 565 Perselisihan Perburuhan
- 566 Keselamatan Kerja
- 567 Pemutusan Hubungan Kerja
- 568 Kesejahteraan Buruh
- 569 Tenaga Kerja Orang Asing

570 **Permodalan**

- 571 Modal Domestik

572	Modal Asing
573	Modal Patungan
574	Pasar Uang dan Modal
575	Saham
576	Belanja Modal
577	Modal Daerah
578	--
579	--

580 Perbankan/Moneter

581	Kredit
582	Investasi
583	Tabungan, Perubahan, Penutupan
584	Lembaga Perbankan
585	Asuransi
586	Alat Pembayaran, Cek, Giro, Wesel, dan Transfer
587	Fiskal
588	Hutang Negara/Obligasi
589	Moneter/Transaksi Moneter lainnya

590 Agraria

591	Tata Guna Tanah
592	Landreform
593	Pengurusan Hak-Hak Tanah
594	Pendaftaran Tanah
595	Tanah/Lahan Untuk Transmigrasi
596	Tanah Aset Pemda
597	--
598	--
599	--

600 PEKERJAAN UMUM dan KETENAGAAN

600 Pekerjaan Umum dan Ketenagaan

601	Tata bangunan, Konstruksi, dan Industri Konstruksi
602	Kontraktor, Pemborong
603	Arsitektur
604	Bahan bangunan
605	Instalasi

606	Konstruksi Pencegahan
607	--
608	--
609	--

610 Pengairan

611	Irigasi
612	Folder
613	Pasang Surut
614	Pengendalian Sungai
615	Pengamanan Pantai
616	Air Tanah
617	--
618	--
619	--

620 Jalan

621	Jalan Kota
622	Jalan Luar Kota
623	--
624	--
625	--

630 Jembatan

631	Jembatan pada Jalan Kota
632	Jembatan pada Jalan Luar Kota
633	--
634	--
635	--

640 Bangunan

641	Bangunan Pemerintah
642	Bangunan Pendidikan
643	Bangunan Rekreasi
644	Bangunan Perdagangan
645	Bangunan Pelayanan Umum
646	Bangunan Peninggalan Sejarah
647	Bangunan Industri
648	Bangunan Tempat Tinggal

649 Elemen Bangunan

650 Tata Kota

651 Daerah Perdagangan/Pelabuhan
 652 Daerah Pemerintahan
 653 Daerah Perumahan
 654 Daerah Industri
 655 Daerah Rekreasi (Open Green Space)
 656 Transportasi (Tata Letak)
 657 Assainering
 658 Kesehatan Lingkungan
 659 --

660 Tata Lingkungan

661 Daerah Hutan
 662 Daerah Pertanian/Perkebunan
 663 Daerah Pemukiman
 664 Pusat Pertumbuhan
 665 Transportasi
 666 --

670 Ketenagaan

671 Listrik
 672 Tenaga Air
 673 Tenaga Minyak
 674 Tenaga Gas
 675 Tenaga Matahari
 676 Tenaga Nuklir
 677 Tenaga Panas Bumi
 678 Tenaga Uap
 679 Tenaga Lainnya

680 Peralatan

681 --

690 Air Minum

691 Intake
 692 Transmisi Air Beku
 693 Instalasi Pengelolaan

694 Distribusi

695 --

700 PENGAWASAN

700 Pengawasan

701 Bidang Urusan Dalam

702 Bidang Peralatan

703 Bidang Organisasi/Ketatalaksanaan

704 Bidang Kekayaan Daerah

705 Bidang Perpustakaan/Dokumentasi/Kearsipan/Sandi

706 Bidang Perencanaan

707 Bidang Penelitian

708 Bidang Konferensi/Rapat Dinas

709 Bidang Perjalanan Dinas

710 Bidang Pemerintahan

711 Bidang Pemerintahan Pusat

712 Bidang Pemerintahan Provinsi

713 Bidang Pemerintahan Kabupaten/Kota

714 Bidang Pemerintahan Desa

715 Bidang MPR/DPR

716 Bidang DPRD Provinsi

717 Bidang DPRD Kabupaten/Kota

718 Bidang Hukum/Konstitusi/Peraturan Lainnya

719 Bidang Hubungan Luar Negeri

720 Bidang Politik

721 Bidang Kepartaian

722 Bidang Organisasi Kemasyarakatan

723 Bidang Organisasi Profesi dan Fungsional

724 Bidang Organisasi Pemuda

725 Bidang Organisasi Buruh, Tani, dan Nelayan

726 Bidang Organisasi Wanita

727 Bidang Pemilihan Umum

728 --

730 Bidang Keamanan/Ketertiban

731 Bidang Pertahanan

- 732 Bidang Kemiliteran
- 733 Bidang Perlindungan Masyarakat
- 734 Bidang Keamanan
- 735 Bidang Kejahatan
- 736 Bidang Bencana
- 737 Bidang Kecelakaan
- 738 Pengawasan Keamanan Aparat/Pejabat
- 739 Pengawasan Lingkungan Hidup

740 Bidang Kesejahteraan Rakyat

- 741 Bidang Pembangunan Desa
- 742 Bidang Pendidikan
- 743 Bidang Kebudayaan
- 744 Bidang Kesehatan/Makanan/Obat
- 745 Bidang Agama (Sara)
- 746 Bidang Sosial
- 747 Bidang Kependudukan (Migrasi/Urbanisasi)
- 748 Bidang Media Massa/Kehumasan
- 749 Bidang Pemberdayaan Perempuan

750 Bidang Perekonomian

- 751 Bidang Perdagangan
- 752 Bidang Pertanian
- 753 Bidang Perindustrian
- 754 Bidang Pertambangan/Kesamudraan
- 755 Bidang Perhubungan
- 756 Bidang Tenaga Kerja
- 757 Bidang Permodalan
- 758 Bidang Perbankan/Moneter
- 759 Bidang Agraria/BPN

760 Bidang Pekerjaan Umum

- 761 Bidang Pengairan
- 762 Bidang Jalan
- 763 Bidang Jembatan
- 762 Bidang Bangunan
- 763 Bidang Tata Kota
- 764 Bidang Lingkungan
- 765 Bidang Ketenagaan

- 766 Bidang Peralatan
- 767 Bidang Air Minum
- 768 --

770 Bidang Pengawasan (Pejabat Publik)

- 771 Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota
- 772 Serah Terima Jabatan Publik
- 773 Laporan Pertanggungjawaban Pusat
- 774 Laporan Pertanggungjawaban Gubernur
- 775 Laporan Pertanggungjawaban Bupati/Walikota
- 776 Penolakan LPJ
- 777 Komisi Pemeriksaan Kekayaan Pejabat Negara
- 778 Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

780 Bidang Kepegawaian

- 781 Bidang Pengadaan Pegawai
- 782 Bidang Mutasi Pegawai
- 783 Bidang Kedudukan Pegawai
- 784 Bidang Kesejahteraan Pegawai
- 785 Bidang Cuti
- 786 Bidang Penilaian dan Disiplin Pegawai
- 787 Bidang Tata Usaha Kepegawaian
- 788 Bidang Pemberhentian Pegawai
- 789 Bidang Pendidikan Pegawai

790 Bidang Keuangan

- 791 Bidang Anggaran
- 792 Bidang Otorisasi
- 793 Bidang Verifikasi
- 794 Bidang Pembukuan
- 795 Bidang Perbendaharaan
- 796 Bidang Pembinaan Kebendaharaan
- 797 Bidang Pendapatan/Penerimaan Pajak
- 798 Bidang Keuangan Pendidikan PNS
- 799 Bidang Bendahara

800 KEPEGAWAIAN**800 Kepegawaian**

- 801 Pemberian Tali Asih
- 802 Arsip Kepegawaian
- 803 Formasi, Pengadaan dan Pendayagunaan
- 804 --
- 805 --
- 807 --
- 808 --
- 809 --

810 Pengadaan

- 811 Lamaran
- 812 Pengujian Kesehatan
- 813 Pengangkatan Calon Pegawai
- 814 Pengangkatan Tenaga Lepas
- 815 Pengangkatan Tenaga Asing
- 816 --
- 817 --
- 818 --
- 819 --

820 Mutasi

- 821 Pengangkatan
- 822 Kenaikan Gaji Berkala
- 823 Kenaikan Pangkat/Pengangkatan
- 824 Pemindahan/Pelimpahan/Perbantuan
- 825 Detasering dan Penempatan Kembali
- 826 Penunjukan Tugas Belajar
- 827 Wajib Militer
- 828 Mutasi Pegawai Instansi Lain

830 Kedudukan

- 831 Perhitungan Masa Kerja
- 832 Penyesuaian Pangkat/Gaji
- 833 Penghargaan Ijazah/Penyesuaian Ijazah
- 834 Jenjang Pangkat/Esselonering
- 835 --

836 --

837 --

840 **Kesejahteraan Pegawai**

841 Tunjangan

842 Dana

843 Perawatan Kesehatan

844 Koperasi/Distribusi

845 Perumahan/Tanah

846 Bantuan Sosial

847 Rekreasi

848 Dispensasi

849 Rekomendasi

850 **Cuti**

851 Cuti Tahunan

852 Cuti Besar

853 Cuti Sakit

854 Cuti Hamil/Melahirkan

855 Cuti Naik Haji/Umroh

856 Cuti di Luar Tanggungan Negara

857 Cuti Alasan Lain, Cuti Alasan Penting

858 --

859 --

860 **Penilaian**

861 Penghargaan

862 Hukuman

863 Konduite, DP3/Penilaian Prestasi Kerja, Disiplin Pegawai

864 Ujian Dinas

865 Penilaian Kehidupan Pegawai Negeri

866 Rehabilitasi/Pengaktifan Kembali

867 Baperjakat

868 --

869 --

870 **Tata Usaha Kepegawaian**

871 Formasi

872 Bezetting

873	Registrasi/Daftar Urut Kepangkatan
874	Daftar Riwayat Pekerjaan
875	Kewenangan Mutasi Kepegawaian
876	Penggajian
877	Sumpah/Janji
878	Korps Pegawai
879	--

880 **Pemberhentian Pegawai**

881	Permintaan Sendiri (Pensiun Dini)
882	Dengan Hak Pensiun
883	Karena Meninggal
884	Alasan Lain
885	Uang Pesangon
886	Uang Tunggu
887	Uang Sementara Waktu
888	Tidak Dengan Hormat
889	--

890 **Pendidikan Pegawai**

891	Perencanaan
892	Pendidikan Reguler/Kader
893	Pendidikan dan Pelatihan Non Reguler
894	Pendidikan ke Luar Negeri
895	Metode
896	Tenaga Pengajar/Widyaiswara/Narasumber
897	Administrasi Pendidikan
898	Fasilitas Pendidikan
899	Sarana

900 **KEUANGAN**

900 **Keuangan**

901	Nota Keuangan
902	APBN
903	APBD
904	Dana Alokasi Umum
905	Dana Alokasi Khusus

906	Dekosentrasi (Pelimpahan Dana dari Pusat ke Daerah)
907	--
908	--
909	--

910 Anggaran

911	Rutin
912	Pembangunan
913	Anggaran Belanja Tambahan
914	Daftar Isian Kegiatan (DIK)
915	Daftar Isian Proyek (DIP)
916	Revisi Anggaran
917	RASK
918	DASK Dokumen
919	Pengelolaan Anggaran

920 Otorisasi/SKO

921	Rutin
922	Pembangunan
923	SIAP
924	SKO

930 Verifikasi

931	SPM Rutin
932	SPM Pembangunan
933	Penerimaan
934	SPJ Rutin
935	SPJ Pembangunan
936	Nota Pemeriksaan
937	SP Pemindahan Pembukuan (SPPP)
938	Verifikasi Anggaran
939	--

940 Pembukuan

941	Penyusunan
942	Permintaan Data Anggaran
943	Permintaan Laporan Fisik Hasil Pembangunan
944	Pembukuan Kas Umum
945	Pengendalian Kas dan Bank

- 946 Ganti Uang (GU)
- 947 Uang Persediaan (UP)
- 948 Tambahan Uang Persediaan (TUP)
- 949 SILPA

950 **Perbendaharaan**

- 951 Tuntutan Ganti Rugi
- 952 Tuntutan Bendaharawan
- 953 Penghapusan Kekayaan Negara
- 954 Pengangkatan/Penggantian Pemimpin Proyek dan Pengangkatan/
Pemberhentian Bendaharawan
- 955 Specimen Tanda Tangan
- 956 Surat Tagihan Piutang, Ikhtisar Bulanan
- 957 --
- 958 --
- 959 --

960 **Pembinaan Kebendaharaan**

- 961 Pemeriksaan Kas dan Hasil Pemeriksaan Kas
- 962 Pemeriksaan Administrasi Bendaharawan
- 963 Laporan Keuangan Bendaharawan
- 964 Teguran Terhadap Bendaharawan
- 965 --
- 966 --
- 967 --

970 **Pendapatan**

- 971 Perimbangan Keuangan
- 972 Subsidi
- 973 Pajak, IPEDA, IHH, IHPH
- 974 Retribusi
- 975 Bea
- 976 Cukai
- 977 Pungutan/PNBP
- 978 Bantuan
- 979 Pendapatan Lainnya
- 980 --

990 Bendaharawan

991	SKPP/SPP
992	Teguran SPJ
993	--
994	--
995	--
996	--
997	--
998	--

POLA KLASIFIKASI

000 UMUM

000 UMUM

001 Lambang

- .1 Garuda
- .2 Bendera Kebangsaan
- .3 Kementerian
- .4 Daerah
- .5 Provinsi
- .6 Kabupaten/Kota
- .7 Lembaga Pemerintah Non Kementerian

002 Tanda Kehormatan/Penghargaan (untuk pegawai lihat 861.1)

- .1 Bintang
- .2 Setya Lencana
- .3 Parasamya Purna Karya Nugraha
- .4 Monumen
- .5 Penghargaan secara adat
- .6 Adipura
- .7 Penghargaan lainnya

003 Hari Raya/Besar

- .1 Nasional 17 Agustus, Hari Pahlawan, dan sebagainya
- .2 Hari Raya Keagamaan
- .3 Hari Ulang Tahun (HUT)
- .4 Hari-Hari Besar Internasional

004 Ucapan

- .1 Ucapan Terima kasih
- .2 Ucapan Selamat
- .3 Ucapan Belasungkawa
- .4 Ucapan-ucapan lainnya
- .5 Spanduk

005 Undangan

006 Tanda Jabatan

- .1 Pamong Praja
- .2 Tanda Pengenal
- .3 Pejabat lainnya

- 007 Tanda gambar Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Pemerintah
- 008 --
- 009 --

010 **URUSAN DALAM**

- 011 Gedung Kantor/Termasuk Instalasi Prasarana Fisik Pamong/Kantor Dinas
 - .1 Prasarana Fisik Pamong Praja
 - .2 Aula, Ruangan Serba Guna
 - .3 Ruang Rapat
- 012 Rumah Dinas
 - .1 Tanah untuk Rumah Dinas
 - .2 Perabot Rumah Dinas
 - .3 Rumah Dinas Golongan 1
 - .4 Rumah Dinas Golongan 2
 - .5 Rumah Dinas Golongan 3
 - .6 Rumah/Bangunan Lainnya
 - .7 Rumah Pejabat Negara
- 013 Mess/Guest House
 - .1 Penginapan
 - .2 Mess, Wisma, Hotel, Rumah Susun/Apartement
 - .3 Akomodasi
- 014 Jasa Air
- 015 Penerangan Listrik/Jasa Listrik
- 016 JasaTelepon/Faximile/Internet
- 017 Keamanan/Ketertiban Kantor
- 018 Kebersihan Kantor
- 019 Protokol
 - .1 Upacara Bendera
 - .2 Tata Tempat
 - .2.1 Pemasangan gambar Presiden/Wakil Presiden
 - .3 Audiensi/Menghadap Pimpinan
 - .4 Alamat-alamat kantor, pejabat
 - .5 Bandir/Umbul-Umbul/Spanduk
 - .6 Penerima Tamu
 - .7 Kerjasama
 - .8 Gelar Senja
 - .8.1 Pementasan kesenian pelaksanaan Gelar Senja

020 **PERALATAN**

- .1 Penawaran, Ekspose
- 021 Alat Tulis
- 022 Mesin Kantor
 - .1 Manual
 - .2 Elektronik
- 023 Perabot Kantor
- 024 Alat Angkutan
 - .1 Orang
 - .2 Barang

- 025 Pakaian Dinas
- 026 Senjata
- 027 Pengadaan
 - .1 Penunjukan Langsung
 - .2 Lelang
- 028 Inventaris
 - .1 Penghapusan
- 029 Pengurusan Kendaraan

030 **KEKAYAAN DAERAH**

- 031 Sumber Daya Alam (Barang-barang tidak bergerak: tanah, kebun, dll)
- 032 Asset Daerah (Barang-barang tidak bergerak: gedung, asrama, dll)
- 033 Barang-barang tidak bergerak (monument)
- 034 Alat-alat besar
- 035 Hewan
- 036 Barang persediaan dalam gudang
- 037 Alat pengangkut (darat, laut, udara)
- 038 Peralatan Kantor/Pabrik
- 039 Peralatan Rumah Sakit

040 **PERPUSTAKAAN/DOKUMENTASI/KEARSIPAN/SANDI**

- 041 Perpustakaan
 - .1 Umum
 - .2 Khusus
 - .3 Perguruan Tinggi
 - .4 Sekolah
 - .5 Keliling
 - .6 Pengadaan Bahan Pustaka
 - .7 Pelayanan
 - .8 Pemeliharaan
 - .9 Kerjasama antar perpustakaan
- 042 Dokumentasi
 - .1 Foto
 - .2 Audio
 - .3 Video
- 043 --
- 044 --
- 045 Kearsipan
 - .1 Pola Klasifikasi
 - .2 Penataan Berkas/Pembenahan
 - .3 Penyusutan Arsip
 - .31 Jadwal Retensi Arsip
 - .32 Pemindahan Arsip
 - .33 Penilaian Arsip
 - .34 Pemusnahan Arsip
 - .35 Penyerahan Arsip
 - .36 Berita Acara Penyusutan Arsip

- .37 Daftar Pencarian Arsip
- .38 Daftar Pertelaahan Arsip
- .4 Surat Pengantar
- .5 Pembinaan Kearsipan
- .51 Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Penyuluhan
- .52 Kajian Kearsipan
- .6 Pemeliharaan/Perawatan Arsip
- .61 Fumigasi
- .62 Kamper
- .63 Enkapsulasi
- .64 Restorasi/Pengawetan/Konservasi
- .7 Ekspedisi
- .8 Salah kirim
- .9 Arsip
- .91 Akuisisi Arsip
- .92 Arsip Media Baru
- .93 Arsip Dinamis - Aktif
- .94 Arsip Dinamis - Inaktif
- .95 Arsip Dinamis - Vital
- .96 Arsip Statis
- .97 Arsip Terjaga
- 046 Sandi (meliputi : Sarana Sandi/Pemeliharaan)
- 047 Website/Data Elektronik
- 048 Pengelolaan Data
- 049 Jaringan Komunikasi Data, Sistem/Aplikasi
- 050 **PERENCANAAN** meliputi : Pola Umum Pembangunan jangka panjang, REPELITA, Perencanaan umum DEPDAGRI, Repelita Daerah, Program Pembangunan Nasional (Propernas), Program Pembangunan Daerah (Properda) DUK, DIK, DUP, DASK, RASK, Laporan Fisik dan Keuangan Proyek Pembangunan, SIAP, TENDER, Pemborong, Laporan Pelaksanaan Kinerja, Musrenbang, Musrenbangpus antar Kementerian, Musrenbangnas.
 - .1 RUPD/Repelita/8 Sukses
 - .11 Pelita Daerah, Tambahan kode wilayah
 - .12 Bantuan Pembangunan Daerah tambah kode lainnya
 - .13 Perencanaan Pembangunan Daerah
 - .14 Rencana Strategik (Renstra)
 - .2 Program Pembangunan Nasional (Propernas)
 - .3 Program Pembangunan Daerah (Properda)
 - .4 Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
- 051 Proyek Bidang Pemerintahan
Klasifikasi di sini : Proyek prasarana fisik pemerintahan (tambahkan perincian 100 pada 051, Contoh: Proyek Kependaraan 051.86)
 - .1 DUP
 - .2 DASK
 - .3 RASK
- 052 Bidang Politik
- 053 Bidang Keamanan/Ketertiban
Tambahkan perincian 300 pada 053
Contoh : Proyek Batas Wilayah Darat 053.311
- 054 Bidang Kesejahteraan Rakyat
Tambahkan perincian 400 pada 054

Contoh : Proyek Resettlement Desa 054.471

- 055 Bidang Perekonomian (tambahkan perincian 500 pada 055)
- 056 Bidang Pekerjaan Umum (tambahkan perincian 600 pada 056)
- 057 Bidang Pengawasan
- 058 Bidang Kepegawaian
- 059 Bidang Keuangan

060 ORGANISASI/KETATALAKSANAAN

- .1 Program Kerja
- .2 Formasi Jabatan dan Persyaratan Jabatan
- .3 Tupoksi dan Uraian Jabatan
- .4 LAKIP
- 061 Organisasi Instansi Pemerintah
 - .1 Susunan dan Tata Kerja
 - .2 Tata Tertib Kantor, Jam Kerja Kantor di Bulan Puasa
 - .3 Absensi Pegawai
- 062 Organisasi Badan Non Pemerintah
- 063 Organisasi Badan Internasional
- 064 Organisasi Semi Pemerintah, BKS-AKSI
- 065 Ketatalaksanaan
 - .1 Tata Naskah Dinas
 - .2 Stempel
 - .21 Stempel Jabatan
 - .22 Stempel Dinas
 - .3 Papan nama Instansi Pemerintahan/Non Pemerintahan
- 066 Tata Hubungan Kerja
 - .1 Telaahan Tata Hubungan
 - .2 Penyusunan
 - .3 Bimbingan
- 067 Pelayanan Umum/Pelayanan Publik/Analisis
 - .1 Standar Pelayanan Minimal
 - .2 Komputerisasi/Siskomdagri
- 068 Evaluasi dan Pelaporan Ketatalaksanaan
 - .1 Pemantauan Pelaksanaan
 - .2 Sistem Prosedur Kerja
 - .3 Evaluasi Pelaksanaan Sistem
 - .4 Rekomendasi Penyempurnaan Ketatalaksanaan
 - .5 Rekomendasi Jabatan
 - .6 Rekomendasi Lainnya
- 069 Analisa Jabatan dan Pengukuran Beban Kerja
 - .1 Analisa Jabatan
 - .2 Hasil Analisa Jabatan
 - .3 Penilaian jabatan struktural dan fungsional

070 PENELITIAN

- 071 Riset
- 072 Survey/Eksplorasi/Studi Kelayakan/Studi Kasus
- 073 Kajian

- 074 Kerjasama Penelitian dengan
 - .1 Perguruan Tinggi Negeri
 - .2 Perguruan Tinggi Swasta atau Instansi Lain
 - .3 LSM
 - .4 Swasta (CV/PT)
- 075 Kementerian Lainnya
- 076 Non Kementerian
- 077 Provinsi
- 078 Kabupaten/Kota
- 079 Kecamatan/Desa

- 080 **KONFERENSI/RAPAT**
- 081 Gubernur
- 082 Bupati/Walikota
- 083 Komponen Eselon Lainnya
- 084 Instansi Lainnya
- 085 Internasional di Dalam Negeri
- 086 Internasional di Luar Negeri
- 087 --
- 088 --
- 089 --

- 090 **PERJALANAN DINAS**
 - .1 Surat Perintah Tugas
- 091 Perjalanan Presiden/Wakil Presiden ke Daerah
- 092 Perjalanan Menteri ke Daerah
- 093 Perjalanan Pejabat Tinggi (termasuk Pejabat Eselon I, kepala daerah) di Dalam Negeri
- 094 Perjalanan Pegawai, termasuk pemanggilan pegawai, di Dalam Negeri
- 095 Perjalanan Tamu Asing ke Daerah.
- 096 Perjalanan Presiden/Wakil Presiden ke Luar Negeri
- 097 Perjalanan Menteri ke Luar Negeri
- 098 Perjalanan Pejabat Tinggi (termasuk Pejabat Eselon I, kepala daerah) ke Luar Negeri
- 099 Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri

100 PEMERINTAHAN

100 PEMERINTAHAN

Meliputi : Tata Praja, Legislatif, Yudikatif, Hubungan Luar Negeri

101 Gerakan Displin Nasional (GDN)

102 --

103 --

104 --

105 --

110 PEMERINTAH PUSAT

111 Presiden

Meliputi : pendaftaran, pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan.

.1 Pertanggungjawaban Presiden kepada MPR

.2 Amanat Presiden/Amanat Kenegaraan/Pidato

112 Wakil Presiden

Meliputi : pendaftaran, pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan.

.1 Pertanggungjawaban Wakil Presiden kepada MPR

.2 Amanat Wakil Presiden/Amanat Kenegaraan/Pidato

113 Susunan Kabinet

.1 Reshuffle

.2 Penunjukan Menteri *ad interim*

.3 Sidang Kabinet, Sidang Dewan Stabilitas Ekonomi lihat 500.1

114 Kementerian Dalam Negeri

.1 Amanat Menteri Dalam negeri/Sambutan

115 Kementerian lainnya

.1 Amanat Menteri lainnya

116 Lembaga Tinggi Negara (DPA, MA, BPK)

117 Lembaga Non Kementerian

118 Otonomi/Desentralisasi/Dekonsentrasi

119 Kerjasama Antar Kementerian

120 PEMERINTAH PROVINSI

.04 Laporan Daerah, tambahkan kode wilayah

.042 Monografi, tambahkan kode wilayah

.1 Koordinasi

.2 Instansi Tingkat Provinsi

.21 Dinas Otonomi

.22 Instansi Vertikal

.23 Kerjasama antar Provinsi/Daerah

121 Gubernur, tambahkan kode wilayah

Meliputi: pendaftaran, pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, serah terima jabatan, pemberhentian, meninggal dan sebagainya.

.1 Sambutan/Pengarahan/Amanat Gubernur

122 Wakil Gubernur, tambahkan kode wilayah

- Meliputi: pendaftaran, pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, serah terima jabatan, pemberhentian, meninggal dan sebagainya.
- 123 Sekretaris Wilayah Provinsi, tambahkan kode wilayah
Meliputi: Pencalonan, pengangkatan, pelantikan, serah terima jabatan, pemberhentian, meninggal dan sebagainya.
- 124 Forum Koordinasi Pemerintah di Daerah
- .1 Pemerintah Provinsi
 - .2 Panitia Anggaran Provinsi
 - .3 Forum Koordinasi lainnya
- 125 Pembentukan/Pemekaran Wilayah
- .1 Pembinaan/Perubahan Nama kepada: Daerah, Kota, Benda Geografis, Gunung, Sungai, Pulau, Selat, Batas Laut, dan sebagainya.
 - .2 Pembentukan Wilayah
 - .3 Pemindahan Ibukota
 - .4 Perubahan Batas Wilayah
 - .5 Pemekaran Wilayah
- 126 Pembagian Wilayah
- 127 Penyerahan Urusan (Otonomi Daerah)
- 128 Swapraja/Penataan Wilayah/Daerah
- 129 Likuidasi Dinas/Badan/Lembaga Provinsi
- 130 **PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**
- .04 Laporan Pemerintah Kabupaten/Kota, tambahkan kode wilayah
 - .1 Koordinasi
 - .2 Instansi Tingkat Kabupaten/Kota
 - .3 Monografi
 - .21 Dinas Otonom
 - .22 Instansi Vertikal
- 131 Bupati/Walikota, tambahkan kode wilayah
Meliputi : pendaftaran, pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, serah terima jabatan, pemberhentian, meninggal, dan sebagainya.
- .1 Berita acara jabatan dan memori Bupati/Walikota
 - .2 Sambutan/Pengarahan/Amanat Bupati/Walikota
- 132 Wakil Bupati/Walikota, tambahkan kode wilayah
Meliputi : pendaftaran, pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, serah terima jabatan, pemberhentian, meninggal dan sebagainya.
- .1 Berita acara jabatan dan memori Wakil Bupati/Walikota
 - .2 Sambutan/Pengarahan/Amanat Wakil Bupati/Walikota
- 133 Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, tambahkan kode wilayah
Meliputi : Pencalonan, pengangkatan, pelantikan, serah terima jabatan, pemberhentian, meninggal, dan sebagainya.
- 134 Forum Koordinasi Pemerintah di Daerah
- .1 Muspida
 - .2 Forum Panitia Anggaran Kabupaten
 - .3 Forum koordinasi lainnya
 - .4 Kerjasama antar Kabupaten/Kota

- 135 Pembentukan/Pemekaran Wilayah
 - .1 Pemindahan Ibukota
 - .2 Pembentukan Wilayah Pembantu Bupati/Walikota
 - .3 Pembagian Wilayah Kabupaten/Kota
 - .4 Perubahan Batas Wilayah
 - .5 Pemekaran Wilayah
 - .6 Permasalahan Batas Wilayah
 - .7 Pembentukan Ibukota Kabupaten/Kota
 - .8 Pemberian dan Penggantian Nama Kabupaten/Kota, Daerah, Jalan.
- 136 Pembagian Wilayah
- 137 Penyerahan Urusan (Otonomi Daerah)
- 138 Pemerintah Wilayah Kecamatan
 - .1 Sambutan/Pengarahan/Amanat Camat
 - .2 Pembentukan Kecamatan
 - .3 Pemekaran Kecamatan
 - .4 Perluasan/Perubahan Batas Wilayah Kecamatan
 - .5 Pembentukan Perwakilan Kecamatan/Kemantren
 - .6 Pemindahan Ibukota Kecamatan
 - .7 Laporan Kecamatan
- 139 Likuidasi Dinas/Badan/Lembaga Kabupaten/Kota
- 140 **PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN**
- 141 Pamong Desa, Kelurahan
 - .1 Kepala Desa, Kelurahan
Meliputi : pendaftaran, pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, pemberhentian sementara, pelantikan, serah terima jabatan, meninggal dan sebagainya.
 - .11 Biaya Pemilihan Kepala Desa
 - .2 Badan Perwakilan Desa
Meliputi : Pembentukan, keanggotaan, kepengurusan, dan kegiatan BPD.
 - .3 Perangkat Desa. kelurahan
 - .31 Sekretaris Desa
Meliputi : Pencalonan, penyeleksian, pengangkatan, pemberhentian, pemberhentian sementara.
 - .32 Kepala Dusun
Meliputi : Pencalonan, penyeleksian, pengangkatan, pemberhentian sementara.
 - .33 Kepala Urusan
- 142 APPKD (Anggaran Pendapatan Pengeluaran Keuangan Desa)
 - .1 Rutin (termasuk penghasilan Pamong Desa)
 - .2 Pembangunan
 - .3 Anggaran Belanja Tambahan
 - .4 Pendapatan Desa
 - .41 Urusan Desa
 - .42 Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat
 - .43 Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Provinsi
 - .44 Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota
 - .45 Penerimaan yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah yang diserahkan kepada Desa
 - .46 Penerimaan dan pemilik-pemilik tanah yang berdomisili di luar desa
 - .47 Pendapatan asli Desa

- .48 Penerimaan lain-lain yang sah berdasarkan Peraturan
- .49 Perundang-undangan yang berlaku
- .49 Hasil dari gotong royong masyarakat
- 143 Kekayaan Desa
 - .1 Tanah hak pakai Desa
 - .11 Tanah bengkok
 - .12 Tanah titisara
 - .13 Tanah penganggonan
 - .14 Tanah desa lainnya
 - .2 Jalan Desa
 - .3 Bangunan Desa
 - .4 Kekayaan Desa lainnya
- 144 Lembaga-Lembaga Desa (Dewan Tingkat Desa, Dewan Marga, Rembug Desa, BUUD, BPD/Badan Permusyawaratan Desa)
- 145 Administrasi Desa
- 146 Kewilayahan
 - .1 Pembentukan Desa/Kelurahan
 - .2 Pemekaran Desa/Kelurahan
 - .3 Perubahan Batas Wilayah/Perluasan Desa/Kelurahan
 - .4 Perubahan Nama Desa/Kelurahan
 - .5 Kerjasama Antar Desa/Kelurahan
 - .6 Penyatuan Desa/Kelurahan
 - .7 Penghapusan Desa/Kelurahan
 - .8 Permasalahan Batas Desa/Kelurahan
- 147 Pembangunan Desa
 - .1 Masyarakat Desa/Kelurahan
 - .11 Penyuluhan
- 148 Perangkat Kelurahan/Desa
 - .1 Kepala Kelurahan/Desa, meliputi : pengangkatan, pemberhentian, dan pemberhentian sementara
 - .2 Sekretaris Kelurahan/Desa, meliputi : pengangkatan, pemberhentian, dan pemberhentian sementara
 - .3 Staf Kelurahan/Desa, meliputi : pengangkatan, pemberhentian, dan pemberhentian sementara
- 149 Dewan Kelurahan/Desa
 - .1 Rukun Tetangga
 - .2 Rukun Warga
 - .3 Rukun Kampung
- 150 **Legislatif MPR/DPR/DPD**
- 151 Keanggotaan MPR
 - .1 Pencalonan
 - .2 Pemberhentian
 - .3 Recall
 - .4 Pelanggaran
 - .5 Pengangkatan
 - .6 Pergantian Antar Waktu
 - .7 Meninggal
- 152 Persidangan MPR

- 153 Kesejahteraan
 - .1 Keuangan
 - .2 Penghargaan
- 154 Hak/Suara/Pendapat MPR
- 155 Keanggotaan DPR
 - .1 Pencalonan
 - .2 Pengangkatan
 - .3 Pemberhentian
 - .4 Recall
 - .5 Pelanggaran
 - .6 Pergantian Antar Waktu
 - .7 Meninggal
- 156 Persidangan DPR
 - .1 Sidang Pleno
 - .2 Dengar Pendapat
 - .3 Rapat Komisi
 - .4 Rapat Fraksi
 - .5 Reses
- 157 Kesejahteraan
 - .1 Keuangan
 - .2 Penghargaan
- 158 Jawaban Pemerintah
- 159 Hak/Suara/Pendapat DPR
 - .1 Angket
 - .2 Bertanya
 - .3 Budget
 - .4 Interpelasi
- 160 **DPRD PROVINSI** (tambahkan kode wilayah)
- 161 Keanggotaan
 - .1 Pencalonan
 - .2 Pengangkatan
 - .3 Pemberhentian
 - .4 Recall
 - .5 Pelanggaran
 - .6 Pelanggaran
 - .7 Pergantian Antar Waktu
- 162 Persidangan
 - .1 Reses
 - .2 Sidang Pleno
 - .3 Dengar Pendapat
 - .4 Rapat-Rapat meliputi :Rapat Panitia Musyawarah, Komisi, Fraksi,
Panitia Khusus, Panitia Anggaran, dan
sebagainya
 - .5 Tata Tertib
 - .6 Fraksi
 - .7 Peninjauan Studi Banding
- 163 Kesejahteraan
 - .1 Keuangan
 - .2 Penghargaan

- 164 Hak/Suara/Pendapat
- 165 Sekretaris DPRD Provinsi
- 166 --
- 167 --
- 168 --

- 170 **DPRD KABUPATEN/KOTA** (tambahkan kode wilayah)
- 171 Keanggotaan
 - .1 Pencalonan
 - .2 Pengangkatan
 - .3 Pemberhentian
 - .4 Recall
 - .5 Pelanggaran
 - .6 Pergantian Antar Waktu
 - .7 Meninggal
- 172 Persidangan
 - .1 Reses
 - .2 Sidang Pleno
 - .3 Dengar Pendapat
 - .4 Rapat-rapat meliputi: Rapat Panitia Musyawarah, Komisi, Fraksi, Panitia Khusus, Panitia Anggaran, dan sebagainya.
 - .5 Tata Tertib
 - .6 Peninjauan Studi Banding
- 173 Kesejahteraan
 - .1 Keuangan
 - .2 Penghargaan
- 174 Hak/Suara/Pendapat
- 175 Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota
- 176 --
- 177 --
- 178 --

- 180 **HUKUM**
 - .1 Konstitusi
 - .11 Dasar Hukum
 - .12 Undang-Undang Dasar
 - .2 GBHN
 - .3 Amnesti, Abolisi dan Grasi
- 181 Perdata
 - .1 Tanah
 - .2 Rumah
 - .3 Utang/Piutang
 - .31 Gadai
 - .32 Hipotik
 - .4 Notariat
- 182 Pidana
 - .1 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

- 183 Peradilan (Peradilan Agama Islam 451.6, Peradilan Perkara Tanah 593.71)
 - .1 Jenis-jenis Peradilan
 - .11 Peradilan Umum
 - .111 Peradilan Negeri Tingkat Pertama
 - .112 Pengadilan Tinggi
 - .113 Mahkamah Agung
 - .12 Peradilan Militer
 - .121 Mahkamah Militer Tingkat Pertama
 - .122 Mahkamah Tinggi Militer
 - .123 Mahkamah Agung Militer
 - .13 Peradilan Tata Usaha Negara
 - .131 Peradilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama
 - .132 Peradilan Tata Usaha Negara Tinggi
 - .133 Peradilan Tata Usaha Negara Agung
 - .14 Peradilan Koneksitas
 - .2 Upaya-upaya Hukum
 - .21 Banding
 - .22 Kasasi
 - .23 Derden Verzet
 - .24 Peninjauan Kembali
 - .25 Perjanjian Damai di Luar Pengadilan
 - .3 Eksekusi
 - .4 Pembinaan Hukum
 - .41 Pembinaan Kesadaran Hukum (KADARKUM)
 - .5 Bantuan Hukum
 - .51 Lembaga Bantuan Hukum
 - .52 Pelayanan dan perlindungan hukum
 - .53 Sengketa Hukum
 - .54 Registrasi Perkara
- 184 Hukum Internasional
- 185 Imigrasi
 - .1 Visa
 - .2 Paspor
 - .3 Exit
 - .4 Reentry
 - .5 Lintas Batas/Batas Antar Negara
 - .6 Suaka Politik
- 186 Kopenjaraan
- 187 Kejaksaan
- 188 Peraturan Perundang-undangan
 - .1 TAP MPR
 - .2 Undang-Undang
 - .3 Peraturan
 - .31 Peraturan Pemerintah
 - .32 Peraturan Menteri
 - .33 Peraturan Lembaga Non Kementarian
 - .34 Peraturan Daerah
 - .341 Peraturan Daerah Provinsi
 - .342 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
 - .343 Tata Perundangan
 - .344 Peraturan Perundangan Lainnya
 - .4 Keputusan
 - .41 Presiden

- .42 Menteri
- .43 Lembaga Non Kementrian
- .44 Gubernur
- .45 Bupati/Walikota
- .5 Instruksi
- .51 Presiden
- .52 Menteri
- .53 Lembaga Non Kementrian
- .54 Gubernur
- .55 Bupati/Walikota

- 189 Hukum Adat
 - .1 Tokoh Adat/Masyarakat

190 HUBUNGAN LUAR NEGERI

- 191 Perwakilan Asing
- 192 Tamu Negara
- 193 Kerjasama dengan Negara Asing
 - .1 Regional (ASEAN)
 - .2 Bantuan Luar Negeri/Hibah
 - .3 Bilateral
 - .4 Multilateral
 - .5 Internasional
- 194 Perwakilan RI di Luar Negeri
 - .1 Kedutaan
 - .2 Konsultan
 - .3 Kuasa Usaha
 - .4 Atase
- 195 PBB
 - .1 UNESCO
 - .2 UNICEF
 - .3 FAO
 - .4 UNHCR
 - .5 WHO
 - .6 Organisasi lainnya
- 196 Laporan Luar Negeri
- 197 Hutang Luar Negeri PHLN/LOAN
- 198 MoU
- 199 --

200 POLITIK

200 **POLITIK**

201 Kebijakan Umum

202 Orde Baru

203 Reformasi

204 Orde Lama

205 Perencanaan dan Program Pembinaan Politik Luar Negeri

.1 Pembinaan Idiologi Pancasila

.2 Kesatuan Bangsa, Organisasi Kekuatan Sosial Politik

.3 Organisasi Masyarakat

.4 Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri Termasuk
Laporannya

.5 Keadaan Politik Luar Negeri

.6 Pemberitahuan Keadaan Bahaya dan Jam Malam, meliputi:
pemberitahuan, ketentuan pelaksanaan dan pengawasan.

.7 Hasil Evaluasi dan Tata Cara mengenai Ipoleksosbud, Kantibmas

.8 PARPOL

.81 Pendirian/pembentukan PARPOL

.82 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PARPOL

.83 Program Kerja, Data Kegiatan PARPOL

.84 Pembinaan PARPOL

.85 Hasil Munas/Musda PARPOL

.86 Struktur/Kepengurusan, Pengkaderan dan Keanggotaan
PARPOL.

.87 Data Inventaris dan Keuangan PARPOL

.9 Partai/Organisasi Terlarang

.91 Keputusan Pembubaran Partai/Organisasi Terlarang

.92 Daftar dan Data Pengurus/Anggota Partai Organisasi Terlarang

.93 Izin Meninggalkan Tempat atau Domisili bagi Anggota
Partai/Organisasi Terlarang

.94 Daftar Berkala mengenai Keadaan Anggota/Partai Terlarang

206 --

210 **KEPARTAIAN**(meliputi pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian,
pembubaran)

211 Partai Peserta Pemilu

212 Partai Bukan Peserta Pemilu

213 Keanggotaan Partai (Kartu Tanda Pengenal)

214 Program Partai

.1 AD/ART Partai

.2 Bantuan Keuangan Partai

.3 Rapat Koordinasi Konsolidasi Partai

215 Lambang Partai

216 Pengurus Partai

.1 Pimpinan Pusat

.2 Pimpinan Wilayah

.3 Pimpinan Cabang

.4 Pimpinan Anak Cabang

- .5 Pimpinan Ranting
- 217 Pertemuan Partai
 - .1 Muktamar
 - .2 Munas
 - .3 Kongres
- 218 Kaderisasi Partai
- 219 --
- 220 **ORGANISASI KEMASYARAKATAN**
 - .1 Laporan Umum mengenai Keadaan Anggota Partai/Organisasi Terlarang.
 - .2 Pembentukan Organisasi
 - .3 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
 - .4 Kepengurusan dan Daftar Anggota Organisasi.
 - .5 Program Kerja Organisasi
 - .6 Munas/Musda Tk. I dan Tk. II
 - .7 Pembinaan Organisasi
 - .71 Kegiatan Organisasi
 - .72 Daftar Inventarisasi Kekayaan Organisasi
 - .73 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
 - .74 Laporan Kegiatan Organisasi
- 221 Berdasarkan Perjuangan
 - .1 Perintis Kemerdekaan
 - .2 Angkatan '45
 - .3 Veteran
 - .4 Angkatan '66
- 222 Berdasarkan Kekaryaan
 - .1 PEPABRI
 - .2 Wredatama
 - .3 Pensiunan PNS
- 223 Berdasarkan Kerohanian
 - .1 Nahdatul Ulama
 - .2 Muhammadiyah
 - .3 Persis (Persatuan Serikat Islam Indonesia)
 - .4 dan lain-lainnya
- 224 Berdasarkan Lembaga Adat/Kedaerahan
- 225 Lembaga Swadaya Masyarakat
- 226 --
- 230 **ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL**
 - 231 Organisasi Kesehatan
 - .1 Ikatan Dokter Indonesia
 - .2 Ikatan Bidan Indonesia
 - .3 Ikatan Perawat Indonesia
 - 232 Organisasi Guru
 - .1 Persatuan Guru Republik Indonesia

- 233 Organisasi Sarjana
 - .1 Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia
 - .2 Persatuan Insinyur Indonesia
 - .3 Persatuan Sarjana Hukum Indonesia
 - .4 Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia
 - .5 dan Lain-lainnya
- 234 Organisasi Advokat/Pengacara Indonesia
- 235 Lembaga Bantuan Hukum
- 236 Korps Pegawai Republik Indonesia
- 237 Organisasi Wartawan
 - .1 Persatuan Wartawan Indonesia
 - .2 Asosiasi Jurnalis Indonesia
- 238 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)
- 239 Organisasi Profesi dan Fungsional Lainnya
 - .1 Organisasi Arsiparis
 - .2 Organisasi Pustakawan
- 240 **ORGANISASI PEMUDA**
- 241 Komite Nasional Pemuda Indonesia
- 242 Organisasi Mahasiswa
- 243 Organisasi Pelajar
- 244 Gerakan Pemuda Ansor
- 245 Gerakan Pemuda Islam Indonesia
- 246 Gerakan Pemuda Marhaenis
- 247 --
- 248 --
- 250 **ORGANISASI BURUH, TANI, NELAYAN DAN ANGKUTAN**
- 251 Organisasi Pekerja
 - .1 Federasi Buruh Seluruh Indonesia
 - .2 Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
- 252 Organisasi Buruh Internasional
- 253 Himpunan Kerukunan Tani Indonesia
- 254 Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia
- 255 Keluarga Sopir Profesional Indonesia
- 256 Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA)
- 257 --
- 258 --
- 260 **ORGANISASI WANITA**
- 261 Dharma Wanita
- 262 Persatuan Wanita Republik Indonesia

- 263 Pemberdayaan Perempuan (Wanita)
- 264 Konggres Wanita
- 265 Persit Kartika Chandra
- 266 Bhayangkari
- 267 Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia
- 268 BKOW (Badan Koordinasi Organisasi Wanita)
- 269 LSM Wanita

- 270 **PEMILIHAN UMUM**
- 271 Pencalonan
- 272 Nomor Urut Partai/Tanda Gambar
- 273 Kampanye/Alat Peraga Kampanye
- 274 Petugas Pemilu
 - .1 Pendaftaran Pemilu
 - .2 Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu
- 275 Pemilih/Daftar Pemilih
- 276 Sarana/Prasarana Pemungutan Suara
 - .1 Tempat Pemungutan Suara (TPS)
 - .2 Kendaraan/Transportasi
 - .3 Surat Suara
 - .4 Kotak Suara
 - .5 Dana/Anggaran Pemilu
 - .6 Bilik Suara
 - .7 Tinta
- 277 Pemungutan Suara/Penghitungan Suara
- 278 Hasil Pemilu (Perhitungan Suara, Sidang Paripurna, Pelantikan, Sumpah/Janji)
- 279 Penetapan Perolehan Jumlah Kursi dan Calon Terpilih

- 280 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**
Meliputi: Pelantikan/Pengucapan Sumpah Janji MPR, DPR, DPD
- 281 Panitia Pemilihan Indonesia
- 282 Panitia Pemilihan Provinsi
- 283 Panitia Pemilihan Kabupaten
- 284 Panitia Pemilihan Kecamatan
- 285 Panitia Pemungutan Suara
- 286 Sosialisasi PEMILU
- 287 Pelanggaran Pemilu
- 288 Pemantauan Pemilu
- 289 Sengketa Pemilu

300 KEAMANAN/KETERTIBAN

- 300 Keamanan dan Ketertiban Umum**
 - .1 Kebijakan Pemerintah mengenai Situasi dan Kondisi Keamanan
 - .2 Pembinaan dan Pengaturan mengenai Larangan
 - .3 Pencegahan dan Penanggulangan Gangguan/Ancaman Keamanan/ Ketertiban Umum
 - .4 Program Kerja serta Tata Cara Penanggulangan Keamanan
 - .5 Laporan dari Instansi yang Berwenang
 - .6 Laporan adanya Kejadian Teroris
 - .7 Pengamanan Sidang (tamu Negara)
 - .8 Pengawasan Pejabat
- 301 Keamanan
- 302 Ketertiban
- 303 Koordinasi dan kerjasama keamanan dan ketertiban umum (Trantibum)
- 304 Pengawasan Trantibum
- 305 Pengawasan Pelaksanaan Perda
- 306 Pembinaan/penyuluhan Pelanggaran Perda
- 307 Patroli Wilayah

- 310 PERTAHANAN**
 - 311 Darat
 - 312 Laut
 - 313 Udara
 - 314 Perbatasan
 - 315 --
 - 316 --
 - 317 --

- 320 KEMILITERAN**
 - 321 Latihan Militer dan Bela Negara
 - 322 Wajib Militer
 - 323 Operasi Militer
 - .1 TNI Masuk Desa
 - .2 AMD
 - 324 Kekaryaan TNI, Pejabat Sipil dari TNI
 - 325 Tentara Nasional Indonesia
 - .1 Angkatan Darat
 - .2 Angkatan Laut
 - .3 Angkatan Udara
 - .4 Polisi
 - 326 Fasilitas Militer meliputi : Barak, Persenjataan, Markas
 - 327 --
 - 328 --

330 KEAMANAN**331 Kepolisian**

- .1 Polisi Pamong Praja
- .2 Keamanan Rakyat
- .3 Keamanan Lingkungan
- .4 Jaga Wana
- .5 Satuan Pengaman

332 Huru-Hara/Demonstrasi**333 Senjata Api/Tajam****334 Bahan Peledak****335 Perjudian****336 Surat-Surat Kaleng****337 Pengaduan****338 Himbauan/Pengarahan/Sosialisasi/Larangan**

Meliputi : Minuman keras/narkotika/zat adiktif lainnya yang memiliki izin dan dipergunakan untuk campuran bahan penelitian serta kesehatan

339 Teroris**340 PERTAHANAN SIPIL**

- .1 Kebijakan pemerintah mengenai pembentukan Mawil dan Matrik Hansip
 - .11 Pengangkatan/pemberhentian anggota Hansip
 - .12 Pengerahan dan pengendalian Hansip
 - .13 Kegiatan pelaksanaan Matrik Hansip dan Menwa
 - .14 Pembinaan anggota Hansip/Linmas
 - .15 Penghargaan anggota Hansip
 - .16 Hansip/Linmas lanjut usia
 - .17 Data Matrik Hansip dan Menwa
 - .18 Pendidikan/Latihan Hansip dan Menwa
 - .19 Latihan Ketrampilan PAM Swakarsa
- .2 Orientasi kesadaran bela negara bagi tokoh masyarakat
- .3 Pemberian tali asih bagi anggota

341 Perlindungan Sipil/Masyarakat (LINMAS)

- .1 Data Inventaris Peralatan Hansip
- .2 Kesejahteraan

342 SATPAM**350 KEJAHATAN****351 Makar/Pemberontakan/Subversif/Organisasi Terlarang****352 Pembunuhan, Penemuan Mayat, Bunuh Diri****353 Pencurian/Penyelundupan/Penganiayaan/Perampasan****354 Narkotika, Obat-obatan dan Zat Adiktif lainnya**

- .1 Kepemilikan
- .2 Mengedarkan/Mendistribusikan
- .3 Menggunakan

355 Pemalsuan

- .1 Uang

- .2 Ijazah
- .3 Kejahatan Pemalsuan Lainnya
- 356 Korupsi/Penyelewengan/Penyalahgunaan Jabatan/KKN
- 357 Kejahatan/Kekerasan Terhadap Perempuan
 - .1 Kekerasan Fisik
 - .2 Perkosaan/Perbuatan Cabul
 - .3 KTD (Kehamilan Tidak Diharapkan)
 - .4 KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
 - .5 Penelantaran
 - .6 Pelecehan Seksual
 - .7 Pencabulan
 - .8 Perdagangan Wanita
 - .9 Risalah Korban
- 358 Kenakalan/Kenakalan Remaja
- 359 Kejahatan lainnya
- 360 **BENCANA**
 - .1 Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik, penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.
- 361 Gunung Berapi
- 362 Gempa
- 363 Angin Topan/Lissus/Badai/Putting Beliung, dll.
- 364 Tanah Longsor
- 365 Kekeringan
- 366 Banjir
- 367 Kebakaran
 - .1 Pemadam Kebakaran
 - .2 Mobil Pemadam
- 368 Tsunami
- 369 --
- 370 **KECELAKAAN/SAR**
 - .1 Kecelakaan Lainnya
- 371 Darat/Lalu Lintas Jalan Raya
- 372 Udara
- 373 Laut
- 374 Sungai/Danau/Telaga/Waduk
- 375 Search And Rescue (Regu Penyelamat)
 - .1 Kapal Patroli
 - .2 Mobil Patroli
- 376 Pelatihan
 - .1 Latihan SAR
 - .2 Latihan ketrampilan penyelamatan di air dan menyelam

- .3 Pelatihan manajemen bagi pejabat
 - .4 Pelatihan kemampuan Pusdalop bagi aparat PBP
 - .5 Latihan Ketrampilan pemadam kebakaran
- 377 Satkorlak dan Satlak PBP
- 378 Kecelakaan Pendakian Gunung
- 379 Kecelakaan Listrik
- 380 --
- 390 --

400 KESEJAHTERAAN RAKYAT

- 401 Keluarga Miskin
- 402 PNPM Mandiri Pedesaan
- 403 Kompensasi BBM/Bantuan Langsung Tunai (BLT)
- 404 Penyaluran Beras Miskin (Raskin)

410 PEMBANGUNAN DESA

- 411 Pembinaan Usaha Gotong Royong
 - .1 Swadaya Gotong-Royong
 - .11 Penataan Gotong-Royong
 - .12 Gotong-Royong Dinamis
 - .13 Gotong-Royong Statis
 - .14 Pungutan
 - .2 Lembaga Sosial Desa (LSD)
 - .21 Pembinaan
 - .22 Klasifikasi
 - .23 Proyek
 - .24 Musyawarah
 - .3 Latihan Kerja Masyarakat
 - .31 Kader Masyarakat
 - .32 Kuliah Kerja Nyata (KKN)
 - .33 Pusat Latihan
 - .34 Kursus-kursus
 - .35 Kurikulum/Silabus
 - .36 Keterampilan
 - .37 Pramuka
 - .4 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
 - .41 Program
 - .42 Pembinaan Organisasi
 - .43 Kegiatan
 - .5 Penyuluhan
 - .51 Publikasi
 - .52 Peragaan
 - .53 Sosio Drama
 - .54 Siaran Pedesaan
 - .55 Penyuluhan Lapangan
 - .6 Kelembagaan Desa
 - .61 Kelompok Tani
 - .62 Rukun Tani
 - .63 Subak
 - .64 Dharma Tirta
 - .7 Karang Taruna
- 412 Perekonomian Desa
 - .1 Produksi Desa
 - .11 Pengolahan
 - .12 Pemasaran
 - .2 Keuangan Desa
 - .21 Perkreditan Desa
 - .22 Inventarisasi Data
 - .23 Perkembangan/Pelaksanaan
 - .24 Bantuan/Stimulans
 - .25 Petunjuk/Pembinaan Pelaksanaan
 - .3 Koperasi Desa

- .31 Badan Usaha Unit Desa (BUUD)
- .32 Koperasi Unit/Usaha Desa (KUD)
- .4 Penataan Bantuan Pembangunan Desa
 - .41 Jumlah Desa yang diberi bantuan
 - .42 Pengarahan
 - .43 Pusat
 - .44 Daerah
- .5 Alokasi Bantuan Pembangunan Desa
 - .51 Pusat
 - .52 Daerah
- .6 Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa
 - .61 Bantuan Langsung
 - .62 Bantuan Keserasian
 - .63 Bantuan Juara Lomba Desa
- 413 Prasarana Desa
 - .1 Prasarana Desa
 - .11 Pembinaan
 - .12 Bimbingan Teknis
 - .2 Pemukiman Kembali Penduduk
 - .21 Lokasi
 - .22 Diskusi
 - .23 Pelaksanaan
 - .3 Masyarakat Desa
 - .31 Pembinaan
 - .32 Penyuluhan
 - .4 Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa
 - .41 Rumah Sehat
 - .42 Proyek Perintis
 - .43 Pelaksanaan
 - .44 Pengembangan
 - .45 Perbaikan Kampung
- 414 Pengembangan Desa
 - .1 Tingkat Perkembangan Desa
 - .11 Jumlah Desa
 - .12 Pemekaran Desa
 - .13 Pembentukan Desa Baru
 - .14 Evaluasi
 - .15 Bagian
 - .2 Unit Desa Kerja Pembangunan (UDKP)
 - .21 Penyuluhan Program
 - .22 Lokasi UDKP
 - .23 Pelaksanaan
 - .24 Bimbingan/Pembinaan
 - .25 Evaluasi
 - .3 Tata Desa
 - .31 Inventarisasi
 - .32 Penyusunan Pola Tata Desa
 - .33 Aplikasi Tata Desa
 - .34 Pemetaan
 - .35 Pedoman Pelaksanaan
 - .36 Evaluasi
 - .4 Perlombaan Desa
 - .41 Pedoman
 - .42 Penilaian
 - .43 Kejuaraan
 - .44 Piagam

- 415 Koordinasi
 - .1 Sektor Khusus
 - .2 Rapat Koordinasi Horizontal (RKH)
 - .3 Tim Koordinasi Pusat (TKP)
 - .4 Kerjasama
 - .41 Luar Negeri (UNICEF)
 - .42 Perguruan Tinggi
 - .43 Kementerian/Lembaga Non Kementerian
- 416 Penerapan dan Pendayagunaan Teknologi Desa
- 417 --
- 418 --
- 420 **PENDIDIKAN**
 - .1 Pendidikan Khusus. Klasifikasikan di sini : Pendidikan Putra Putri Irian Jaya
- 421 Sekolah
 - .1 Pra Sekolah/Taman Bermain/Taman Kanak-kanak
 - .2 Sekolah Dasar
 - .3 Sekolah Menengah
 - .4 Akademi/Sekolah Tinggi
 - .5 Sekolah Kejuruan
 - .6 Kegiatan Sekolah, Dies Natalis, Lustrum
 - .7 Kegiatan Pelajar/Mahasiswa
 - .71 Reuni, Darmawisata, Lomba, Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)
 - .72 Pelajar teladan
 - .73 Resimen Mahasiswa
 - .8 Sekolah Pendidikan Luar Biasa
 - .9 Pendidikan Luar Sekolah/Pemberantasan Buta Huruf
- 422 Administrasi Sekolah
 - .1 Persyaratan Masuk Sekolah, Testing, Ujian, Pendaftaran, OSPEK Mapras, Perpeloncoan
 - .2 Tahun Pelajaran
 - .3 Hari Libur
 - .4 Uang Sekolah - Klasifikasi di sini SPP
 - .5 Bea Siswa
 - .6 Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA)
 - .7 Ijazah
 - .8 Biaya Operasional Sekolah (BOS)
- 423 Metode Belajar
 - .1 Kuliah
 - .2 Ceramah, Simposium, Seminar
 - .3 Diskusi
 - .4 Kuliah Lapangan, Widyawisata, KKN, Anjangsana, Studi Banding, Studi Tur
 - .5 Kurikulum
 - .6 Karya Tulis/Skripsi/Tesis/Desertasi
 - .7 Ujian
 - .71 Ujian Komprehensif
- 424 Tenaga Pengajar, Guru, Dosen, Dekan, Rektor
 - Klasifikasi di sini : Guru Teladan

- 425 Sarana Pendidikan
 - .1 Gedung
 - .11 Gedung Sekolah
 - .12 Kampus
 - .13 Pusat kegiatan mahasiswa
 - .14 Perpustakaan
 - .15 Laboratorium
 - .2 Buku
 - .3 Perlengkapan Sekolah
 - .4 Sistem informasi pendidikan
- 426 Keolahragaan
 - .1 Cabang Olah Raga
 - .2 Sarana/Prasarana
 - .21 Gedung olahraga
 - .22 Stadion
 - .23 Lapangan
 - .24 Kolam renang
 - .25 Peralatan olahraga
 - .3 Pesta Olah Raga
 - Klasifikasi di sini: PON, Porsade, Olimpiade, Porseni dan sebagainya
 - .4 Organisasi Olahraga (KONI)
- 427 Kepemudaan
 - Meliputi Organisasi dan Kegiatan Remaja
 - Klasifikasi di sini : Gelanggang Remaja/Gelanggang Generasi Muda
- 428 Kepramukaan
- 429 Pendidikan Kedinasan
 - Untuk Kementerian Dalam Negeri lihat 890
- 430 **KEBUDAYAAN**
- 431 Kesenian
 - .1 Cabang Kesenian
 - .2 Sarana
 - .21 Gedung Kesenian
 - .22 Padepokan
 - .3 Organisasi Kesenian
- 432 Kepurbakalaan
 - .1 Museum
 - .11 Pelayanan Museum
 - .12 Pengawasan Museum
 - .13 Promosi Museum
 - .14 Perizinan Permuseuman
 - .2 Peninggalan Kuno
 - .21 Candi termasuk pemugaran
 - .22 Benda kuno, Monumen
- 433 Sejarah
- 434 Bahasa
- 435 Usaha Pertunjukan, Hiburan, Kesenangan, Festival, Pentas Seni
- 436 Kepercayaan
- 437 --

438 --

439 --

440 KESEHATAN**441 Pembinaan Kesehatan**

- .1 Gigi
- .2 Mata
- .3 Jiwa
- .4 Kanker
- .5 Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
- .6 Perawatan
- .7 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM)
- .8 Pekan Imunisasi Nasional (PIN)
- .9 Kesehatan Ibu dan Anak

442 Obat-obatan

- .1 Pengadaan
- .2 Penyimpanan
- .3 Obat Generik
- .4 Pemalsuan
- .5 Obat terlarang

443 Penyakit

- .1 Penyakit Menular
- .2 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Langsung (P2ML)
 - .21 Kusta
 - .22 Kelamin
 - .23 Frambosia
 - .24 TBC/AIDS/HIV
- .3 Epidemiologi dan Karantina (Epidka)
 - .31 Kolera
 - .32 Imunisasi
 - .33 Surveillance
 - .34 Rabies (Anjing Gila), Antraks
 - .35 Leptosirosis
 - .36 Chikungunya
- .4 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Sumber Binatang (P2B)
 - .41 Malaria
 - .42 Dengue Hemorrhagic Fever (DHF)/Demam Berdarah
 - .43 Filaria
 - .44 Serangga
 - .45 Flu Burung
 - .46 Flu Babi
- .5 Hygiene Sanitasi
 - .51 Tempat-tempat Pembuatan dan Penjualan Makanan dan Minuman (TPPMM)
 - .52 Sarana Air Minum dan Jamban Keluarga (Samijaga)
 - .53 Pestisida
 - .54 Pencemaran Udara
 - .55 Kesehatan Institusi
 - .56 Pencemaran Air
- .6 Pemberantasan penyakit tidak menular
 - .61 Hipertensi
 - .62 Stroke
 - .63 Diabetes Militus (DM)

- .7 DEKOPENSATIOKORDIS
- .71 PPOM
- .72 Asma
- .73 Kecelakaan Lalu Lintas
- .74 Psikosis

444 Gizi

- .1 Kekurangan Makanan, Bahaya Kelaparan, Busung Lapar
- .2 Keracunan Makanan
- .3 Menu Makanan Rakyat
- .4 Badan Perbaikan Gizi Daerah (BPGD)
- .5 Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)
- .6 Gondok Endemik (Gaky)

445 Rumah Sakit

- .1 RSUP
- .2 Rumah Sakit Jiwa
- .3 Rumah Sakit Mata
- .4 Puskesmas/Puskesmas Keliling
- .5 Balai Kesehatan (Poliklinik)
- .6 Balai Kesehatan Ibu dan Anak
- .7 Rumah Bersalin
- .8 Posyandu
- .9 Rumah Sakit/Balai Kesehatan Lainnya
- .10 Laboratorium Kesehatan

446 Tenaga Medis

- .1 Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
- .2 Diklat Tenaga Kesehatan Medis
- .3 Diklat Tenaga Kesehatan Para Medis
- .4 Pendidikan Kesehatan

447 Alat Medis

- .1 Pengadaan alat Kesehatan
- .2 Penyimpanan Alat Kesehatan
- .3 Standarisasi Alat Kesehatan
- .4 Penghapusan Alat Kesehatan

448 Pengobatan Tradisional

- .1 Pijat
- .2 Tusuk Jarum/Akupunktur
- .3 Jamu Tradisional
- .4 Dukun/Paranormal
- .5 Rukiyah

449 Apotek

- .1 Surat Izin Praktek (SIP)
- .2 Surat Izin Kerja (SIK)

450 AGAMA

451 Islam

- .1 Peribadatan
- .11 Sholat
- .12 Zakat, Fitrah
- .13 Puasa
- .14 MTQ
- .15 Haji
- .16 Umroh

- .2 Rumah Ibadat
- .3 Tokoh Agama
- .4 Pendidikan
 - .41 Tinggi
 - .42 Menengah
 - .43 Dasar
 - .44 Pondok Pesantren
 - .45 Gedung Sekolah
 - .46 Tenaga Pengajar
 - .47 Buku
 - .48 Dakwah
 - .49 Organisasi/Lembaga Pendidikan
- .5 Harta Agama, Wakaf, Baitulmal dan sebagainya
- .6 Peradilan
- .7 Organisasi Keagamaan Bukan Politik Majelis Ulama
- .8 Mazhab

- 452 Protestan
 - .1 Peribadatan
 - .2 Rumah Ibadat
 - .3 Tokoh Agama, Rohaniawan, Pendeta, Domine
 - .4 Mazhab
 - .5 Organisasi Gerejani

- 453 Katholik
 - .1 Peribadatan
 - .2 Rumah Ibadat
 - .3 Tokoh Agama, Rohaniawan, Pastor
 - .4 Mazhab
 - .5 Organisasi Gerejani

- 454 Hindu
 - .1 Peribadatan
 - .2 Rumah Ibadat
 - .3 Tokoh Agama, Rohaniawan
 - .4 Mazhab
 - .5 Organisasi Agama Hindu

- 455 Budha
 - .1 Peribadatan
 - .2 Rumah Ibadat
 - .3 Tokoh Agama, Rohaniawan
 - .4 Mazhab
 - .5 Organisasi Agama Budha

- 456 Urusan Haji
 - .1 Ongkos Naik Haji (ONH)
 - .2 Manasik
 - .3 Badan Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH)

- 457 --
- 458 --
- 459 --

- 460 **SOSIAL**
- 461 Rehabilitasi Penderita Cacat

- .1 Cacat Mata
 - .2 Cacat Tubuh
 - .3 Cacat Mental
 - .4 Bisu/Tuli
- 462 Tuna Sosial
- .1 Gelandangan/Tuna Wisma
 - .2 Pengemis
 - .3 Tuna Susila
 - .4 Anak Nakal
- 463 Kesejahteraan Anak/Keluarga
- .1 Anak Putus Sekolah
 - .2 Ibu Teladan
 - .3 Anak Asuh
 - .4 Orang Tua Asuh
- 464 Pembinaan Pahlawan
- .1 Pahlawan
Meliputi penghargaan kepada pahlawan, tunjangan kepada pahlawan dan jandanya
 - .2 Perintis Kemerdekaan
Meliputi pembinaan, penghargaan, dan tunjangan kepada perintis kemerdekaan dan jandanya
 - .3 Cacat Veteran
- 465 Kesejahteraan Sosial
- .1 Lanjut Usia
 - .2 Korban Kekacauan, Pengungsi, Rehabilitasi, Repatriasi
- 466 Sumbangan Sosial
- .1 Korban Bencana
 - .2 Pencarian Dana untuk Sumbangan
Meliputi : Penyelenggaraan undian, ketangkasan, bazaar, dan sebagainya
 - .3 Panti Asuhan
 - .4 Panti Jompo
 - .5 Yayasan Sosial Lainnya
- 467 Bimbingan Sosial
- .1 Masyarakat Suku Terasing
Meliputi: Bimbingan, Pendidikan, Kesehatan, Pemukiman, Operasi Busana, dan sebagainya
 - .2 Pemberdayaan Masyarakat
- 468 PMI
- 469 Makam
- .1 Umum
 - .2 Pahlawan
 - .3 Khusus Keluarga, Raja
 - .4 Krematorium
- 470 **KEPENDUDUKAN**
- 471 Pendaftaran Penduduk
- .1 Identitas Penduduk
 - .11 Biodata
 - .12 Nomor Induk Kependudukan (NIK)

- .13 Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- .14 Kartu Keluarga
- .15 Advokasi Identitas Penduduk
- .2 Perpindahan Penduduk Dalam Wilayah Indonesia
- .21 Perpindahan Penduduk WNI
- .22 Perpindahan Penduduk WNA Dalam Wilayah Indonesia
- .23 Perpindahan Penduduk WNA dan WNI Tinggal Sementara
- .24 Daerah Terbelakang
- .25 Bedol Desa
- .3 Perpindahan Penduduk Antar Negara
- .31 Penduduk Indonesia ke Luar Negeri
- .32 Orang Asing Tinggal Sementara
- .33 Orang Asing Tinggal Tetap
- .34 Perpindahan Penduduk Antar Negara di Wilayah Perbatasan Antar Negara (Pelintas Batas Tradisional)
- .35 Asimilasi
- .4 Pendaftaran Pengungsi dan Penduduk Rentan
- .41 Akibat Bencana Alam
- .42 Akibat Kerusakan Sosial
- .43 Pendaftaran Penduduk Daerah Terbelakang
- .44 Pendaftaran Penduduk Rentan
- .5 Kewarganegaraan
- .51 WNI Asli
- .52 WNI Keturunan/WNA
- .53 Permohonan Kewarganegaraan
- .54 Permohonan Ganti Nama
- .55 Tidak berkewarganegaraan/Stateless
- .6 Sensus Penduduk/Cacah Jiwa
- 472 Pencatatan Sipil
 - .1 Kelahiran, Kematian dan Advokasi
 - .11 Kelahiran
 - .12 Kematian
 - .13 Advokasi Kelahiran dan Kematian
 - .2 Perkawinan, Perceraian dan Advokasi
 - .21 Perkawinan Agama Islam
 - .22 Perkawinan Agama Non Islam
 - .23 Perceraian Agama Islam
 - .24 Perceraian Agama Non Islam
 - .25 Advokasi Perkawinan dan Perceraian
 - .3 Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak Serta Perubahan dan Pembatalan Akta dan Advokasi
 - .31 Pengangkatan Anak/Adopsi
 - .32 Pengakuan Anak
 - .33 Pengesahan Anak
 - .34 Perubahan Akta
 - .35 Pembatalan Akta
 - .36 Advokasi Pengurusan Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pembatalan Anak
 - .4 Pencatatan Kewarganegaraan
 - .41 Akibat Perkawinan
 - .42 Akibat Kelahiran
 - .43 Non Perkawinan
 - .44 Non Kelahiran
 - .45 Perubahan WNI dan WNA
- 473 Informasi Kependudukan
 - .1 Teknologi Informasi
 - .11 Perangkat Keras

- .12 Perangkat Lunak
- .13 Jaringan Komunikasi data
- .2 Kelembagaan dan Sumber Daya Informasi
- .21 Daerah Maju
- .22 Daerah Berkembang
- .23 Daerah Terbelakang
- .3 Pengolahan Data Kependudukan
- .31 Pendaftaran Penduduk
- .32 Kejadian Vital Penduduk
- .33 Penduduk Non Registrasi
- .4 Pelayanan Informasi Kependudukan
- .41 Media Elektronik
- .42 Media Cetak
- .43 Outlet
- 474 Perkembangan Penduduk
 - .1 Pengarahan Kuantitas Penduduk
 - .11 Struktur Jumlah
 - .12 Komposisi
 - .13 Fertilitas
 - .14 Kesehatan Reproduksi
 - .15 Morbiditas Penduduk
 - .16 Mortalitas Penduduk
 - .2 Pengembangan Kuantitas Penduduk
 - .21 Anak dan Remaja
 - .22 Penduduk Usia Produktif
 - .23 Penduduk Usia Lanjut
 - .24 Gender
 - .3 Penataan Persebaran Penduduk
 - .31 Migrasi antar Wilayah
 - .32 Migrasi Internasional
 - .33 Urbanisasi
 - .34 Sementara
 - .35 Migrasi Non Permanen
 - .4 Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk
 - .41 Pengembangan Sistem Perlindungan Penduduk
 - .42 Pelayanan Pengembangan Ekonomi
 - .43 Pelayanan Kelembagaan Sosial Budaya
 - .44 Partisipasi Masyarakat
 - .5 Pengembangan Wawasan Kependudukan
 - .51 Pendidikan Jalur Sekolah
 - .52 Pendidikan Jalur Luar Sekolah
 - .53 Pendidikan Jalur Masyarakat
 - .54 Pembangunan Berwawasan Kependudukan
 - .6 Transmigrasi
 - .61 Penyiapan Informasi Daerah Transmigrasi
 - .62 Informasi Potensi Peluang Bekerja dan Berusaha di Daerah Transmigrasi
 - .63 Kerjasama di Bidang Transmigrasi
 - .64 Kepulangan Transmigran karena Daerah Terjadi Konflik
 - .65 Pemukiman Transmigrasi
 - .66 Penggunaan Tanah Pemukiman Transmigrasi.
 - .67 Penyelesaian Masalah Tanah di Lokasi Pemukiman Transmigrasi
 - .68 Tata Ruang Pemukiman Transmigrasi
 - .69 Sarana Pemukiman Transmigrasi
 - .7 Pengarahan, Pemindahan dan Penempatan Transmigran
 - .71 Pemberangkatan Transmigran
 - .72 Penempatan Transmigran

- .73 Penampungan Transmigran (transito) dan Pelatihan Transmigran
- .74 Pembinaan Masyarakat Transmigran
- .75 Penilaian Transmigran Teladan
- 475 **Proyeksi dan Penyerasian Kebijakan Kependudukan**
 - .1 Indikator Kependudukan
 - .11 Perumusan Penetapan dan Pengembangan Indikator Kependudukan
 - .12 Pemanfaatan Indikator Kependudukan
 - .13 Sosialisasi Indikator Kependudukan
 - .2 Proyeksi Kependudukan
 - .21 Penyusunan dan Pengembangan Proyeksi Kependudukan
 - .22 Pemanfaatan Proyeksi Kependudukan
 - .3 Analisis Dampak Kependudukan
 - .31 Penyusunan dan Pengembangan Analisis Dampak Kependudukan
 - .32 Pemanfaatan Analisis Dampak Kependudukan
 - .4 Penyerasian Kebijakan Lembaga Non Pemerintah
 - .41 Lembaga Internasional
 - .42 Lembaga Masyarakat dan Nirlaba
 - .43 Lembaga Usaha Swasta
 - .5 Penyerasian Kebijakan Lembaga Pemerintah
 - .51 Lembaga Pemerintah
 - .52 Pemerintah Provinsi dan Kota
 - .53 Pemerintah Kabupaten
 - .6 Analisis
- 476 **Monitoring**
- 477 **Evaluasi**
- 478 **Dokumentasi**
- 479 **Keluarga Berencana**
 - .1 Alat kontrasepsi
 - .2 KB Lestari
 - .3 KB Mandiri
 - .4 Penyuluhan Lapangan KB (PLKB)
 - .5 Pos KB Desa
 - .6 Akseptor KB
- 480 **MEDIA MASSA**
 - 481.1 **Penerbitan**
 - .11 Surat Kabar
 - .12 Majalah/Buletin
 - .13 Buku
 - .14 Penerjemahan
 - .15 Layanan Informasi/Laeflet
 - .16 Klarifikasi Berita
 - .17 Pers Reliase
 - .18 Masukan Analisis Gubernur
 - .19 Jurnal Mingguan Ringkasan Berita
 - .110 Jurnal Mingguan Pendapat Umum
 - .2 **Liputan Media Massa**
 - .21 Liputan Rutin
 - .22 Liputan Khusus
 - .221 Arus Lebaran
 - .222 Pemberangkatan dan Kepulangan Haji

- .3 Pencabutan Surat Izin
- .31 Surat Kabar
- .32 Majalah
- .33 Buletin
- .4 Laporan dan Hasil Pemberitaan
- .41 Surat Kabar
- .42 Majalah
- .43 Buletin
- .44 Kegiatan Bidang

- 482 Radio
 - .1 RRI
 - .11 Siaran pedesaan, jangan diklasifikasikan di sini, lihat 411.54
 - .2 Non RRI
 - .3 Luar Negeri
 - .4 ORARI
 - .5 RAPI

- 483 Televisi
 - .1 TVRI
 - .2 TV Swasta

- 484 Film

- 485 Pers
 - .1 Kewartawanan
 - .2 Wawancara/Audiensi Wartawan
 - .3 Informasi Nasional
 - .4 Pembentukan Organisasi Profesi
 - .5 Terjadinya Kasus Penghinaan, Pemukulan, Penganiyaan terhadap Wartawan
 - .6 Penyalahgunaan Profesi
 - .7 Musyawarah Wartawan Indonesia
 - .8 Temu Pers/Konferensi Pers
 - .9 Pers Tour
 - .10 Bantuan Kepada/Dari Organisasi Profesi Wartawan
 - .11 Kebijakan Pimpinan/Pendidikan Jurnalistik

- 486 Grafika/Reklame
 - .1 Ketentuan Pemasangan
 - .2 Penerbitan

- 487 Penerangan
 - .1 Pameran Non Komersial
 - .2 Publikasi
 - .3 Pendirian Information Center

- 488 Operating Room

- 489 Hubungan Masyarakat

- 490 Pengaduan Masyarakat

- 491 Internet
 - .1 Internet Protocol Address (IP Address)
 - .2 Situs/WebSite/Homepage/Surat Elektronik (E-mail)
 - .3 Pembangunan Jaringan Interkoneksi

- 492 Peningkatan Kapasitas Bidang Infokom

- .1 Training Fotografi
 - .2 Training Berita Jurnalistik
 - .3 Rakorda Infokom
 - .4 Rakor Pengendalian Kegiatan
 - .5 Pelayanan Informasi Melalui Media Tradisional
 - .51 Karawitan
 - .52 Wayang Kulit
 - .53 Lawakan
 - .54 Wayang Orang
 - .6 Bimtek Infokom
 - .7 Dialog Interaktif
 - .71 Televisi (TVRI) Nasional, Swasta
 - .72 Radio
- 493 Hubungan Antar Lembaga
- .1 Organisasi Kemasyarakatan
 - .11 Wahana Komunikasi Masyarakat
 - .12 Bimtek Pengurus LKM
 - .13 Bahan Informasi Cetak LKM
 - .14 Fasilitas Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Media
 - .15 Pelatihan Motivasi Kapa Narkoba
 - .16 Pembenahan LSM/Upaya PPBN
 - .17 Bahan Informasi, Sosialisasi PPBN
 - .2 Lembaga Pemerintah
 - .21 Pertemuan Bakohumas
 - .22 Pertemuan Kehumasan
 - .23 Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)
 - .3 Luar Negeri
 - .31 Promosi Luar Negeri
 - .32 Kunjungan Wartawan Asing
- 494 Sistem Naskah Sosialisasi Kegiatan Gubernur
- .1 Himpunan Naskah Sambutan
 - .2 Himpunan Dialog Interaktif
 - .3 Himpunan Naskah Rubrik
 - .4 Pembuatan Kolom Khusus Hasil-hasil Pembangunan
 - .5 Klasifikasi Naskah Sambutan
 - .6 Himpunan Naskah Keynote Speaker

500 PEREKONOMIAN

500 PEREKONOMIAN

.1 Dewan Stabilisasi

501 Pengadaan Pangan

502 Pengadaan Sandang

503 Perizinan Pada Umumnya. Untuk perizinan suatu bidang, klasifikasikan pada masalahnya.

504 --

505 --

506 --

510 PERDAGANGAN

Klasifikasikan di sini : Tata Niaga

.1 Promosi Perdagangan

.11 Pekan Raya

.12 Iklan

.13 Pameran (Pameran non komersial lihat 487.1)

.14 Event-Event

.15 Lomba-lomba (desain, busana, kerajinan)

.2 Pelelangan, Distribusi

.21 Pemasaran Sembako

.22 Pemasaran Hasil Industri

.23 Penentuan Harga Pokok

.3 Tera/Uji Timbang

.31 Tera Ulang Ukuran

.32 Takaran

.33 Timbangan

.34 Kalibrasi

.35 Cap Tanda Tera

.36 Biaya Tera

.4 Bina Usaha dan Sarana Perdagangan

.41 Rencana dan Program Kerja

.42 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi

.43 Pelaksanaan Teknis

.44 Pemantauan

.45 Evaluasi dan Pelaporan

.5 Perizinan

.51 Penerbitan SIUP

.52 Perpanjangan

.53 Izin Prinsip

.54 Rekomendasi

.6 Bantuan Peralatan

.61 Proposal

.62 Surat Perjanjian/Kontrak

.63 Serah Terima

.7 Perizinan/Rekomendasi Tanda Pabrik

.8 Kemetrolagian

.81 Standart Tingkat Tiga

.82 Standar Kerja Satuan Ukuran

.83 Ukuran Metrologi

.84 Laboratorium Metrologi

.85 Tanki Ukur Mobil

- .86 Meter Taxi
- .87 KWH Meter
- .88 SPBU
- 511 Pemasaran
 - .1 Sembilan Bahan Pokok. Tambahkan kode wilayah, beras, garam, minyak tanah, minyak goreng, sabun, dan sebagainya.
 - .2 Pasar
 - .21 Pusat Perbelanjaan
 - .22 Operasi Pasar
 - .3 Pertokoan, Kaki Lima, Kios
- 512 Ekspor
 - .1 Ekspor Hasil Industri
 - .11 Kebijakan
 - .12 Pemasaran
 - .2 Izin Ekspor
 - .3 Pengembangan Pasar Luar Negeri
 - .4 Manajemen Perdagangan Internasional
 - .5 Pemberitahuan Ekspor Barang
 - .6 Pengawasan Mutu Barang
 - .7 Eksportir Terdaftar
 - .8 Evaluasi dan Pelaporan
- 513 Impor
 - .1 Izin Import
 - .11 Pemberian Izin
 - .12 Pengendalian Izin
 - .2 Standar Mata Uang Import
 - .3 Manajemen Perdagangan Internasional
 - .4 Kegiatan Import
 - .41 Pembinaan Import
 - .42 Pengendalian Import
 - .43 Pemantauan Import
 - .5 Faktor-Faktor Pendukung
 - .6 Pengawasan Mutu Barang Import
 - .7 Penyaluran Kegiatan Import
 - .71 Bahan Konsumsi
 - .72 Bahan Baku
 - .73 Bahan Penolong
 - .8 Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Import
- 514 Perdagangan Antar Pulau
 - .1 Kerjasama Bahan Baku
 - .2 Industri Pemasaran
 - .3 Kontrak
- 515 Perdagangan Luar Negeri
 - .1 Pengembangan Potensi Luar Negeri
 - .11 Promosi dan Informasi
 - .12 Pameran
 - .13 Kerjasama
- 516 Pergudangan
 - Termasuk tangki penyimpanan minyak goreng.
 - .1 Peti Kemas
 - .2 Tangki Penyimpanan
- 517 Aneka Usaha Perdagangan

- 518 Koperasi
(Untuk BUUD, KUD, lihat 412.3)
- .1 Bina Usaha Koperasi
 - .11 Koperasi Pertanian dan Perkebunan
 - .111 Koperasi Perkebunan
 - .12 Koperasi Perikanan dan Peternakan
 - .121 Koperasi Perikanan
 - .122 Koperasi Peternakan
 - .13 Permodalan Koperasi
 - .131 Pemupukan Modal
 - .132 Pemanfaatan Modal
 - .133 Perbankan dan Asuransi
 - .134 Permodalan Luar Koperasi
 - .135 Kredit Program Umum
 - .136 Kredit Program Khusus
 - .14 Distribusi dan Jasa Koperasi
 - .141 Distribusi Bahan Pokok
 - .142 Distribusi Aneka Bahan
 - .143 Distribusi Kerjasama Niaga
 - .144 Jasa Angkutan
 - .145 Jasa Perumahan
 - .146 Aneka Jasa
 - .15 Koperasi Kelistrikan, Industri dan Telekomunikasi
 - .151 Koperasi Kelistrikan
 - .152 Koperasi Industri
 - .153 Koperasi Telekomunikasi
 - .2 Bina Lembaga Koperasi
 - .21 Organisasi Koperasi
 - .211 Anggaran Dasar dan Akte Pendirian Koperasi
 - .212 Pemberian Badan Hukum Koperasi
 - .213 Penyelesaian/Pembubaran Koperasi
 - .214 Perangkat Koperasi
 - .215 Pengakuan Koperasi Sekolah
 - .216 Tertib Organisasi Koperasi
 - .217 Penyelesaian Perselisihan/Persengketaan
 - .218 Bimbingan Kesadaran Hukum
 - .22 Bina Hubungan Alat Kelengkapan Organisasi Koperasi
 - .221 Rapat Anggota Koperasi
 - .222 Pengurus dan Badan Pemeriksa
 - .223 Hubungan dengan Dewan Koperasi Indonesia
 - .224 BPP KUD
 - .3 Usaha Kecil Menengah (UKM)
 - .31 Pembinaan Usaha
 - .311 Pembinaan Usaha Kecil
 - .312 Pembinaan Usaha Menengah
 - .32 Kredit Usaha
 - .321 Kredit Usaha Kecil
 - .322 Kredit Usaha Menengah
 - .33 Pengawasan Usaha
 - .331 Pengawasan Usaha Kecil
 - .332 Pengawasan Usaha Menengah
 - .4 Bina Tata Urusan Koperasi
 - .41 Klasifikasi KUD
 - .42 Klasifikasi Koperasi Perkotaan
 - .43 Klasifikasi KUD Mandiri
 - .5 Administrasi Ketatalaksanaan Koperasi
 - .51 Administrasi KUD
 - .52 Administrasi Koperasi Perkotaan
 - .53 Karyawan/Manager Koperasi

- .54 Sumber Daya Manusia
- .55 TKST
- .56 Penyaluran Alat Sekolah
- .57 Bantuan Pemda kepada Koperasi/KUD
- .6 Akuntansi
- .61 Akuntansi KUD
- .62 Akuntansi Koperasi Perkotaan
- .63 akuntansi Koperasi Sekunder

520 PERTANIAN

521 Tanaman Pangan

- .1 Program
 - .11 Bimas/Inmas
 - .12 Kredit Usaha Tani (KUT)
 - .13 Penyuluhan
 - .14 Pelaporan dan Evaluasi Pertanian
- .2 Produksi
 - .21 Padi
 - .211 Sawah
 - .212 Gogo
 - .213 Hama
 - .22 Palawija
 - .221 Kacang
 - .222 Jagung
 - .223 Ketela Pohon
 - .224 Ubi-ubian
 - .225 Kedelai
 - .23 Hortikultura
 - .231 Sayuran
 - .232 Buah-Buahan
 - .233 Tanaman Hias
 - .234 Perlebahan
 - .24 Panen Gagal (puso)
 - .25 Pembudidayaan Rumput Laut
- .3 Sarana Usaha Pertanian
 - .31 Peralatan, Meliputi traktor dan sebagainya
 - .32 Pembibitan
 - .33 Pupuk
 - .34 Irigasi Pertanian
 - .35 Rehabilitasi Lahan Pertanian
- .4 Perlindungan Tanaman
 - .41 Penyakit
 - .411 Penyakit Daun
 - .412 Penyakit Batang
 - .42 Hama
 - .421 Hama Serangga, diklasifikasikan di sini: Wereng, Walang Sangit, Tungro
 - .422 Hama Tikus dan sejenisnya
 - .423 Pemberantasan hama
 - Meliputi : Penyemprotan, Penyiangan, Geropyokan, Sprayer, Pemberantasan Melalui Udara
 - .43 Pestisida
- .5 Tanah Pertanian Pangan
 - .51 Pesawahan
 - .52 Perladangan
 - .53 Kebun
 - .54 Rumpun Ikan Laut

.55	Lahan Kritis/KTA
.6	Pengusaha, Petani
.7	Bina Usaha
.71	Pasca Panen
.72	Pemasaran Hasil
.73	Promosi
522	Kehutanan
.1	Program
.11	Hak Pengusahaan Hutan
.111	Data Areal HPH
.112	Areal Hutan
.113	SKHPH
.114	Kerja Sama
.115	Pembatalan/Penolakan
.116	Perpanjangan HPH
.117	Pembinaan HPH (pelanggaran dan sanksi)
.12	Tata Guna Hutan
.121	Tata Kawasan
.122	Pengurusan Kawasan Hutan
.123	Penafsiran Hutan
.124	Mutasi Hutan
.13	Tata Hutan
.131	Tata Hutan Sementara
.132	Tata Hutan Tetap
.133	Pembukaan Hutan
.14	Perpetaan Hutan
.141	Ukur dan Pemetaan
.142	Pengukuran
.143	Perpetaan
.15	Pembangunan Hutan Tanaman Industri
.151	Hutan Tanaman Industri Pulp
.152	HTI Pertukangan
.2	Produksi dan Industri
.21	Kayu
.22	Non Kayu
.23	Target Produksi
.24	Industri Kayu HPH
.25	Industri Kayu Non HPH
.26	Industri Non Kayu
.3	Sarana Usaha Kehutanan
.31	Standarisasi Kayu dan Non Kayu
.32	Pengujian Hasil Hutan
.33	Pemasaran Hasil Hutan
.34	Angkutan Hasil Hutan
.35	Tata Usaha Hasil Hutan
.36	Iuran Hutan
.37	Pembinaan dan Peningkatan Daya Hutan
.4	Reboisasi
.41	Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan
.411	Pembenihan
.412	Pegakan Benih
.413	Pengadaan Benih
.414	Pengujian dan Penyimpanan Benih
.415	Lalu Lintas Angkutan Benih
.416	Pembibitan
.417	Pengadaan dan Penedaran Bibit Bersertifikat
.418	Pengadaan dan pencedaran Bibit Tidak Bersertifikat
.42	Tanaman Reboisasi

.421	Lahan Kritis
.422	Reboisasi Lahan HPH
.423	Rehabilitasi Tanah Hutan
.424	Konservasi Tanah dan Air
.425	Pengendalian Perladangan
.43	Penghijauan
.44	Aneka Usaha Kehutanan
.5	Kelestarian Kawasan Konservasi
.51	Cagar Alam, Marga Satwa, Suaka Marga Satwa
.52	Berburu. Meliputi larangan dan izin berburu
.53	Kebun Binatang
.54	Konservasi Lahan
.55	Taman Wisata (Termasuk Laut)
.56	Taman Nasional
.57	Taman Hutan Raya
.58	Hutan Lindung
.59	Hutan Produksi
.6	Perhutanan Sosial
.61	Sutera Alam
.62	Minyak Kayu Putih
.7	Pengkajian Lingkungan
.71	Amdal UKL, UPL di dalam Kawasan Hutan
.72	Amdal UKL, UPL di luar Kawasan Hutan
.73	Bina Cinta Alam
.74	Kelompok Pencinta Alam
.75	Kader Konservasi Sumber Daya Alam
.76	Penyuluhan Konservasi Sumber Daya Alam
.77	LSM Lingkungan
.8	Pengamanan Hutan
.81	Jaga Wana
.82	PPNS
.83	Gangguan Keamanan Hutan
.84	Bencana Alam
.85	Kebakaran Hutan
.86	Sengketa Hutan
.87	Penyakit/Hama
.88	Pestisida dan Pupuk Tanaman Hutan
.89	Alat dan Mesin Kehutanan
523	Perikanan dan Kelautan
.1	Program
.11	Penyuluhan
.12	Teknologi
.13	Konservasi dan Suaka Laut
.2	Budidaya/Produksi Perikanan
.21	Pelelangan
.22	Standarisasi Mutu Hasil Perikanan
.3	Usaha Perikanan
.31	Pengembangan meliputi : Pembibitan, Pemijahan Ikan, Pembenihan Ikan, Budi Daya Ikan
.32	Daerah Penangkapan/Areal Perikanan (Fishing Ground)
.33	Pertambakan/Pembudidayaan Ikan (meliputi: Tambak Ikan Air Deras, Tambak Udang, dll.)
.34	Keramba/Jaring Apung
.35	Ikan Hias
.36	Udang
.37	Rumput laut
.38	Minapadi

- .4 Sarana
 - .41 Peralatan
 - .42 Kapal
 - .43 Pelabuhan
 - .44 Perahu Tanpa Motor/Kapal Motor/Motor Tempel
 - .45 Jaring
 - .46 Cold Storage
 - .47 Tempat Es (Cool Room)
 - .5 Pengusaha
 - .6 Pengendalian Hama dan Penyakit termasuk Pemberantasannya
 - .7 Data perikanan
 - .8 Nelayan
 - .81 Perkampungan Nelayan
 - .82 Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan
 - .9 Pelestarian Ikan
- 524 Peternakan
- .1 Produksi
 - .11 Susu Ternak Rakyat
 - .12 Telur
 - .13 Daging
 - .14 Kulit
 - .2 Sarana Usaha Peternakan
 - .21 Pembibitan
 - .22 Kandang Ternak
 - .23 Obat Hewan
 - .24 Alsinak
 - .25 Pakan
 - .3 Kesehatan Hewan
 - .31 Penyakit Hewan
 - .32 Pos Kesehatan Hewan
 - .33 Tesi Pullorum, Pemeriksaan Spesimen
 - .34 Karantina
 - .35 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Hewan
 - .4 Perunggasan
 - .41 Ayam Ras
 - .42 Ayam Buras
 - .43 Itik
 - .44 Burung
 - .5 Pengembangan Ternak
 - .51 Inseminasi Buatan
 - .52 Pembibitan/Bibit Unggul
 - .53 Penyebaran Ternak
 - .54 Kawasan Peternakan
 - .55 Makanan Ternak
 - .6 Organisasi Peternakan
 - .61 Asosiasi Peternakan
 - .62 Kelompok Tani Ternak
 - .7 Pengawasan dan Standarisasi
 - .71 Tempat Pemotongan Hewan
 - .72 Laboratorium
 - .73 Standarisasi Bibit Ternak
 - .8 Data Peternakan
 - .81 Informasi Peternakan
 - .9 Pelayanan Usaha dan Pemasaran
 - .91 Promosi Produksi Peternakan
 - .92 Pemasaran Peternakan
 - .93 Izin Usaha Peternakan

- 525 Perkebunan
 - .1 Program
 - .2 Produksi
 - .21 Karet
 - .22 Teh
 - .23 Tembakau
 - .24 Tebu
 - .25 Cengkeh
 - .26 Kelapa Hibrida/Kelapa Sawit, Kopra
 - .27 Kopi
 - .28 Coklat/Kakao
 - .29 Aneka tanaman
 - .3 Pembibitan
 - .4 Perlindungan Tanaman
 - .41 Hama/Penyakit/Gulma
 - .42 Pesticida
 - .43 Pupuk
 - .44 Badra
 - .5 Alat dan Mesin Perkebunan
 - .6 Pengolahan Lahan
 - .61 Terasering
- 526 Ketahanan Pangan
 - .1 Program Bimbingan Masal
 - .2 Pengembangan Sarana Sumber Daya
 - .21 Pembinaan Teknologi
 - .22 Sarana Produksi dan Permodalan
 - .23 Kelembagaan
 - .3 Agribisnis
 - .31 Mutu Hasil
 - .32 Pengelolaan Hasil Pangan
 - .33 Pemasaran Hasil
 - .34 Kemitraan
 - .4 Distribusi Pangan
 - .41 Sistem dan Pola Distribusi
 - .42 Sarana dan Prasarana Distribusi
 - .43 Pengadaan dan Cadangan Pangan
 - .5 Kewaspadaan dan Keanekaragaman Pangan
 - .51 Rawan Pangan, Keamanan dan Mutu Pangan
 - .52 Pola Konsumsi Pangan Masyarakat
 - .53 Sistem Informasi Pangan
- 527 --
- 528 --
- 529 --
- 530 **PERINDUSTRIAN**
 - .08 Undang-Undang Gangguan
- 531 Industri Logam
- 532 Industri Mesin/Elektronika
- 533 Industri Kimia/Farmasi
- 534 Industri Tekstil
- 535 Industri Makanan/Minuman
- 536 Aneka Industri/Perusahaan

- .1 Home Industri
- 537 Aneka Kerajinan
 - .1 Kerajinan Rakyat
- 538 Usaha Negara/BUMN
 - .1 Perjan
 - .2 Perum
 - .3 Persero/PT, CV
- 539 Perusahaan Daerah/BUMD/BULD

- 540 **PERTAMBANGAN/KESAMUDERAAN**
- 541 Bahan Galian (Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan, Pemurnian, Penjernihan, Pengangkutan, Penjualan, Konservasi, Penyalurannya)
 - .1 Pengusahaan
 - .11 Kontrak Kerja
 - .2 Bahan Galian Strategis (bahan galian golongan a)
 - .21 Minyak bumi, bitumen cair, lilin, bensin, pertalite, pertamax, bensol/aviation gas (avgas), aftur, dan gas alam
 - .22 Bitumen Padat, Aspal
 - .23 Antrasit
 - .24 Uranium, Radium, Thorium, dan Bahan-Bahan Galian Radio Aktif Lainnya
 - .25 Nikel, Kobalt
 - .3 Bahan Galian Vital (bahan galian golongan b)
 - .31 Mangan Molibden, Vanadium, Khrom, Titanium
 - .32 Seng
 - .33 Platina, Air Raksa
 - .34 Arsin, Artimon, Bismut
 - .35 Rhutenium, Cerium, dan Logam-Logam Langka lainnya
 - .36 Berlium, Korundum, Zircon, Kristal Kwarsa
 - .37 Kriolot, Flowispor, Barit
 - .38 Yodium, Brom, Klor, Belerang
 - .4 Bahan Galian yang tidak termasuk golongan a dan b (bahan galian golongan c)
 - .41 Nitrat-Nitrat, Fosfat-Fosfat, Garam Batu
 - .42 Asbes, Talk, Mika, Grafit, Magnesit
 - .43 Yarosit, Karosit, Tawas, Oker
 - .44 Batu Permata, Batu Setengah Permata
 - .45 Pasir Kwarsa, Kaolin, Felospor, Gips, Bentanit
 - .46 Batu Apung, Tras, Obsidian, Perlit, Tanah Diatom, Tanah Serap
 - .47 Marmer, Batu Tulis
 - .48 Batu Kapur, Dolomit, Kalsit
 - .49 Granit, Andesit, Basal, Tarakhit, Tanah Liat, dan Pasir
- 542 Gas Bumi, BBM
 - .1 Eksploitasi/Pengeboran
 - .2 Pengolahan, meliputi: Tangki, Pompa, Tanker
 - .3 Penyaluran
- 543 Aneka Tambang
 - .1 Timah
 - .2 Aluminium, Boxit
 - .3 Besi, termasuk Besi Tua
 - .4 Tembaga

- .5 Batu Bara
- 544 Logam Mulia, Emas, Intan, Perak
- 545 Logam
- 546 Geologi
 - .1 Vulkanologi
 - .11 Pengawas Gunung Berapi
 - .12 Panas Bumi
 - .2 Pemetaan
 - .21 Pemetaan Geologi
 - .22 Pemetaan Rupa Bumi
 - .23 Pemetaan Permukaan Air
 - .3 Sumber Daya Mineral
 - .4 Hidrogeologi
 - .5 Gerakan Tanah (Longsoran, Amblesan)
 - .6 Kerentanan Tanah
 - .7 Pengawasan Pengendalian
- 547 Hidrologi
 - .1 Air Permukaan
 - .2 Air Bawah Tanah
 - .21 Perizinan
 - .211 Sumur Artetis
 - .212 Sumur Bor
 - .213 Sumur Gali/Pasak
 - .214 Mata Air
 - .215 Pengusaha, Pengebor (APPATINDO)
 - .22 Sumur Pantau
 - .23 Pemasangan/Penyegelan Water Meter
 - .24 Produksi/Nilai Perolehan Air (NPA)
 - .25 Pengawasan, Pengendalian, Pembinaan
- 548 Kesamudraan
- 549 Kelautan, Pesisir Pantai
- 550 **PERHUBUNGAN**
- 551 Perhubungan Darat
 - .1 Lalu Lintas Jalan Raya, Sungai, Danau
 - .11 Keamanan Lalu Lintas, Rambu-Rambu
 - .12 Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor (KIR)
 - .13 Kecelakaan Lalu Lintas
 - .2 Angkutan Jalan Raya
 - .21 Perizinan
 - .22 Terminal
 - .23 Alat Angkutan
 - .24 Jembatan Timbang/Lebih Muatan
 - .25 Uji Mutu
 - .3 Angkutan Sungai
 - .31 Perizinan
 - .32 Terminal
 - .33 Pelabuhan
 - .34 Alat Angkut
 - .35 Keselamatan, Rambu-Rambu
 - .36 Lalu Lintas
 - .37 Trayek

.38	Sarana/Kapal
.39	Kecelakaan
.4	Angkutan Danau
.41	Perizinan
.42	Terminal
.43	Pelabuhan
.44	Keselamatan, Rambu-Rambu
.45	Lalu Lintas
.46	Trayek
.47	Sarana/Kapal
.48	Kecelakaan
.5	Ferri
.51	Perizinan
.52	Terminal
.53	Pelabuhan
.54	Sarana dan Prasarana Kapal
.55	Angkutan Penumpang, Angkutan Barang
.56	Trayek
.57	Keselamatan
.58	Kecelakaan
.59	Perawatan/Perbaikan
.6	Perkeretaapian
.61	Pintu Lintasan Kereta Api
.62	Signal/Tanda Rambu
.63	Perizinan
.64	Sarana dan Prasarana meliputi Lokomotif, Gerbong, Bogie (Jalan/Jembatan)
.65	Trayek
.66	Angkutan Penumpang, Angkutan Barang
.67	Keselamatan
.68	Kecelakaan
.68	Perawatan/Perbaikan
552	Perhubungan Laut
.1	Lalu Lintas Angkutan Laut, Pelayanan Umum
.11	Keamanan Lalu Lintas, Rambu-Rambu
.12	Pelayaran Dalam Negeri
.13	Pelayaran Luar Negeri
.14	Pelayaran Charter/Wisata Turis
.15	Mercu Suar
.16	Pelayaran Haji
.17	Pelayaran Khusus
.2	Perkapalan Alat Angkutan
.21	Kapal Penumpang
.22	Kapal Barang
.23	Kapal Perang/Patroli/Negara
.24	Kapal Tanker
.25	Ponton/Tongkang
.26	Kapal Layar
.27	Kapal Layar Motor
.28	Kapal Kontainer
.3	Pelabuhan
.31	Tanah/Lokasi
.32	Alur Layar
.33	Dermaga
.34	Terminal Penumpang
.35	Bangunan/Gedung/Gudang
.36	Perlengkapan Tambat Labuh
.37	Lapangan Penumpukan

- .38 Pelabuhan Khusus/Dermaga Khusus
- .4 Pengerukan/Perawatan
- .41 Alur Pelayaran
- .42 Kolam Pelabuhan
- .43 Reklamasi Pantai
- .44 Dumping Pantai
- .45 Pekerjaan Bawah Air (salvage)
- .5 Penjagaan Pantai
- .51 Patroli Pantai
- .52 Patroli Perawatan
- .53 Penjaga Pantai dan Penanggulangan Keselamatan Laut (Gamat)
- .6 Angkutan Barang
- .61 Pos
- .62 Minyak
- .63 Log
- .64 Ternak
- .65 Sembilan Bahan Pokok
- .66 Peti Kemas/EMKL
- .67 Muatan Umum
- .68 Barang Dalam Negeri, Barang Luar Negeri
- .69 Bongkar Muat
- .7 Keselamatan
- .71 Rambu-Rambu/Mercusuar
- .72 Kelaikan Kapal/Pembangunan Kapal
- .73 Fasilitas Keselamatan/Keamanan
- .74 Telekomunikasi Pelayaran
- .75 Sertifikasi Kesempurnaan Kapal
- .76 Sertifikasi Awak Kapal
- .8 Kecelakaan Gangguan
- .81 Kecelakaan Penumpang/Kapal
- .82 Kecelakaan Barang
- .83 Gangguan Sarana/Prasarana
- .84 Pembajakan/Penyeludupan
- .85 Pencemaran
- .9 Perizinan
- .91 Izin Berlayar
- .92 Izin Pekerjaan Bawah Air
- .93 Izin Pembuatan dan Perubahan Bantuan Kapal
- .94 Izin Penambahan Kantor Cabang
- .95 Izin Usaha Penunjang Angkutan Laut
- .96 Izin Usaha Angkutan Laut
- .97 Izin Pelayanan Jasa Kepelabuhan
- .98 Izin Pembangunan Pelabuhan Khusus
- .99 Izin Pembangunan Dermaga Khusus
- 553 Perhubungan Udara
 - .1 Lalu Lintas Angkutan Udara
 - .11 Penerbangan Domestik
 - .12 Penerbangan Luar Negeri
 - .13 Penerbangan Haji
 - .14 Penerbangan Charter/Non Reguler
 - .15 Penerbangan Khusus/Jembatan Udara
 - .2 Pelabuhan Udara
 - .3 Alat Angkutan
- 554 Pos
 - .1 Pembinaan
 - .11 Kebutuhan Fasilitas

- .12 Rehabilitasi/Perawatan
- .13 Bina Usaha/Pengawasan/Penerbitan
- .14 Standarisasi Perangkat
- .15 Tanah/Bangunan
- .16 Filateli/Perangko
- .17 Asosiasi
- .18 Laporan dan Evaluasi
- .2 Pelayanan
 - .21 Jasa Pos
 - .22 Jasa Titipan
 - .23 Jasa Giro
 - .24 Benda Pos
 - .25 Sampul Peringatan
 - .26 Jasa Pos Elektronik
- .3 Perizinan
 - .31 Rekomendasi Usaha Jasa Pos/Titipan
 - .32 Pembukaan Agen/Cabang
- .4 Gangguan Sarana dan Prasarana
 - .41 Kecelakaan
 - .42 Sabotase
 - .43 Penyeludupan

555 Telekomunikasi

- .1 Telepon
 - .11 Tetap
 - .12 Bergerak
 - .13 Wartel
 - .14 IKR/G
- .2 USO
- .3 Telegram, Teleks/SSB, Faximile, Email
- .4 Satelit, Internet
- .5 Stasiun Bumi, Parabola
- .6 Frekwensi dan Informatika
 - .61 Amatir Radio
 - .62 KRAP
 - .63 Radio Siaran Lokal
 - .64 Radio Konsesi Lokal
 - .65 Radio Base Station
 - .66 Internet
- .7 Pembinaan/Penerbitan/Pengawasan
 - .71 Wartel
 - .72 Frekuensi Radio Lokal
- .8 Standarisasi Perangkat Telekomunikasi
- .9 Perizinan
 - .91 Amatir Radio
 - .92 KRAP
 - .93 Radio Siaran Lokal
 - .94 Televisi Siaran Lokal
 - .95 Radio Konsensi Lokal
 - .96 Radio Base Station

556 Pariwisata dan Rekreasi

- .1 Izin Usaha Kepariwisataaan
 - .11 Izin Usaha Sarana Wisata/Perhotelan
 - .12 Izin Travel Service/Biro Perjalanan Wisata
 - .13 Izin Usaha Objek dan Atraksi Wisata
 - .14 Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata
- .2 Wisatawan
 - .21 Wisatawan Mancanegara

- .22 Wisatawan Nusantara/Domestik
- .3 Promosi dan Informasi Pariwisata
- .31 Sadar Wisata
- .32 Mandala Wisata
- .33 Tourism Information Centre
- .34 Pameran Pariwisata meliputi: Pekan Pariwisata dan PATA
- .35 Taman Mini Indonesia Indah (TMII)
- .36 Bimas Pariwisata
- .4 Perjalanan Wisata
- .41 Biro Perjalanan
- .42 Angkutan Wisata
- .43 Travel Service
- .44 Souvenir
- .45 Kemudahan Wisata (Visa, Bea Cukai, Karantina)
- .5 Pramuwisata meliputi: Pramuwisata Madya, Pramuwisata Muda, Pramuwisata Khusus
- .6 Fasilitas Wisatawan
- .61 Hotel/Motel
- .611 Status Hotel
- .612 Kelas Hotel
- .613 Tarif
- .62 Losmen/Penginapan
- .63 Villa
- .64 Pondok Wisata
- .65 Perkemahan
- .66 Restoran, Bar, dan Diskotik
- .67 Rumah Makan
- .7 Asosiasi Profesi Kepariwisata
- .71 PHRI
- .72 PUTRI
- .73 ASITA
- .74 HPI
- .75 HPP
- .8 Tempat Rekreasi
- .81 Obyek dan Daya Tarik Wisata
- .82 Ciptaan Tuhan
- .83 Hasil Karya Manusia
- .84 Rehabilitasi/Perawatan
- .85 Pengembangan Fasilitas
- .86 Tanah/Bangunan
- .87 Bina Usaha
- 557 Meteorologi
- .1 Curah hujan
- .2 Hujan buatan
- .3 Kemarau Panjang
- .4 Peneropongan Bintang
- .5 Ramalan Cuaca
- 558 --
- 559 --
- 560 **TENAGA KERJA**
- .1 Pengangguran
- .11 Data Permintaan TKI/TKW dari Luar Negeri
- .12 Data Permintaan TKI/TKW dari Daerah
- .2 Job order TKI Keluar Negeri oleh PJTKI
- .3 Rekrutmen Calon TKI/TKW

- .4 Seleksi tenaga kerja ke Luar Negeri
- .41 Pendaftaran dan Seleksi Calon TKI/TKW
- .42 Berkas Persyaratan Calon TKI/TKW
- .43 Pemeriksaan dan Hasil Cek Kesehatan TKI/TKW
- .5 Persyaratan tenaga kerja
- .51 Permohonan Rekomendasi tenaga kerja
- .52 Perjanjian Kerja TKI/TKW
- .53 Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI)
- .54 Permohonan Fiskal ke Luar Negeri
- .55 Pelatihan TKI/TKW
- .6 Pemberangkatan tenaga kerja
- .61 Pemberangkatan ke Luar Negeri
- .62 Pembekalan Akhir Pemberangkatan TKI/TKW ke Luar Negeri
- .63 Berita Acara Serah Terima TKI/TKW
- .7 Pemulangan tenaga kerja
- .71 Kepulangan TKI/TKW karena Kontraknya Habis
- .72 Pemulangan TKI/TKW Ilegal
- .73 TKI/TKW terkena Kasus Pidana

- 561 Upah
 - .1 Kegiatan dan Hasil Sidang Dewan Penelitian Pengupahan Daerah/ Nasional
 - .2 Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Pembayaran Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Provinsi
 - .3 Kebutuhan Fisik Minimum
 - .4 Perhitungan Upah Kerja (Termasuk Upah Lembur)
 - .5 Laporan Data Remintanse
 - .6 Pembayaran Gaji/Upah TKI/TKW

- 562 Penempatan Tenaga Kerja/TKI
 - .1 Penempatan Tenaga Kerja Mandiri Profesional (TKMP)
 - .2 Penempatan Tenaga Kerja Non Terdidik dan Non Profesional.
 - .3 Pengembangan Kesempatan Berusaha/Perluasan Kerja

- 563 Latihan Kerja
 - .1 Pendidikan Latihan Kerja
 - .11 Diklat di Dalam Negeri (PKL, Pra Kerja, OJT)
 - .12 Diklat di Luar Negeri (Pemagangan)
 - .2 Sarana dan Prasarana Latihan Kerja
 - .21 Tempat Pelatihan (BLK)
 - .22 Instruktur/Pelatihan
 - .23 Modul/Silabus dan Bahan Praktek
 - .24 Kurikulum dan Metode Pengajaran
 - .25 Sertifikat
 - .3 Kerjasama Pelatihan Tenaga Kerja

- 564 Tenaga Kerja/Sukarela
 - .1 Butsi
 - .2 Padat Kerja

- 565 Perselisihan Perburuhan
 - .1 Pengaduan Perkara Perburuhan/Tenaga Kerja
 - .2 Pemeriksaan Perkara Perburuhan/Tenaga Kerja
 - .3 Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Perburuhan/Tenaga Kerja
 - .4 Sidang Perkara Perselisihan Perburuhan/Tenaga Kerja
 - .5 Hasil Putusan Sidang Perkara Perselisihan Perburuhan/Naker
 - .6 Peninjauan Kembali Hasil Putusan Sidang
 - .7 Permintaan Eksekusi Terhadap Hasil Keputusan KP2K
 - .8 Daftar Usulan, Susunan dan Penetapan Anggota KP2K

.9 Pemogokan/Unjuk Rasa Tenaga Kerja

566 Keselamatan kerja

- .1 Instalasi Proteksi Kebakaran
- .2 Pemakaian Alat Keselamatan Kerja
- .3 Keterangan Kelayakan atau Pelindung Diri (APD) dalam Bekerja
- .4 Pengangkatan dan Pembinaan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- .5 Pelatihan Pembinaan Hyperkes dan Keselamatan Kerja
- .6 Pengujian dan Hasil Pemeriksaan Hyperkes
- .7 Gangguan Lingkungan Tempat Usaha

567 Pemutusan Hubungan Kerja

- .1 Pengaduan PHK Sepihak
- .2 PHK Masal
- .3 Bantuan Hukum Bagi Pekerja yang di-PHK
- .4 Izin Melakukan PHK
- .5 Penghitungan Masa Kerja Bagi Pekerja yang di PHK
- .6 Pemberian Uang Tunggu bagi Pekerja yang di PHK
- .7 Pemberian Uang Pesangon bagi Pekerja yang di PHK

568 Kesejahteraan Buruh

- .1 Bantuan Kredit/Bantuan Modal Kerja bagi Tenaga Kerja
- .11 Pemilihan Pekerja Teladan
- .2 Perumahan Pekerja
- .3 Keikutsertaan Pekerja dalam Program Jamsostek
- .4 Koperasi Pekerja
- .5 Sarana Transportasi Pekerja
- .6 Perpustakaan Pekerja
- .7 Tempat Ibadah Pekerja
- .8 Rekreasi dan Olah Raga Pekerja
- .9 Pendirian, Pendaftaran, dan Kegiatan Organisasi Pekerja
- .91 Lembaga Kerjasama Bipartid

569 Tenaga Kerja Orang Asing

- .1 Rekomendasi Perpanjangan Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA)
- .2 Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
- .3 Kualifikasi Keahlian Tenaga Kerja Asing
- .4 Perjanjian Kerja dengan Negara Asing
- .5 Data Tenaga Kerja Asing
- .6 Kecelakaan/Kematian Tenaga Kerja Asing
- .7 Pemulangan Tenaga Kerja Asing
- .8 Pemberdayaan dan Kontribusi Tenaga Kerja Asing
- .9 Tenaga Kerja Asing Ilegal

570 **PERMODALAN**

571 Modal Domestik

- .1 Kerjasama Penanaman Modal antar Provinsi
- .2 Kerjasama Penanaman Modal antar Kabupaten

572 Modal Asing

573 Modal Patungan (Join Venture)/Penyertaan Modal

574 Pasar Uang dan Modal

575 Saham

576 Belanja Modal

577 Modal Daerah

578 --

579 --

580 PERBANKAN/MONETER

581 Kredit

582 Investasi

583 Tabungan, Perubahan, Penutupan

- .1 Deposito
- .2 Tabanas
- .3 Rekening
- .4 Hadiah Tabungan
- .5 Taska
- .6 Tapelpram

584 Lembaga Perbankan

- .1 Bank Pemerintahan
- .2 Bank Pembangunan Daerah
- .3 BKPD/LPK
- .4 Bank Swasta
- .5 Bank Syariah

585 Asuransi

- .1 Polis
- .2 Premi
- .3 Tertanggung/Pemegang Polis
- .4 Uang Pertanggungan
- .5 Dana Kecelakaan Lalu Lintas

586 Alat Pembayaran, Cek, Giro, Wesel dan Transfer

587 Fiskal

588 Hutang Negara/Obligasi

589 Moneter/Transaksi Moneter lainnya

590 AGRARIA

591 Tata GunaTanah

- .1 Pemetaan dan Pengukuran
- .2 Perpetaan
- .3 Penyediaan Data, Peta, dan Publikasi
- .4 Fatwa Tata Guna Tanah
- .5 Tanah Kritis

592 Landreform

- .1 Redistribusi
- .11 Pendaftaran Pemilikan dan Pengurusan Tanah
- .12 Penentuan Tanah Objek Landreform
- .13 Pembagian Tanah Objek Landreform
- .14 Sengketa Redistribusi Tanah Objek Landreform
- .2 Ganti Rugi
- .21 Ganti Rugi Tanah Kelebihan
- .21 Meliputi : Sengketa Ganti Rugi Tanah Kelebihan
- .22 Ganti Rugi Tanah Absentee

- Meliputi : Sengketa Ganti Rugi Tanah Absentee
 - .23 Ganti Rugi Tanah Partikelir
 - Meliputi : Sengketa Ganti Rugi Tanah Partikelir
 - .3 Bagi Hasil
 - .31 Penetapan Imbangan Bagi Hasil
 - .32 Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil
 - .33 Sengketa Perjanjian Bagi Hasil
 - .4 Gadai Tanah
 - .41 Pendaftaran Pelaksanaan Gadai Tanah
 - .42 Pelaksanaan Gadai Tanah
 - .43 Sengketa Gadai Tanah
 - .5 Bimbingan dan Penyuluhan
 - .6 Pengembangan
 - .7 Yayasan Dana Landreform (YDL)
- 593 Pengurusan Hak-Hak Tanah
 - .01 Penyusunan Program Dan Bimbingan Teknis
 - .1 Sewa Tanah
 - .11 Sewa Tanah Untuk Tanaman Tertentu : Tebu, Tembakau, Rosela, Corchorus
 - .2 Hak Milik
 - .21 Perorangan
 - .22 Badan Hukum
 - .3 Hak Pakai
 - .31 Perorangan
 - .311 Warga Negara Indonesia
 - .312 Warga Negara Asing
 - .32 Badan Hukum
 - .321 Badan Hukum Indonesia
 - .322 Badan Hukum Asing, Kedutaan, Konsulat, Kantor Dagang Asing
 - .33 Tanah Gedung-Gedung Negara
 - .4 Guna Usaha
 - .41 Perkebunan Besar
 - .42 Perkebunan Rakyat
 - .43 Peternakan
 - .44 Perikanan
 - .45 Kehutanan
 - .5 Hak Guna Bangunan
 - .51 Perorangan
 - .52 Badan Hukum
 - .53 P3MB (Panitia Pelaksana Penguasaan Milik Belanda)
 - .54 Badan Hukum Asing Belanda — PRK No. 5/65
 - .55 Pemulihan Hak (Pen Pres 4/1960)
 - .6 Hak Pengelolaan
 - .61 PN Perumnas, Bonded Ware House, Industrial Estate, Real Estate
 - .62 Perusahaan Daerah Pembangunan Perumahan
 - .7 Sengketa Tanah
 - .71 Peradilan Perkara Tanah (Lihat Juga 183)
 - .8 Pencabutan Dan Pembebasan Tanah
 - .81 Pencabutan Hak
 - .82 Pembebasan Tanah
 - .83 Ganti Rugi Tanah
- 594 Pendaftaran Tanah
 - .1 Pengukuran/Pemetaan
 - .11 Fotografi/Fotogrametri
 - .12 Teristris

- .13 Triangulasi
- .14 Peralatan
- .2 Dana Pengukuran (Permen Agraria Nomor 61/1965)
- .3 Sertifikat
- .4 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

- 595 Tanah/Lahan Untuk Transmigrasi
 - .1 Tata Guna Tanah
 - .2 Landreform
 - .3 Pengurusan Hak-Hak Tanah
 - .4 Pendaftaran Tanah

- 596 Tanah Aset Pemda
 - .1 Inventaris Tanah
 - .2 Pengadaan Tanah
 - .3 Pengamanan, Pemagaran/Penentuan Batas
 - .4 Ruislag Tanah
 - .5 Penjualan Tanah
 - .6 Penghapusan Aset Tanah

- 597 --
- 598 --
- 599 --

600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAKERJAAN

600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAKERJAAN

601 Tata Bangunan, Konstruksi dan Industri Konstruksi

602 Kontraktor, Pemborong

- .1 Tender
- .2 Penunjukan
- .21 Penunjukan Langsung
- .3 Prakualifikasi
- .31 Daftar Rekanan Mampu (DRM)
- .32 Tanda Daftar Rekanan (TDR)

603 Arsitektur

604 Bahan Bangunan

- .1 Tanah dan Batu
Seperti: Batu Belah, Steen Slaag, Split, Pasir, Koral, Lempung, Kapur, Marmer, dan sebagainya
- .2 Aspal
Aspal Buatan, Aspal Alam (Butas)
- .3 Besi dan Logam lainnya
- .31 Besi Beton
- .32 Besi Profil (Konstruksi)
- .33 Baja
- .34 Paku
- .35 Aluminium Profil
- .4 Bahan-Bahan Pelindung dan Pengawet
(Cat, Tech Oil, Pengawet kayu)
- .5 Semen
- .6 Kayu
Seperti : Balok, Papan, Dolken, Plywood, Gabus, dsb.
- .7 Bahan penutup atap
(Genteng, Asbes Gelombang, Seng, dan sebagainya)
- .8 Alat-Alat Penggantung dan Pengunci
- .9 Bahan-Bahan Bangunan lainnya

605 Instalasi

- .1 Instalasi Bangunan
- .2 Instalasi Listrik
- .3 Instalasi Air Sanitasi
- .4 Instalasi Pengatur Udara
- .5 Instalasi Akustik
- .6 Instalasi Cahaya/Penerangan

606 Konstruksi Pencegahan

- .1 Konstruksi Pencegahan Terhadap Kebakaran
- .2 Konstruksi Pencegahan Terhadap Gempa
- .3 Konstruksi Pencegahan Terhadap Angin/Udara/Panas
- .4 Konstruksi Pencegahan Terhadap Kegaduhan
- .5 Konstruksi Pencegahan Terhadap Gas/Eksplosive (Ledakan)
- .6 Konstruksi Pencegahan Terhadap Serangga
- .7 Konstruksi Pencegahan Terhadap Radiasi Atom

607 --

608 --

609 --

610 **PENGAIIRAN**

611 Irigasi

- .1 Bangunan Waduk
- .11 Bendungan
- .12 Tanggul
- .13 Pelimpahan Banjir
- .14 Menara Pengambilan
- .2 Bangunan Pengambilan
- .21 Bendungan
- .22 Bendungan Dengan Pintu Bilas
- .23 Bendungan Dengan Pompa
- .24 Pengambilan Bebas
- .25 Pengambilan Bebas Dengan Pompa
- .26 Sumur Dengan Pompa
- .27 Kantong Lumpur
- .28 Silt Ekstraktor
- .29 Escape Channel
- .3 Bangunan Pembawa
- .31 Saluran
- .311 Saluran Induk
- .312 Saluran Sekunder
- .313 Suplesi
- .314 Tersier
- .315 Saluran Kwarter
- .316 Saluran Pasangan
- .317 Saluran Tertutup/Terowongan
- .32 Bangunan
- .321 Bangunan Bagi
- .322 Bangunan Bagi dan Sadap
- .323 Bangunan Sadap
- .324 Bangunan Check
- .325 Bangunan Terjun
- .33 Box Tersier
- .34 Got Miring
- .35 Talang
- .36 Syphon
- .37 Gorong-Gorong
- .38 Pelimpahan Samping
- .4 Bangunan Pembuang
- .41 Saluran
- .411 Saluran Pembuang Induk
- .412 Saluran Pembuang Sekunder
- .413 Saluran Pembuang Tersier
- .42 Bangunan
- .421 Bangunan Outlet
- .422 Bangunan Terjun
- .423 Bangunan Penahan Banjir
- .43 Gorong-Gorong Pembuang
- .44 Talang Pembuang
- .45 Syphon Pembuang
- .5 Bangunan Lainnya
- .51 Jalan
- .511 Jalan Inspeksi
- .512 Jalan Logistik, Waduk, Lapangan
- .52 Jembatan
- .521 Jembatan Inspeksi
- .522 Jembatan Hewan

- .53 Tangga Cuci
- .54 Kubangan Kerbau
- .55 Waduk Lapangan
- .56 Bangunan Penunjang
- .57 Jaringan Telepon
- .58 Stasiun Argo
- .59 Bangunan TPI dan Pasar Ikan

612 Folder

- .1 Tanggul Keliling
- .11 Tanggul
- .12 Bangunan Penutup Sungai
- .13 Jembatan
- .2 Bangunan Pembawa
- .21 Saluran
- .211 Saluran Muka
- .212 Saluran Pembawa Induk
- .213 Saluran Pembawa Sekunder
- .22 Stasiun Pompa Pemasukan
- .23 Bangunan Bagi
- .24 Gorong-Gorong
- .25 Syphon
- .3 Bangunan Pembuang
- .31 Stasiun Pompa Pembuangan
- .32 Saluran
- .321 Saluran Pembuangan Induk
- .322 Saluran Pembuangan Sekunder
- .33 Pintu Air Pembuangan
- .34 Gorong-Gorong Pembuangan
- .35 Syphon Pembuangan
- .4 Bangunan Lainnya
- .41 Bangunan
- .411 Bangunan Pengukur Air
- .412 Bangunan Pengukur Curah Hujan
- .413 Bangunan Gudang Stasiun Pompa
- .414 Bangunan Listrik Stasiun Pompa
- .42 Rumah Petugas Eksploitasi

613 Pasang Surut

- .1 Bangunan Pembawa
- .11 Saluran
- .111 Saluran Pembawa Induk
- .112 Saluran Pembawa Sekunder
- .113 Saluran Pembawa Tersier
- .114 Saluran Penyimpan Air
- .12 Bangunan Pintu Pemasukan
- .2 Bangunan Pembuangan
- .21 Saluran
- .211 Saluran Pembuangan Induk
- .212 Saluran Pembuangan Sekunder
- .213 Saluran Pembuangan Tersier
- .214 Saluran Pengumpul Air
- .22 Bangunan Pintu Pembuangan
- .3 Bangunan Lainnya
- .31 Kolam Pasang
- .32 Saluran
- .321 Saluran Lalu Lintas
- .322 Saluran Muka
- .33 Bangunan

- .331 Bangunan Penangkis Kotoran
- .332 Bangunan Pengukur Muka Air
- .333 Bangunan Pengukur Curah Hujan
- .34 Jalan
- .35 Jembatan
- 614 Pengendalian Sungai
 - .1 Bangunan Pengaman
 - .11 Tanggul Banjir
 - .12 Pintu Pengatur Banjir
 - .13 Klep Pengatur Banjir
 - .14 Tembok Pengaman Talud
 - .15 Krib
 - .16 Kantong Lumpur
 - .17 Check Dam
 - .18 Syphon
 - .2 Saluran Pengaman
 - .21 Saluran Banjir
 - .22 Saluran Drainage
 - .23 Corepure
 - .3 Bangunan Lainnya
 - .31 Warning System
 - .32 Stasiun
 - .321 Stasiun Pengukur Curah Hujan
 - .322 Stasiun Pengukur Air
 - .323 Stasiun Pengukur Cuaca
 - .324 Stasiun Pos Penjagaan
- 615 Pengamanan Pantai
 - .1 Tanggul
 - .2 Krib
 - .3 Bangunan Lainnya
- 616 Air Tanah
 - .1 Stasiun Pompa
 - .2 Bangunan Pembawa
 - .3 Bangunan Pembuang
 - .4 Bangunan Lainnya
- 617 --
- 618 --
- 619 --
- 620 **JALAN**
- 621 Jalan Kota
 - .1 Daerah Penguasaan
 - .11 Tanah
 - .12 Tanaman
 - .13 Bangunan
 - .2 Bangunan Sementara
 - .21 Jalan Sementara
 - .22 Jembatan Sementara
 - .23 Kantor Proyek
 - .24 Gudang Proyek
 - .25 Barak Kerja
 - .26 Laboratorium Lapangan
 - .27 Rumah

.3	Badan Jalan
.31	Pekerjaan Tanah (Earth Work)
.32	Stabilisasi
.4	Pengerasan
.41	Lapisan Pondasi Bawah
.42	Lapis Pondasi
.43	Lapis Permukaan
.5	Drainage
.51	Parit Tanah
.52	Gorong-gorong (<i>culvert</i>)
.6	Buku Trotoar
.61	Tanah
.62	Pengerasan
.63	Pemasangan
.7	Median
.71	Tanah
.72	Tanaman
.73	Pengerasan
.74	Pasangan
.8	Daerah Samping
.81	Tanaman
.82	Pagar
.9	Bangunan Pelengkap dan Pengamanan
.91	Rambu-Rambu/Tanda-Tanda Lalu Lintas
.92	Lampu Penerangan
.93	Lampu Pengatur Lalu Lintas
.94	Patok-Patok KM
.95	Patok-patok ROW (sempadan)
.96	Rel Pengaman
.97	Pagar
.98	Turap Penahan
.99	Bronjong
622	Jalan Luar Kota
.1	Daerah Penguasaan
.11	Tanah
.12	Tanaman
.13	Bangunan
.2	Bangunan Sementara
.21	Jalan Sementara
.22	Jembatan Sementara
.23	Kantor Proyek
.24	Gudang Proyek
.25	Barak Kerja
.26	Laboratorium Lapangan
.27	Rumah
.3	Badan Jalan
.31	Pekerjaan Tanah (Earth Work)
.32	Stabilisasi
.4	Pengerasan (Pavement)
.41	Lapisan Pondasi Bawah
.42	Lapis Pondasi
.43	Lapis Permukaan
.5	Drainage
.51	Parit
.52	Gorong-Gorong (<i>culvert</i>)
.53	Sub Drainage
.6	Trotoar
.61	Tanah

- .62 Pengerasan
- .63 Pemasangan
- .7 Median
- .71 Tanah
- .72 Tanaman
- .73 Pengerasan
- .74 Pemasangan
- .8 Daerah Samping
- .81 Tanaman
- .82 Pagar
- .9 Bangunan Pelengkap dan Pengamanan
- .91 Rambu-Rambu/Tanda-Tanda Lalu Lintas
- .92 Lampu Penerangan
- .93 Lampu Pengatur Lalu Lintas
- .94 Patok-patok KM
- .95 Patok-patok ROW (sempadan)
- .96 Rel Pengaman
- .97 Pagar
- .98 Turap Penahan
- .99 Bronjong
- 623 Jalan Layang
- 624 --
- 625 --

630 JEMBATAN

- 631 Jembatan pada Jalan Kota
 - .1 Daerah Penguasaan
 - .11 Tanah
 - .12 Tanaman
 - .13 Bangunan
 - .2 Bangunan Sementara
 - .21 Jalan Sementara
 - .22 Jembatan Sementara
 - .23 Kantor Proyek
 - .24 Gudang Proyek
 - .25 Barak Kerja
 - .26 Laboratorium Lapangan
 - .27 Rumah
 - .3 Pekerjaan Tanah (*Earth Work*)
 - .31 Galian Tanah
 - .32 Timbunan Tanah
 - .4 Pondasi
 - .41 Pondasi Kepala Jembatan
 - .42 Pondasi Pilar
 - .43 Pondasi Angker
 - .5 Bangunan Bawah
 - .51 Kepala Jembatan
 - .52 Pilar
 - .53 Piloan
 - .54 Landasan
 - .6 Bangunan
 - .61 Gelagar
 - .62 Lantai
 - .63 Pengerasan
 - .64 Jalan Orang (trotoar)
 - .65 Sandaran

.66	Talang Air
.7	Bangunan/Pengaman
.71	Turap/Penahan
.72	Bronjong
.73	Strek Dam
.74	Kist Dam
.75	Corepure
.76	Krib
.8	Bangunan Pelengkap
.81	Rambu-Rambu/Tanda-tanda Lalu lintas
.82	Lampu Penerangan
.83	Lampu Pengatur Lalu lintas
.84	Patok Pengaman
.85	Patok ROW (sempadan)
.86	Pagar
.9	Sprit
.91	Badan
.92	Pengerasan
.93	Drainage
.94	Baku
.95	Median
632	Jembatan pada Jalan Luar Kota
.1	Daerah Penguasaan
.11	Tanah
.12	Tanaman
.13	Bangunan
.2	Bangunan Sementara
.21	Jalan Sementara
.22	Jembatan Sementara
.23	Kantor Proyek
.24	Gudang Proyek
.25	Barak Kerja
.26	Laboratorium Lapangan
.27	Rumah
.3	Pekerjaan Tanah (<i>Earth Work</i>)
.31	Galian Tanah
.32	Timbunan Tanah
.4	Pondasi
.41	Pondasi Kepala Jembatan
.42	Pondasi Pilar
.43	Pondasi Angker
.5	Bangunan Bawah
.51	Kepala Jembatan
.52	Pilar
.53	Piloon
.54	Landasan
.6	Bangunan
.61	Gelagar
.62	Lantai
.63	Pengerasan
.64	Jalan Orang (trotoar)
.65	Sandaran
.66	Talang Air
.7	Bangunan Pengaman
.71	Turap/Penahan
.72	Bronjong
.73	Strek Dam
.74	Kist Dam

.75	Corepure
.76	Krib
.8	Bangunan Pelengkap
.81	Rambu-Rambu/Tanda-Tanda Lalu lintas
.82	Lampu Penerangan
.83	Lampu Pengatur Lalu lintas
.84	Patok Pengaman
.85	Patok ROW (sempadan)
.86	Pagar
.9	Sprit
.91	Badan
.92	Pengerasan
.93	Drainage
.94	Baku
.95	Median
633	--
634	--
635	--

640 **BANGUNAN**

641	Bangunan Pemerintah
.1	Gedung Pengadilan
.2	Rumah Pejabat Negara
.3	Gedung DPR
.4	Gedung Balai Kota
.5	Penjara
.6	Perkantoran
642	Bangunan Pendidikan
.1	Taman Kanak-kanak
.2	SD dan Sekolah Menengah
.3	Perguruan Tinggi
643	Bangunan Rekreasi
.1	Bangunan Olah Raga
.2	Gedung Kesenian
.3	Gedung Pemancar
644	Bangunan Perdagangan
.1	Pusat Perbelanjaan
.2	Gedung Perdagangan
.3	Bank
.4	Perkantoran
645	Bangunan Pelayanan Umum
.1	Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Umum
.2	Gedung Parkir
.3	Rumah Sakit
.4	Gedung Telkom
.5	Terminal Angkutan Udara
.6	Terminal Angkutan Air
.7	Terminal Angkutan Darat
.8	Bangunan Keagamaan
646	Bangunan Peninggalan Sejarah
.1	Monumen

- .2 Candi
- .3 Keraton
- .4 Rumah Tradisional

647 Bangunan Industri

648 Bangunan Tempat Tinggal

- .1 Rumah Perkotaan
 - .11 Inti/Sederhana
 - .12 Sedang/Mewah
- .2 Rumah Pedesaan
 - .21 Rumah Contoh
- .3 Real Estate
 - .31 Rumah BTN
 - .32 Rumah Perumnas
- .4 Bapertarum

649 Elemen Bangunan

- .1 Pondasi
 - .11 Di atas Tiang
- .2 Dinding
 - .21 Penahan Beban
 - .22 Tidak Menahan Beban
- .3 Atap
 - .31 Atap Genteng
 - .32 Atap Asbes
 - .33 Atap Seng
- .4 Lantai/Langit-langit
 - .41 Suspended
 - .42 Solit
- .5 Pintu/Jendela
 - .51 Pintu Harmonik
 - .52 Pintu Biasa
 - .53 Pintu Sorong
 - .54 Jendela Kayu
 - .55 Jendela Vertikal

650 TATA KOTA

651 Daerah Perdagangan/Pelabuhan

- .1 Daerah Pusat Perbelanjaan
- .2 Daerah Perkotaan

652 Daerah Pemerintahan

653 Daerah Perumahan (Site & Service)

- .1 Kepadatan Rendah (Low Density)
- .2 Kepadatan Tinggi (High Density)

654 Daerah Industri

- .1 Industri Berat
- .2 Industri Ringan
- .3 Industri Rumah (Home Industry)

655 Daerah Rekreasi (Open Green Space)

- .1 Taman Kota (Public Garden)
- .2 Ruang Olahraga dan Taman Bermain (Sport and Playing Field)
- .3 Ruang Terbuka Hijau (Open Green Space)

- 656 Transportasi (Tata Letak)
 - .1 Jaringan Jalan
 - .11 Penerangan jalan
 - .2 Jaringan Kereta Api
 - .3 Jaringan Sungai
- 657 Assainering
 - .1 Saluran Pengumpulan
 - .2 Instalasi Pengolahan
 - .21 Bangunan
 - .211 Bangunan Penyaringan
 - .212 Bangunan Penghancur Kotoran/Sampah
 - .213 Bangunan Pengendap
 - .214 Bangunan Pengereng Lumpur
 - .22 Unit Desinfektan
 - .23 Unit Pemompaan
- 658 Kesehatan Lingkungan
 - .1 Persampahan
 - .11 Bangunan Pengumpul
 - .12 Bangunan Pemusnahan
 - .2 Pengotoran Udara
 - .3 Pengotoran Air
 - .31 Air Buangan Industri/Limbah
 - .4 Kegaduhan
 - .5 Kebersihan Kota
- 660 **TATA LINGKUNGAN**
 - .1 Persampahan
 - .2 Lingkungan Hidup
 - .3 Kebersihan Lingkungan
 - .4 Pencemaran
 - .41 Pencemaran Air
 - .42 Pencemaran Udara
 - .5 Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)
- 661 Daerah Hutan
- 662 Daerah Pertanian/Perkebunan
- 663 Daerah Pemukiman
- 664 Pusat Pertumbuhan
- 665 Transportasi
 - .1 Jaringan Jalan.
 - .2 Jaringan Kereta Api
 - .3 Jaringan Sungai
- 670 **KETENAGAAN**
 - 671 Listrik
 - .1 Kelistrikan
 - .11 Kelistrikan PLN
 - .12 Kelistrikan Non PLN
 - .2 Pembangkit Tenaga Listrik
 - .21 PLTA - Pembangkit Listrik Tenaga Air
 - .22 PLTD - Pembangkit Listrik Tenaga Diesel

.23	PLTG - Pembangkit Listrik Tenaga Gas
.24	PLTM - Pembangkit Listrik Tenaga Matahari
.25	PLTN - Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
.26	PLTPB - Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
.27	PLTU - Pembangkit Listrik Tenaga Uap
.28	PLTBB - Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara
.3	Transmisi Tenaga Listrik
.31	Gardu Induk/Gardu Penghubung/Gardu Trafo
.32	Saluran Udara Tegangan Tinggi
.33	Kabel Bawah Tanah
.34	Kabel Bawah Laut
.4	Distribusi Tenaga Listrik
.41	Gardu Distribusi
.42	Tegangan Rendah
.43	Tegangan Menengah
.44	Tegangan Tinggi
.45	Jaringan Bawah Tanah
.5	Penguasaan Listrik
.51	Sambungan Listrik
.52	Penjualan Tenaga Listrik
.53	Tarif Listrik
.54	Instalatur Listrik

672	Tenaga Air
673	Tenaga Minyak
674	Tenaga Gas
675	Tenaga Matahari
676	Tenaga Nuklir
677	Tenaga Panas Bumi
678	Tenaga Uap
679	Tenaga Lainnya

680 PERALATAN

681 ---

690 AIR MINUM

691	Intake
.1	Broncaptering
.2	Sumur
.21	Sumur Pompa
.22	Sumur Artesis
.3	Bendungan
.4	Saringan (Screen), Air Bersih
.5	Pintu Air
.6	Saluran Pembawa
.7	Alat Ukur
.8	Perpompaan
.9	Tata Guna Air
692	Transmisi Air Beku
.1	Perpipaan
.2	Katup Udara (Air Relief)
.3	Katup Penguras (Blow Off)

- .4 Bak Pelepas Tekanan
- .5 Jembatan Pipa
- .6 Syphon

693 Instalasi Pengelolaan

- .1 Bangunan Ukur
- .2 Bangunan Aerasi
- .3 Bangunan Pengendapan
- .4 Bangunan Pembubuh Bahan Kimia
- .5 Bangunan Pengaduk
- .6 Bangunan Saringan
- .7 Perpompaan
- .8 Clear Hell

694 Distribusi

- .1 Reservoir Menara Bawah Tanah
- .11 Menara
- .12 Reservoir di Bawah Tanah
- .2 Perpipaan
- .3 Perpompaan
- .4 Jembatan Pipa
- .5 Syphon
- .6 Hydran
- .61 Hydran Umum
- .62 Hydran Kebakaran
- .7 Katup
- .71 Katup Udara (Air Relief)
- .72 Katup Penguras (Blow Off)
- .8 Bak Pelepas Tekanan (Pressure Reducing Valve)

700 PENGAWASAN**700 PENGAWASAN**

- 701 Bidang Urusan Dalam (meliputi pengawasan sarana dan fasilitas kantor)
- 702 Bidang Peralatan
- 703 Bidang Organisasi/Ketatalaksanaan
- 704 Bidang Kekayaan Daerah
- 705 Bidang Perpustakaan/Dokumentasi/Kearsipan/Sandi
- 706 Bidang Perencanaan
- 707 Bidang Penelitian
- 708 Bidang Konferensi/Rapat Dinas
- 709 Bidang Perjalanan Dinas

710 BIDANG PEMERINTAHAN

- 711 Bidang Pemerintahan Pusat
- 712 Bidang Pemerintahan Provinsi
- 713 Bidang Pemerintahan Kabupaten/Kota
- 714 Bidang Pemerintahan Desa
- 715 Bidang MPR/DPR
- 716 Bidang DPRD Provinsi
- 717 Bidang DPRD Kabupaten/Kota
- 718 Bidang Hukum/Konstitusi/Peraturan Lainnya
- 719 Bidang Hubungan Luar Negeri

720 BIDANG POLITIK

Tambahkan Perincian 200 pada 720

- 721 Bidang Kepartaian
 - .1 Keanggotaan
 - .2 Pendirian/Pembubaran
 - .3 Pelanggaran Pemasangan Atribut Partai
 - .4 Pengawasan Keanggotaan PNS dalam Partai
 - .5 Pengawasan Pendanaan Partai
- 722 Bidang Organisasi Kemasyarakatan
- 723 Bidang Organisasi Profesi dan Fungsional
- 724 Bidang Organisasi Pemuda
- 725 Bidang Organisasi Buruh, Tani dan Nelayan
- 726 Bidang Organisasi Wanita
- 727 Bidang Pemilihan Umum
 - .1 Pemilu Legislatif dan DPD
 - .2 Pemilu Eksekutif/Presiden

730 BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN

Tambahkan perincian 300 pada 730

731 Bidang Pertahanan

732 Bidang Kemiliteran

733 Bidang Perlindungan Masyarakat

734 Bidang Keamanan

735 Bidang Kejahatan

.1 Pembunuhan

.2 Penganiyaan/Perampokan/Pencurian

.3 Pemalsuan

.4 Tindakan Asusila/Pelecehan Seksual

.5 Pengawasan Penyimpangan Pejabat (PNS)

.6 Korupsi/Penyalahgunaan Jabatan Struktural (lihat 356)

736 Bidang Bencana

.1 Pengawasan SAR/Bencana

737 Bidang Kecelakaan

738 Pengawasan Keamanan Aparat/Pejabat

739 Pengawasan Lingkungan Hidup

740 BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

Tambahkan perincian 400 pada 740

741 Bidang Pembangunan Desa

742 Bidang Pendidikan

.1 Kesejahteraan Guru

.2 Fasilitas/Sarana

.3 Mutu Pendidikan

743 Bidang Kebudayaan

.1 Kebudayaan Daerah/Nasional

.2 Kebudayaan Asing

744 Bidang Kesehatan/Makanan/Obat

745 Bidang Agama (Sara)

746 Bidang Sosial

747 Bidang Kependudukan (Migrasi/Urbanisasi)

748 Bidang Media Massa/Kehumasan

749 Bidang Pemberdayaan Perempuan

750 BIDANG PEREKONOMIAN

Tambahkan perincian 500 pada 750

751 Bidang Perdagangan

752 Bidang Pertanian

753 Bidang Perindustrian

- 754 Bidang Pertambangan/Kesamudraan
- 755 Bidang Perhubungan
- 756 Bidang Tenaga Kerja
- 757 Bidang Permodalan
- 758 Bidang Perbankan/Moneter
- 759 Bidang Agraria/BPN

760 **BIDANG PEKERJAAN UMUM**
 Tambahkan perincian 600 pada 760

- 761 Bidang Pengairan
- 762 Bidang Jalan
- 763 Bidang Jembatan
- 764 Bidang Bangunan
- 765 Bidang Tata Kota
- 766 Bidang Lingkungan
- 767 Bidang Ketenagaan
- 768 Bidang Peralatan
- 769 Bidang Air Minum

770 **BIDANG PENGAWASAN (PEJABAT PUBLIK)**
 Tambahkan perincian 700 pada 770

- 771 Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota
- 772 Serah Terima Jabatan Publik
- 773 Laporan Pertanggungjawaban Pusat
- 774 Laporan Pertanggungjawaban Gubernur
- 775 Laporan Pertanggungjawaban Bupati/Walikota
- 776 Penolakan LPJ
- 777 Komisi Pemeriksaan Kekayaan Pejabat Negara
- 778 Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

780 **BIDANG KEPEGAWAIAN**
 Tambahkan perincian 800 pada 780

- 781 Bidang Pengadaan Pegawai
- 782 Bidang Mutasi Pegawai
- 783 Bidang Kedudukan Pegawai
- 784 Bidang Kesejahteraan Pegawai
- 785 Bidang Cuti
- 786 Bidang Penilaian dan Disiplin Pegawai
- 787 Bidang Tata Usaha Kepegawaian
- 788 Bidang Pemberhentian Pegawai

- 789 Bidang Pendidikan Pegawai
- 790 **BIDANG KEUANGAN**
Tambahkan perincian 900 pada 790
- 791 Bidang Anggaran
- 792 Bidang Otorisasi
- 793 Bidang Verifikasi
- 794 Bidang Pembukuan
- 795 Bidang Perbendaharaan
- 796 Bidang Pembinaan Kebendaharaan
- 797 Bidang Pendapatan/Penerimaan Pajak
- 798 Bidang Keuangan Pendidikan PNS
- 799 Bidang Bendahara

800 KEPEGAWAIAN**800 KEPEGAWAIAN**

Klasifikasi di sini : Kebijakan Kepegawaian

- .01 Perencanaan
- .02 Penelitian
- .03 Pembinaan
- .04 Pengaduan
- .05 Tim
- .06 Seminar
- .07 Statistik
- .08 Peraturan Perundang-Undangan

801 Pemberian Tali Asih

802 Arsip Kepegawaian

803 Formasi, Pengadaan dan Pendayagunaan

- .1 Perencanaan dan Penyusunan Formasi Pegawai
- .2 Penetapan Formasi Pegawai
- .3 Persyaratan Administrasi untuk Diterima sebagai Pegawai
- .4 Pendaftaran Pegawai
- .5 Data Pegawai
- .6 Status Pegawai
 - .61 PNS Daerah
 - .62 PNS Pusat yang Diperbantukan
 - .63 Pegawai PD/BUMN
 - .64 Penempatan Sementara
 - .65 Wajib Kerja (Ikatan Dinas, Bea Siswa)
 - .66 Pekerja Kontrak
- .7 Perubahan Status Pegawai
 - .71 Dari PNS Pusat ke Daerah atau Sebaliknya
 - .72 Dari TNI/POLRI ke PNS
 - .73 Dari PNS ke Pegawai Perusahaan atau Sebaliknya

804 ---

805 --

806 --

807 --

808 --

809 --

810 PENGADAAN

811 Lamaran

- .1 Testing
- .2 Screening
- .3 Panggilan
- .4 Penelitian Dokumen
- .5 Wawancara
- .6 Training

812 Pengujian Kesehatan

813 Pengangkatan Calon Pegawai

- .1 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan I
- .2 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan II

- .3 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan III
 - .4 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan IV
 - .5 Pengangkatan Calon Guru Inpres
 - .6 Pengangkatan Calon Tenaga Inpres Kesehatan
- 814 Pengangkatan Tenaga Lepas
- .1 Pengangkatan Tenaga Bulanan/Tenaga Kontrak
 - .2 Pengangkatan Tenaga Harian
 - .3 Pengangkatan Tenaga Pensiunan
- 815 Pengangkatan Tenaga Asing
- 816 --
- 817 --
- 818 --
- 819 --
- 820 **MUTASI**
Meliputi Pengangkatan, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Pemindahan, Pelimpahan, Detasering, Tugas Belajar, Wajib Militer
- .1 Golongan I
 - .2 Golongan II
 - .3 Golongan III
 - .4 Golongan IV
 - .5 Fungsional
- 821 Pengangkatan
- .1 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri (Tetap)
 - .11 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan I
 - .12 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan II
 - .13 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan III
 - .14 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan IV
 - .15 Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil yang Cuti di Luar Tanggungan Negara
 - .2 Pengangkatan Dalam Jabatan, Pembebasan dari Jabatan, Berita Acara Serah Terima Jabatan
 - .21 Sekjen/Dirjen/Irjen/Kaban
 - .22 Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Pusat/Sekretaris/ Kepala Dinas/Asisten/Sekda
 - .23 Kepala Bagian/Kepala Sub Direktorat/Kepala Bidang/ Inspektur Pembantu
 - .24 Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang/ Pemeriksa
 - .25 Residen/Pembantu Gubernur
 - .26 Wedana/Pembantu Bupati
 - .27 Camat
 - .28 Lurah Administratif (Lurah Desa lihat 141)
 - .29 Jabatan lainnya
- 822 Kenaikan Gaji Berkala
- .1 Pegawai Golongan I
 - .2 Pegawai Golongan II
 - .3 Pegawai Golongan III
 - .4 Pegawai Golongan IV
- 823 Kenaikan Pangkat/Pengangkatan
- .1 Pegawai Golongan I

- .2 Pegawai Golongan II
 - .3 Pegawai Golongan III
 - .4 Pegawai Golongan IV
- 824 Pemindahan/Pelimpahan/Perbantuan
- .1 Pegawai Golongan I
 - .2 Pegawai Golongan II
 - .3 Pegawai Golongan III
 - .4 Pegawai Golongan IV
- 825 Detasering dan Penempatan Kembali
- .1 Penempatan Pegawai pada Unit Kerja
 - .2 Detasering Pegawai
- 826 Penunjukan Tugas Belajar
- .1 Dalam Negeri
 - .2 Luar Negeri
 - .3 Tunjangan Belajar
 - .4 Penempatan Kembali
 - .5 Izin Belajar
 - .6 Bea Siswa
- 827 Wajib Militer
- 828 Mutasi Pegawai Instansi lain
- 829 --
- 830 **KEDUDUKAN**
Meliputi : Perhitungan Masa Kerja, Penyesuaian Pangkat/Gaji,
Penghargaan Ijazah dan Jenjang Pangkat
- 831 Perhitungan Masa Kerja
- 832 Penyesuaian Pangkat/Gaji
- .1 Pegawai Golongan I
 - .2 Pegawai Golongan II
 - .3 Pegawai Golongan III
 - .4 Pegawai Golongan IV
- 833 Penghargaan ijazah/Penyesuaian Ijazah
- 834 Jenjang Pangkat/ Esselonering
- 835 --
- 836 --
- 837 --
- 840 **KESEJAHTERAAN PEGAWAI**
Meliputi : Tunjangan, Dana, Perawatan Kesehatan, Koperasi/Distribusi,
Perumahan/Tanah, Bantuan Sosial, Rekreasi, dan Dispensasi
- 841 Tunjangan
- .1 Jabatan
 - .2 Kehormatan
 - .3 Kematian/Uang Duka
 - .4 Tunjangan Hari Raya
 - .5 Perjalanan Dinas Tetap/Cuti/Pindah

- .6 Keluarga
- .7 Sandang, Papan, Pangan (Bapertarum), Uang Makan
- .8 Uang Insentif
- .9 Honorarium/Uang Lelah
- .10 Sertifikasi

842 Dana

- .1 Taspen
- .2 Kesehatan
 - .21 Askes
 - .22 Restitusi
 - .23 Bantuan Perawatan
 - .24 Sumbangan Kematian
- .3 Asuransi

843 Perawatan Kesehatan

- .1 Poliklinik
- .2 Perawatan Dokter
- .3 Obat-obatan
- .4 Keluarga Berencana

844 Koperasi/Distribusi

- .1 Distribusi Pangan
- .2 Distribusi Sandang
- .3 Distribusi lainnya

845 Perumahan/Tanah

- .1 Perumahan Pegawai
- .2 Tanah Kapling
- .3 Losmen/Hotel

846 Bantuan Sosial

- .1 Bantuan Kebakaran
- .2 Bantuan Kebanjiran

847 Rekreasi

848 Dispensasi

849 Rekomendasi

850 CUTI

Meliputi Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Hamil, Cuti Naik Haji, Cuti di Luar Tanggungan Negara dan Cuti Alasan Lain.

851 Cuti Tahunan

852 Cuti Besar

853 Cuti Sakit

854 Cuti Hamil

855 Cuti Naik Haji/Umroh

856 Cuti di Luar Tanggungan Negara

857 Cuti Alasan Lain, Cuti Alasan Penting

858 --

859 --

860 PENILAIAN

Meliputi Penghargaan, Hukuman, Konduite, Ujian Dinas, Penilaian Kekayaan Pribadi, dan Rehabilitasi

861 Penghargaan

- .1 Bintang/Satya Lencana
- .2 Kenaikan Pangkat Anumerta
- .3 Kenaikan Gaji Istimewa
- .4 Hadiah Berupa Uang
- .5 Pegawai Teladan

862 Hukuman

- .1 Teguran/Peringatan
- .2 Penundaan Kenaikan Gaji
- .3 Penurunan Pangkat
- .4 Pemindahan
Catatan : Pemberhentian Untuk Sementara Waktu dan
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat lihat 887 dan 888
- .5 Penurunan Jabatan
- .6 Larangan Rangkap Jabatan

863 Konduite, DP3/Penilaian Prestasi Kerja/SKP, Disiplin Pegawai (termasuk absensi/presensi)

- .1 Pelanggaran Pegawai karena Mengikuti Organisasi Lain

864 Ujian Dinas

- .1 Tingkat I
- .2 Tingkat II
- .3 Tingkat III

865 Penilaian Kehidupan Pegawai Negeri

Meliputi Petunjuk Pelaksanaan Hidup Sederhana, Penilaian Kekayaan Pribadi (LP2P)

866 Rehabilitasi/Pengaktifan Kembali**867 Baperjakat**

868 --

869 --

870 TATA USAHA KEPEGAWAIAN

Meliputi Formasi, Bezetting, Registrasi, Daftar Riwayat Hidup/Pekerjaan, Hak, Penggajian, Sumpah/Janji, dan Korps Pegawai

871 Formasi**872 Bezetting****873 Registrasi/Daftar Urut Kepangkatan (DUK)**

- .1 NIP
- .2 Karpeg
- .3 Legitimasi/Tanda Pengenal
- .4 Daftar Keluarga, Perkawinan, Perceraian
- .5 Karsu/Karis

874 Daftar Riwayat Pekerjaan

- .1 Tanggal Lahir

- .2 Penggantian Nama
- .3 Kepartaian/Organisasi
- 875 Kewenangan Mutasi Kepegawaian
 - .1 Pelimpahan Wewenang
 - .2 Specimen Tanda Tangan
- 876 Penggajian
 - .1 SKPP
 - .2 Kenaikan/Penurunan Gaji
 - .3 Gaji Bersifat Khusus (Anggota DPRD)
- 877 Sumpah/Janji
- 878 Korps Pegawai
- 879 --
- 880 **PEMBERHENTIAN PEGAWAI**
 Meliputi Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri, Dengan Hak Pensiun, Karena Meninggal Dunia, Alasan Lain, Dengan Diberi Uang Pesangon, Uang Tunggu Untuk Sementara Waktu, dan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
- 881 Permintaan Sendiri (Pensiun Dini)
- 882 Dengan Hak Pensiun
 - .1 Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Gol. I
 - .2 Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Gol. II
 - .3 Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Gol. III
 - .4 Pemberhentian Dengan Hak Pensiun Pegawai Negeri Gol. IV
 - .5 Pensiun Janda/Duda
 - .6 Pensiun Yatim Piatu
 - .7 Uang Muka Pensiun
- 883 Karena Meninggal
 - .1 Karena Meninggal Dalam Tugas
 - .2 Karena Meninggal Biasa
- 884 Alasan Lain
- 885 Uang Pesangon
- 886 Uang Tunggu
- 887 Untuk Sementara Waktu
- 888 Tidak Dengan Hormat
- 889 --
- 890 **PENDIDIKAN PEGAWAI**
 Meliputi Perencanaan, Pendidikan Reguler, Pendidikan Non Reguler, Pendidikan Ke Luar Negeri, Metode, Tenaga Pengajar, Administrasi Pendidikan, Fasilitas dan Sarana Pendidikan
- 891 Perencanaan
 - .1 Program
 - .2 Kurikulum dan Silabus
 - .3 Proposal (TOR)

- 892 Pendidikan Reguler/Kader
 - .1 IIP/IPDN/PIN/APDN
 - .2 Universitas (Perguruan Tinggi)
 - .3 Akademi
 - .4 Kursus-Kursus Reguler
- 893 Pendidikan dan Pelatihan Non Reguler
 - .1 LEMHANAS
 - .2 Pendidikan dan Pelatihan Struktural, SPATI, SPAMEN, SPAMA, ADUMLA, ADUM
 - .3 Kursus-Kursus/Penataran
 - .4 Diklat Teknis, Diklat Fungsional, dan Manajemen Pemerintahan
 - .5 Diklat lainnya
- 894 Pendidikan ke Luar Negeri
 - .1 Berkesinambungan/Berkala/Bergelar
 - .2 Non Gelar/Diploma
- 895 Metode
 - .1 Kuliah
 - .2 Ceramah, Simposium
 - .3 Diskusi, Raker, Seminar, Lokakarya, Orientasi
 - .4 Kuliah Lapangan, Anjangsana, Studi Banding, Widyawisata, KKN, Studi Lapangan
 - .5 Kurikulum
 - .6 Tanya Jawab
 - .7 Karya Tulis
 - .8 Penugasan
 - .9 Gladi
- 896 Tenaga Pengajar/Widyaiswara/Narasumber
 - .1 Usul menjadi Tenaga Pengajar
 - .2 Permintaan Tenaga Pengajar
 - .3 Penambahan Tenaga Pengajar
 - .4 Permintaan Tenaga Lainnya
 - .5 Moderator
- 897 Administrasi Pendidikan
 - .1 Tahun Pelajaran
 - .2 Persyaratan, Pendaftaran, Testing, Ujian
 - .3 STTP
 - .4 Penilaian Angka Kredit
 - .5 Laporan Pendidikan dan Pelatihan
- 898 Fasilitas Belajar
 - .1 Tunjangan Belajar
 - .2 Asrama
 - .3 Uang Makan
 - .4 Uang Transport
 - .5 Uang Buku
 - .6 Uang Ujian
 - .7 Uang Semester/Uang Kuliah
 - .8 Uang Saku
- 899 Sarana
 - .1 Bantuan Sarana Belajar
 - .2 Bantuan Alat-Alat Tulis
 - .3 Bantuan Sarana Belajar Lainnya

900 KEUANGAN**900 KEUANGAN**

901 Nota keuangan

902 APBN

903 APBD, RAPBD

904 Dana Alokasi Umum

905 Dana Alokasi Khusus

906 Dana Cadangan

907 Penetapan dan prioritas plafon anggaran, penetapan prioritas anggaran sementara

908 Kebijakan alokasi umum, nota kesepakatan

909 Dekonsentrasi (Pelimpahan Dana dari Pusat ke Daerah)

910 ANGGARAN

911 Rutin

912 Pembangunan

913 Anggaran Belanja Tambahan

914 Daftar Isian Kegiatan (DIK)

.1 Daftar Usulan Kegiatan (DUK)

.2 Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA)

.3 Daftar Usulan Kegiatan Daerah (DUKDA)

915 Daftar Isian Proyek (DIP)

.1 Daftar Usulan Proyek (DUP)

.2 Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA)

.3 Daftar Usulan Proyek Daerah (DUPDA)

.4 Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA)

916 Revisi Anggaran

917 RASK

918 DASK Dokumen

919 Pengelolaan Anggaran

.1 Pembuatan Cash Budget, Cash Flow terhadap Posisi Kas

.2 Realisasi Penerimaan/Pendapatan

.3 Realisasi Belanja

.4 Monitoring Pelaksanaan Anggaran

920 OTORISASI/SKO

921 Rutin

922 Pembangunan

923 SIAP

.1 SIAPDA

924 SKO

.1 Ralat SKO

930 **VERIFIKASI**

- 931 SPM Rutin (Daftar P-8)
- 932 SPM Pembangunan (Daftar P-8)
- 933 Penerimaan/Pendapatan (Daftar P-6 dan P-7)
- 934 SPJ Rutin
- 935 SPJ Pembangunan
- 936 Nota Pemeriksaan
- 937 SP Pemindahan Pembukuan (SPPP)
- 938 Verifikasi Anggaran
 - .1 Verifikasi Pengguna Anggaran
 - .2 Verifikasi Dokumen Pendukung SPJ
 - .3 Verifikasi Saldo Kas dan Bank
 - .4 Verifikasi Pendapatan dan Realisasi Penerimaan
- 939 ---

940 **PEMBUKUAN**

- 941 Penyusunan Perhitungan Anggaran
- 942 Permintaan Data Anggaran
- 943 Permintaan Laporan Fisik Hasil Pembangunan
- 944 Pembukuan Kas Umum
- 945 Pengendalian Kas dan Bank
 - .1 Pengendalian Kas
 - .2 Pengendalian Bank
 - .3 Konfirmasi Berkaitan dengan Pengendalian Kas dan Bank
 - .31 Rekening Bank
 - .32 Rekening Koran
- 946 Ganti Uang (GU)
- 947 Uang Persediaan (UP)
- 948 Tambahan Uang Persediaan (TUP)
- 949 SILPA

950 **PERBENDAHARAAN**

- 951 Tuntutan Ganti Rugi (ICW Pasal 74)
- 952 Tuntutan Bendaharawan
- 953 Penghapusan Kekayaan Negara
- 954 Pengangkatan/Penggantian Pemimpin Proyek dan
Pengangkatan/Pemberhentian Bendaharawan
- 955 Specimen Tanda Tangan
- 956 Surat Tagihan Piutang, Ikhtisar Bulanan
- 957 --
- 958 --
- 959 --

960 **PEMBINAAN KEBENDAHARAAN**

961 Pemeriksaan Kas dan Hasil Pemeriksaan Kas

962 Pemeriksaan Administrasi Bendaharawan

963 Laporan Keuangan Bendaharawan

964 Teguran Terhadap Bendaharawan

.1 Sanksi

965 --

966 --

967 --

968 --

969 --

970 **PENDAPATAN**

971 Perimbangan Keuangan

.1 Bagi Hasil Pajak

.11 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

.12 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PBHTB)

.13 Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH Pasal 21)

.2 Bagi Hasil Bukan Pajak

.21 Pemberian Hak atas Tanah Pemerintah

.22 Provisi Sumber Daya Hutan

.23 Sumber Daya Alam/Migas

.24 Iuran Eksplorasi/Landrent

.3 Pajak Langsung

.31 Pemungutan Pajak Langsung

.32 Bagi Hasil Pajak Langsung

.33 Informasi mengenai Pajak Langsung

.34 Pelayanan Masyarakat untuk Mempermudah Pemungutan Pajak Langsung

.35 Evaluasi, Pemantauan dan Pengendalian Pemungutan Pajak Langsung.

.4 Pajak Tidak Langsung

.41 Pemungutan Pajak Tidak Langsung

.42 Bagi Hasil Pajak Tidak Langsung

.43 Informasi mengenai Pajak Tidak Langsung

.44 Pelayanan Masyarakat untuk Mempermudah Pemungutan Pajak Tidak Langsung

.45 Evaluasi, Pemantauan dan Pengendalian Pemungutan Pajak Tidak Langsung.

972 Subsidi

973 Pajak, IPEDA, IHH, IHPH

.1 Pajak Kendaraan Bermotor

.2 Pajak Kendaraan di Atas Air

.3 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

.4 Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air

974 Retribusi

.1 Retribusi Pelayanan Kesehatan

.2 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

- .3 Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, Pasar
- .4 Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- .5 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- .6 Retribusi Hasil Hutan
- .61 Pengendalian Kayu Lintas Kabupaten/Kota
- .62 Izin Pemanfaatan Flora dan Fauna
- .63 Tempat Pelelangan Hasil Hutan
- .7 Retribusi Izin Pengambilan dan Pemanfaatan ABT
- .8 Retribusi Bidang Metrologi
- .9 Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan

- 975 Bea
- 976 Cukai
- 977 Pungutan/PNBP
- 978 Bantuan
 - .1 Bantuan Presiden
 - .2 Bantuan Menteri
 - .3 Bantuan Gubernur
 - .4 Bantuan Bupati/Walikota
 - .5 Bantuan Lainnya
- 979 Pendapatan Lainnya
 - .1 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
 - .11 Pelepasan Hak Atas Tanah
 - .12 Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas
 - .13 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua
 - .14 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
 - .15 Penjualan Bongkaran Bangunan dan Inventaris
 - .2 Penerimaan Jasa Giro
 - .21 Jasa Giro Kas Daerah
 - .22 Jasa Giro Pemegang Kas
 - .23 Jasa Giro Khusus
 - .3 Penerimaan Bunga Bank
 - .31 Bunga Deposito
 - .32 Bunga Tabungan
 - .4 Penerimaan Ganti Rugi atas Kerugian/Kehilangan Kekayaan Daerah (TP-TGR)
 - .5 Penerimaan Lainnya
 - .51 Penerimaan Laba BUMN/BUMD
 - .52 Penerimaan dari Pemerintah Pusat
 - .53 Penerimaan dan Pengembalian dari Potongan Surat Perintah Membayar (SPM)

- 980 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

- 990 **BENDAHARAWAN**
- 991 SKPP/SPP
- 992 Teguran SPJ
- 993 --
- 994 --
- 995 --
- 996 --

997 --
998 --
999 --

INDEKS KAITAN (RELATIVE INDEX)

A

Aceh	Kw-21
Administratif	
Desa	145
Pendidikan pegawai	897
Sekolah	422
Adopsi	472.31
Agama	450
Budha	455
Hindu	454
Islam	451
Khatolik	453
Protestan	452
Air buangan industri	658.31
Air minum	690
Air tanah	616
Akademi (Kesejahteraan Rakyat)	421.4
Akademi (Pendidikan Pegawai)	892.3
Akuisisi Arsip	045.91
Akseptor KB	479.6
Alamat kantor, pejabat	019.4
Alat angkutan	
Kantor	024
Laut	552.2
Udara	553.3
Alat medis	447
Alat tulis	021
Aluminium	
Profil Bahan Bangunan	604.35
Tambang	543.2
Amanat	
Camat	138.1
Menteri Dalam negeri	114.1
Menteri Lainnya	115.1
Presiden	111.2
Wakil Presiden	112.2
Amandemen/Angket	159.1
Anak nakal	462.4
Anak putus sekolah	463.1
Aneka	
Industri/Perusahaan	536
Kerajinan	537
Tambang	543
Tanaman	525.29
Usaha perdagangan	517
Angin topan	363
Anggaran	910
Belanja Tambahan	913
Pembangunan	912
Pendapatan dan Belanja Daerah	903
Pendapatan dan Belanja Negara	902
Pendapatan Pengeluaran Keuangan Desa	142
Rutin	911
Angkatan	
Darat	325.1

Empat Puluh Lima	221.2
Enam Puluh Enam	221.4
Laut	325.2
Udara	325.3
Angkutan	
Danau	551.4
Jalan Raya	551.2
Kereta Api	551.66
Sungai	551.3
Anjing gila	443.34
Antraks	443.34
Anumerta (kenaikan pangkat pegawai)	861.2
APBD Lih : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	903
APBN Lih : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	902
APDN Lih : Akademi Pemerintahan Dalam Negeri	892.1
APPKD	142
Arsip	045.9
Arsip Dinamis - Aktif	045.93
Arsip Dinamis - Inaktif	045.94
Arsip Dinamis - Vital	045.95
Arsip Media Baru	045.11
Arsip Statis	045.96
Arsip Terjaga	045.97
Arsitektur	603
Assainerring	657
Asbes gelombang bahan bangunan	604.7
ASEAN	193.1
Asimilasi	471.35
Assisten Sekwilda	821.22
Aspal	
Bahan bangunan	604.2
Bahan galian	541.22
Asrama pendidikan pegawai	898.2
Asuransi	585
Atap elemen bangunan	649.3
Audiensi	019.3
Ayam ras	524.41
Ayam buras	524.42

B

Badan	
Badan jalan	
Jalan Kota	621.3
Jalan Luar Kota	622.3
Badan Pemeriksa Keuangan	116
Bagi Hasil Landreform	592.3
Bahan	
Bangunan	604
Galian	541
Peledak	334
Pelindung Bangunan	604.4
Pengawet Bangunan	604.4
Bahasa	434
Bahaya kelaparan	444.1
Baitulmal	451.5
Bak pelepas tekanan	
Transmisi Air Beku	692.4
Distribusi Air Minum	694.8

Baku	
Jembatan Kota	631.94
Jembatan Luar Kota	632.94
Balai Kesehatan/Poliklinik	445.5
BKIA	445.6
Bali	Kw-61
Balok bahan bangunan	604.6
Bandir/Umbul-Umbul	019.5
Bangunan air minum	
Aerasi	693.2
Pembubuh Bahan Kimia	693.4
Saringan	693.6
Ukur	693.1
Pengendapan	693.3
Pengaduk	693.5
Bangunan air tanah	
Pembawa	616.2
Pembuang	616.3
Bangunan assainerring	657.21
Pengendap	657.213
Pengering Lumpur	657.214
Penghancur Kotoran	657.212
Penyaring	657.211
Bangunan bawah	
Jembatan Kota	631.5
Jembatan Luar Kota	632.5
Bangunan irigasi	
Bagi	611.321
Check	611.324
Outlet	611.421
Pembawa	611.3
Pembuang	611.4
Penahan Banjir	611.423
Pengambilan	611.2
Penunjang	611.56
Sadap	611.323
Terjun Pembawa	611.325
Terjun Pembuang	611.422
Bangunan	
Industri	647
Keagamaan	645.8
Pemerintahan	641
Pelayanan Umum	645
Pendidikan	642
Penjara	641.5
Bangunan pasang Surut	
Pembawa	613.1
Pembuangan	613.2
Penangkis Kotoran	613.331
Pengukur curah hujan	613.333
Pintu Masukan	613.12
Pintu Pembuang	613.22
Saluran Pembuang Sekunder	613.212
Saluran Pembuang Tersier	613.213
Bangunan pelengkap	
jalan kota	621.9
jalan luar kota	622.9
Bangunan pengaman	
jalan kota	621.9

Jalan luar kota	622.9
pengendalian sungai	614.1
Bangunan folder	
Bagi	612.23
Gudang Stasiun Pompa	612.413
Listrik Stasiun Pompa	612.414
Pembawa	612.2
Pembuang	612.3
Pengukur Air	612.411
Pengukur Curah Hujan	612.412
Penutup Sungai	612.12
Bangunan	
Pusat Perbelanjaan	644.1
Rekreasi	643
Tempat Tinggal	648
Waduk Irigasi	611.1
Banjir	362
Bank	
Bangunan Gedung	644.3
Pembangunan Daerah	584.2
Pemerintahan	584.1
Swasta	584.4
Syariah	584.5
Bantuan	978
Bupati/Walikota	978.4
Gubernur	978.3
Hukum	183.1
Kebakaran Untuk Pegawai	846.1
Kebanjiran Untuk Pegawai	846.2
Lainnya	978.5
Luar Negeri	193.2
Menteri	978.2
Pembangunan Daerah	050.12
Pembangunan Desa	147
Presiden	978.1
Barak kerja	
Jalan Kota	621.25
Jalan Luar Kota	622.25
Jembatan Kota	631.25
Jembatan Luar Kota	532.25
Batu belah bahan bangunan	604.1
Bazaar	466.2
Bea	975
Bea siswa	422.5
Berita Acara Penyusutan/Penyerahan Arsip	045.36
Bela sungkawa	004.3
Bencana	360
Angin topan/badai /puting beliung	363
Banjir/tanah longsor	362
Gempa/gunung berapi	361
Kebakaran	364
Kekeringan	365
Benda kuno/Kepurbakalaan	432.22
Bendaharawan	990
Penunjukan	954
Bendungan	
Air minum	691.3
Irigasi	611.11
Pintu bilas irigasi	611.22

Pompa irigasi	611.23
Bengkulu	Kw-28
Bensin	542
Penyaluran	542.3
Pompa	542.2
Tengker	542.2
Tangki	542.2
Beras	
Pemasaran	511.1
Pengadaan	501
Berburu binatang	522.52
Besi	
Bahan bangunan	604.3
Beton bahan bangunan	604.31
Profi bahan bangunan	604.32
Tambang	543.3
Tua	543.3
Bezetting Pegawai	872
Biara	454.3
Bibit Unggul	
Perikanan	523.31
Pertanian	521.32
Ternak	524.52
Bimas Tanaman Pangan	521.11
Bimbingan	
Landreform	592.5
Sosial	467
Bina Usaha Tanaman Pangan	521.7
Bintang Tanda Kehormatan	002.1
Bisu	461.4
BKS-AKSI	064
Box Tersier Irigasi	611.33
Boxit	543.2
BPGD	444.4
Broncaptering Air Minum	691.1
Bronjong	
Jalan Kota	621.99
Jalan luar kota	622.99
Jembatan kota	631.72
Jembatan luar kota	632.72
Buah-buahan	521.232
Bunuh diri	352
Budget	159.3
Buku	481.13
Islam	451.47
Pendidikan Pegawai	899.1
Sekolah	425.2
Buruh	560
Busung lapar	444.1
BUTSI	564.1
BUUD	144
C	
Cabang kesenian	431 .1
Cabang olahraga	426.1
Cacad	
Mata	461.1
Mental	461.3
Tubuh	461.2

Veteran	464.3
Cacah jiwa	471.6
Cagar alam	522.51
Camat	821.27
Candi	
Bangunan	646.2
Benda kebudayaan	432.21
Cat bahan bangunan	604.4
Catatan sipil	472
Cek	586
Cek dam sungai	614.17
Cengkeh	525.25
Ceramah	423.2
Pendidikan pegawai	895.2
Clear hell instalasi air minum	693.8
Corepure	
Jembatan kota	631.75
Jembatan luar kota	632.75
Cukai	976
Culvert, Lh : gorong-gorong jalan kota	621.52
Curah hujan	557.1
Cuti	
Pegawai	850
Alasan lain, alasan penting	857
Besar	852
Di Luar tanggungan negara	856
Hamil	854
Naik haji/Umroh	855
Sakit	853
Tahunan	851

D

Daerah Istimewa Jogjakarta	Kw-34
Daerah luar kota	
Hutan	661
Perkebunan/Pertanian	662
Daerah perkotaan	
Industri	654
Pelabuhan/Perdagangan	651
Pemerintahan	652
Pemukiman	663
Perumahan	653
Pusat perbelanjaan	651.1
Rekreasi	655
Daerah samping	
Jalan kota	621.8
Jalan luar kota	622.8
Daftar	
Pencarian Arsip	045.37
Pertelahaan Arsip	045.38
Rekanan Mampu (DRM)	602.31
Daging ternak	524.13
Dakwah	451.48
Dalang (cabang kesenian)	431.1
Damar (non kayu)	522.22
Dana kepegawaian	842
Asuransi	842.3
Kesehatan	842.2

Taspen	842.1
Dana kecelakaan	585
Dana pengukuran	594.2
Danareksa (pasar uang dan modal)	574
Darmawisata	421.71
Dasar Negara/Dasar Hukum	180.11
Data	
Anggaran	942
Inventaris Peralatan Hansip	341.1
Ternak	524.8
Daun (penyakit)	521.411
Dekan	424
Demam Berdarah	443.42
Demonstrasi	332
Dengar pendapat	156.2
Dengue Haemorrhagic, Lh : Demam Berdarah	443.42
Deposito	583.1
Desa	140
Desentralisasi	118
Detasering	825.2
Dewan	
Marga	144
Pertimbangan Agung	116
Perwakilan	150
Stabilisasi Ekonomi	500.1
Tingkat desa	144
DharmaTirta	411.64
Dharma Wanita	261
DIK	914
DUK	914.1
DIKDA	914.2
DUKDA	914.3
Dies Natalis	421.6
Dinas otonomi	120.21
DIP	915
DUP	915.1
DIPDA	915.2
DIPA	915.4
DUPDA	915.3
Direktur Jabatan	821.22
Direktur Jenderal Jabatan	821.21
Disenfektan Unit Assainerring	657.22
Diskusi	
Metode belajar	423.3
Pendidikan pegawai	895.3
Dispensasi pegawai	848
Distribusi	
Air minum	694
Pangan untuk pegawai	844.1
Sandang untuk pegawai	844.2
Dokumentasi	042
Dokter tenaga medis	446
Dolken bahan bangunan	604.6
Domine	452.3
Dosen	424
Drainage	
Jalan kota	621.5
Jalan luar kota	622.5
Jembatan kota	631.93

Jembatan luar kota	632.93
Dukun	448.4
Dwifungsi ABRI	321
E	
Ekspedisi pengiriman surat	045.7
Ekspor	512
Elemen bangunan	649
Emas	544
Epidemiologi	443.3
Escape chanel irigasi	611.29
Exit imigrasi	185.3
F	
Feri	551.5
Filaria	443.43
Film	484
Fiscal	587
Fitrah	451.12
Forum, Lh: Muspida	134.1
Fotogrametri	594.11
Formasi pegawai	871
Frambosia penyakit	443.23
Fumigasi	045.61
G	
Gabah	
Pemasaran	511.1
Pengadaan	501
Gadai	181.31
Tanah	592.4
Galian tanah	
Jembatan kota	631.31
Jembatan luar kota	632.31
Gambar Presiden/Wakil Presiden	019.2.1
Ganti nama	
Pegawai	874.2
Warga negara	471.54
Ganti rugi tanah	
Landreform	592.2
Tanah absentee	592.22
Tanah kelebihan	592.21
Tanah partikelir	592.23
Pencabutan hak	593.83
Garam	
Industri	535
Pemasaran	511.1
Pengadaan	501
Gardu listrik	
Induk	671.31
Distribusi	671.41
Penghubung	671.31
Travo	671.31
Gas bumi	542
GBHN	180.2
Gedung urusan dalam kantor	011

Rumah dinas	012
Gedung	
Balai kota	641.4
DPR	641.3
Kesenian	643.2
Sarana olah raga	426.21
Parkir	645.2
Pemancar	643.3
Pengadilan	641.1
Perdagangan	644.2
Sarana pendidikan	425.11
Sekolah Islam	451.45
Gelar senja	019.8
Gelagar	
Jembatan kota	631.61
Jembatan luar kota	632.61
Gelanggang remaja	427
Gempa	361
Genteng bahan bangunan	604.7
Geologi	546
Gereja	
Katholik	453.2
Protestan	452.2
Gigi	441.1
Giro	586
Gizi	444
Gelandangan	462.1
Golongan karya	214
Gogo	521.212
Gorong-gorong irigasi	
Pembawa	611.37
Pembuang	611.43
Gorong-gorong jalan	
Jalan kota	621.52
Jalan luar kota	622.52
Gorong-gorong folder	
Pembawa	612.24
Pembuang	612.34
Got miring irigasi	611.34
Grafika	486
Gudang	516
Gudang proyek	
Jalan kota	621.24
Jalan luar kota	622.24
Jembatan kota	631.24
Jembatan luar kota	632.24
Guest house	013
Gula	
Industri	535
Pemasaran	511.1
Pengadaan	501
Gunung Berapi	
Bencana	361
Pengawasan	546.1.1
Guru	
Inpres	813.5
Teladan	424

H

Haji	451.15
Hak/Suara/Pendapat	
MPR	154
DPR	159
DPRD Kabupaten/Kota	174
DPRD Provinsi	164
Pengangkatan/pemberhentian pegawai	875
Pengusahaan hutan	522.11
Hak tanah	593
Guna bangunan	593.5
Badan Hukum	593.52
Perorangan	593.51
Guna Usaha	593.4
Milik	593.2
Badan Hukum	593.22
Perorangan	593.21
Pakai	593.3
Badan Hukum	593.32
Perorangan	593.31
Pembebasan	593.82
Pencabutan	593.81
Pengelolaan	593.6
Hama tanaman	521.42
Hama serangga	521.421
Hama tikus dan sejenisnya	521.422
Hama hutan	522.87
Hansip	
Pembinaan	340.14
Hasil pemilu	278
Hari	
Besar/Raya	003
Ibu	260
Libur Sekolah	422.3
Pahlawan	003.1
Keagamaan	003.2
Nasional	003.1
Ulang Tahun	003.3
Harta Agama Islam	451.5
Hibrida	525.26
Hiburan	435
Hidrologi	547
Himpunan	
Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)	253
Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI)	254
Hipotik	181.32
Home industri	536.1
Hotel	556.61
Untuk pegawai	845.3
Hortikultura	521.23
Hubungan luar negeri	190
Hubungan masyarakat (Humas)	489
Hukum	180
Internasional	184
Adat	189
Perdata	181
Pidana	182
Hukuman pegawai	862
Peringatan	862.1

Teguran	862.1
Huru-Hara	332
Hutan	
Hak pengusahaan	522.11
Kelestarian	522.5
Perpetaan	522.14
Tata Guna	522.12
Hidup/Lindung	522.58
Wisata	522.55
Produksi	522.59
Hutang perdata	181.3
Hutang Negara	588
Hydran	
Air minum	694.6
Kebakaran	694.62
Umum	694.61
Hygiene sanitasi	443.5
I	
Ibu teladan	463.2
Islam (rumah peribadatan)	451.1
IHH	973
Ikatan Bidan Indonesia	231.2
Ikatan Dokter Indonesia (IDI)	231.1
IHPH	973
Iklan	510.12
Imigrasi	185
Impor	513
Imunisasi	443.32
Industri	530
Aneka	536
Elektronika	532
Farmasi	533
Kimia	533
Logam	531
Makanan	535
Minuman	535
Mesin	532
Tekstil	534
Imunisasi buatan	443.32
Inmas	521.11
Inspektur	
Jenderal	821.21
Pembantu	821.23
Instalasi	
Air Sanitasi	605.3
Akustik	605.5
Bangunan	605.1
Cahaya	605.6
Listrik	605.2
Penerangan	605.6
Pengatur Udara	605.4
Pengelolaan Air Minum	693
Rumah Dinas	011
Instansi vertikal	
Provinsi	120.22
Kabupaten	130.22
Kota	130.22
Instruksi	

Gubernur	188.54
Lembaga Non Kementerian	188.53
Menteri	188.52
Presiden	188.51
Walikota	188.55
Intake air minum	691
Intan	544
Internet	491
Inventaris kantor	028
Investasi	582
IPEDA	973
Irian Jaya	Kw-81
Irigasi	611
Islam	451

J

Jadwal Retensi Arsip (IRA)	045.31
Jalan	620
Kota	621
Luar kota	622
Irigasi	611.51
Inspeksi	611.511
Logistik	611.512
Jalan sementara	
Jalan Kota	621.21
Jalan Luar Kota	622.21
Jembatan Kota	631.22
Jembatan Luar Kota	632.21
Jaksa	187
Jagung	521.222
Jambi	Kw-25
Jamu	448.3
Jam kerja kantor	061.2
Janda	
Pahlawan	464.1
Pensiunan Pegawai	882.5
Perintis Kemerdekaan	464.2
Janji pegawai	877
Jaring terapung	523.34
Jaringan	
Jalan	
Kota	656.1
Luar Kota	665.1
Kereta Api	
Kota	656.2
Luar kota	665.2
Sungai	656.3
Kota	656.3
Luar kota	665.3
Telepon Irigasi	611.57
Listrik bawah tanah	671.45
JasaAir	014
Jasa Listrik	015
Jasa Telepon	016
Jawa	Kw-3
Barat	Kw-32
Tengah	Kw-33
Timur	Kw-35

Jawaban Pemerintah	158
Jembatan	630
Irigasi	611.52
Hewan	611.522
Inspeksi	611.521
Jalan Kota	631
Jalan Luar Kota	632
Pasang Surut	613.35
Pipa Air Minum	692.5
Folder	612.13
Sementara	631.22
Jalan Kota	621.22
Jalan Luar Kota	622.22
Jendela Elemen Bangunan	649.5
Jenjang Pangkat	834

K

Kabel listrik bawah tanah	671.33
Kabel listrik bawah laut/air	671.34
Kabinet	113
Kacang (tanaman)	521.221
KADARKUM (sadar hukum)	183.51
Kaderisasi Partai	219
Kalimantan	
Barat	Kw-61
Selatan	Kw-63
Tengah	Kw-62
Timur	Kw-64
Utara	Kw-65
Kaki lima	511.3
Kampanye	273
Kampus	425.12
Kandang ternak	524.22
Kangker	441.4
Kantong lumpur	
Irigasi	611.27
Pengendalian Sungai	614.16
Kantor proyek	
Jalan Kota	621.23
Jalan Luar Kota	622.23
Jembatan Kota	631.23
Jembatan Luar Kota	632.23
Kapal	552.2
Nelayan	523.42
Kapur bahan bangunan	604.1
Karantina	443.3
Karantina ternak	524.34
Karet hasil perkebunan	525.21
Kartu pegawai	873.2
Kartu penduduk	471.13
Karya tulis	
Metode belajar	423.6
Pendidikan Pegawai	895.7
Katup udara	
Distribusi Air Minum	694.71
Transmisi Air Minum	692.2
Katup pelepas/penguras	
Distribusi Air Minum	694.72

Transmisi Air Minum	692.3
Kayu	
Bahan Bangunan	604.6
Hasil Hutan	522.21
Industri	536
Perusahaan	536
Keamanan	
Kantor	017
Lalu Lintas	551.11
Jalan Raya	551.11
Laut	552.11
Keanggotaan	
DPR	155
DPRD Kabupaten/Kota	171
DPRD Provinsi	161
MPR	151
Kearsipan	045
Ekspedisi	045.7
Salah Kirim	045.8
Surat Pengantar	045.4
Kebersihan	
Kantor	018
Kota	658.5
Lingkungan	660.3
Kebakaran	364
Kebijaksanaan Umum Politik	201
Kebudayaan	430
Kebun	521.53
Kebun Binatang	522.53
Kecamatan	138
Kecelakaan	370
Kegaduhan Kota	658.4
Kegiatan	
Pelajar	421.7
Sekolah	421.6
Remaja	427
Kehutanan	522
Kejahatan	350
Kejaksaaan	187
Kekayaan	
Daerah	030
Desa	143
Kekayaan pribadi pegawai	865
Kekayaan ABRI	324
Kekurangan makan	444.1
Kekeringan	365
Kelahiran	472.11
Kelamin penyakit	443.22
Kelapa	
Sawit	525.26
Hibrida	525.26
Kelaparan	444.1
Kelautan	549
Kelestarian Hutan/Satwa	522.5
Keluarga berencana	479
Alat Kontrasepsi	479.1
Lestari	479.2
Mandiri	479.3
Penyuluh Lapangan	479.4

Akseptor	479.6
Kesejahteraan Pegawai	843.4
Kelurahan	140
Kematian	474.16
Kementerian	
Dalam Negeri	114
Luar Negeri	115
Kemiliteran	320
Kenaikan Gaji Pegawai	
Golongan I	822.1
Golongan II	822.2
Golongan III	822.3
Golongan IV	822.4
Kenaikan Pangkat Pegawai	
Golongan I	823.1
Golongan II	823.2
Golongan III	823.3
Golongan IV	823.4
Kenakalan remaja	358
Kendaraan Pemilu	276.2
Keolahragaan	426
Kepala	
Badan	821.21
Bagian	821.23
Bidang	821.23
Biro	821.22
Dinas	821.22
Seksi	821.24
Sub Bagian	821.24
Sub Bidang	821.24
Sub Direktorat	821.23
Kepartaian	210
Pegawai	874.3
Kepegawaian	800
Kepemudaan	427
Kependudukan	470
Kepenjaraan	186
Kepercayaan	436
Kepolisian	331
Kepurbakalaan	432
Keputusan	188.4
Bupati	188.45
Gubernur	188.44
Lembaga Non Kementerian	188.43
Menteri	188.42
Presiden	188.41
Walikota	188.45
Keracunan/keracunan makanan	444.2
Kerajinan	537
Kerajinan rakyat	537.1
Kereta api	551.6
Kerjasama asing	193
Kerjasama antar Kementerian	119
Kerjasama Perguruan Tinggi	074
Kerjasama antar Provinsi/Daerah	120.23
Kesamudraan	548
Kesehatan	440
Hewan	524.3
Pembinaan	441

Sekolah	441.5
Ibu dan Anak	441.9
Kesejahteraan	
Anak	463
Anggota DPR	157
Anggota DPRD Kabupaten/Kota	173
Anggota DPRD Provinsi	163
Anggota MPR	153
Buruh	568
Keluarga	463
Hansip	341.2
Pegawai	840
Rakyat	400
Sosial	465
Keselamatan kerja	566
Kesenangan	435
Kesenian	431
Ketela pohon	521.223
Ketenagaan	670
Ketangkasan	466.2
Ketatalaksanaan	065
Ketertiban	300
Ketertiban kantor	017
Keuangan	900
Desa	412.2
Kewarganegaraan Indonesia	471.5
Kewartawanan	485
Kewenangan mutasi pegawai	875
Kewilayahan desa	146
Kios	511.3
Kisdam	
Jembatan Kota	631.74
Jembatan Luar Kota	632.74
Klasifikasi Lh : Pola Klasifikasi	045.1
Klep pengatur banjir	614.13
KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia)	241
Kolam pasang surut	613.31
Kolam renang	426.24
Kolera	443.31
Kredit	
Bank	581
Administrasi Pendidikan	897.4
Keuangan Desa	412.21
Program Umum Koperasi	518.135
Program Khusus Koperasi	518.136
Koperasi Usaha Kecil	518.321
Koperasi Usaha Menengah	518.322
Usaha Tani	521.12
Bantuan Kesejahteraan Buruh	568.1

L

Laboratorium lapangan	
Jalan Kota	621.26
Jalan Luar Kota	622.26
Jembatan Kota	631.26
Jembatan Luar Kota	632.26
Lahan kritis	521.55
Lahan kritis reboisasi tanaman	522.421

Lalu lintas	
Danau	551.1
Jalan Raya	551.1
Laut	552.1
Sungai	551.1
Udara	553.1
Lambang	001
Bendera Kebangsaan	001.2
Kementerian	001.3
Garuda	001.1
Kabupaten/Kota	001.6
LPNK	001.7
Partai	211
Provinsi	001.5
Lampung	Kw-18
Landasan	
Jembatan Kota	631.54
Jembatan Luar Kota	632.54
Landrefrom	592
Pembagian Tanah	592.13
Penentuan Tanah	592.12
Redistribusi	592.1
Sengketa	592.14
Lanjut usia	465.1
Langit-langit elemen bangunan	649.4
Lantai	
Jalan Kota	631.62
Jalan Luar Kota	632.62
Elemen Bangunan	649.4
Lapang olah raga	426.23
Laporan	
Fisik fisik hasil pembangunan	943
Kabupaten	130.04
Kecamatan	138.7
Keuangan Bendaharawan	963
Luar Negeri	196
Provinsi	120.04
Latihan Kerja	563
Latihan Militer	321
Lebah	521.234
Legislatif	150
Legitimasi tanda pengenal pegawai	873.3
Lembaga	
Bantuan Hukum	235
Non Kementerian	117
Pendidikan Islam	451.49
Perbankan	584
Swadaya Masyarakat	225
Tinggi Negara	116
Tingkat Desa	144
Lempung bahan bangunan	604.1
Lestari KB	479.2
Lintas batas	185.5
Listrik	671
Distribusi	671.4
Non PLN	671.12
Tenaga Pembangkit	671.2
Penguasaan	671.5
PLN	671.11

Transmisi	671.3
Logam	545
Mulia	544
Lokakarya metode belajar pegawai	895.3
Lomba desa, Lh : Perlombaan Desa	414.4
Losmen untuk pegawai	845.3
Lurah	141
Administratif	821.28
Lustrum	421.6

M

Mahkamah Agung	116
Majalah	481.12
Majelis Pennusyawaratan Rakyat	150
Keanggotaan	151
Meninggal	151.7
Pelanggaran	151.4
Pemberhentian	151.2
Pencalonan	151.1
Pengangkatan	151.5
Majelis Ulama	451.7
Makam	469
Keluarga	469.3
Pahlawan	469.2
Raja	469.3
Umum	469.1
Makanan Ternak	524.55
Makar	351
Malaria	443.41
Maluku	Kw-81
Maluku Utara	Kw-82
Manasik Haji	456.2
Mandi cuci kakus	645.1
Mandiri KB	479.3
Margasatwa	522.51
Marmer	
Bahan Bangunan	604.1
Bahan Galian	541.47
Masa kerja	831
Masyarakat pedesaan	147.1
Mata	441.2
Matrik	340.13
Mazhab	
Budha	455.4
Hindu	454.4
Islam	451.8
Protestan	452.4
Khatolik	453.4
Media massa	480
Masyarakat suku terasing	467.1
Median	
Jalan kota	621.7
Jalan Luar kota	622.7
Jembatan Kota	631.95
Jembatan Luar Kota	632.95
Menara distribusi air minum	694.11
Menara pengambilan irigasi	611.14
Menu makanan rakyat	444.3

Menteri ad interim	113.2
Menwa, Lh : Resimen Mahasiswa	421.73
Mesin kantor	022
Masjid	
Bangunan	645.8
Sarana Peribadatan	451.2
Mess	013
Metode belajar	423
Meteorologi	557
Meubel perabot rumah dinas	012.2
Minyak bumi	
Eksplorasi	542.1
Kontrak kerja	541.11
Pengolahan	542.2
Pengusahaan	541.1
Pemasaran	511.1
Penyaluran	511.3
Minyak goreng	
Industri	535
Pemasaran	511.1
Pengadaan	501
Tangki penyimpanan	516
Modal	570
Asing	572
Patungan	573
Penyertaan	573
Domestik	571
Moneter	589
Monografi	
Monografi Provinsi	120.042
Monumen	
Bangunan	646.1
Kepurbakalaan	432.22
Penghargaan	002.4
MTQ	451.14
Muhammadiyah	223.2
Muktamar	218.1
Munas	218.2
Museum	432.1
Mutasi pegawai	820

N

Nahdatul Ulama	223.1
Naskah Dinas	065.1
Narapidana	186
Narkotika	354
Nelayan	523.8
Night Club	435
Nomor Induk Pegawai	873.1
Nota Keuangan	901
Nota Pemeriksaan	936
Nusa Tenggara Barat	Kw-52
Nusa Tenggara Timur	Kw-53

O

Obat-obatan	442
Generik	442.3

Pengadaan	442.1
Penyimpanan	442.2
Untuk Pegawai	843.3
Obligasi	588
Olah raga, Lb : Keolahragaan	426
Olimpiade	426.3
ONH (Ongkos Naik Haji)	456.1
Operasi busana	467.1
Operasi Militer	323
Operating Room	488
Sprit	
Jembatan Kota	631.9
Jembatan Luar Kota	632.9
Orde Baru	202
Orde Lama	204
Orde Reformasi	203
Organisasi	060
Badan Internasional	063
Badan Non Pemerintah	062
Buruh	250
Buruh Internasional	252
Intansi Pemerintah	061
Keagamaan	
Budha	455.5
Hindu	454.5
Islam	451.49
Katholik	453.5
Protestan	452.5
Mahasiswa	242
Nelayan	250
Pegawai	874.3
Pelajar	243
Profesi	238
Remaja	427
Tani	250
Wanita	260
Organda	256
Otonomi Daerah	127
Otorisasi	920
Pembangunan	922
Rutin	921

P

Padat Karya	564.2
Padi	521.21
Padi sawah	521.211
Padi gogo	521.212
Padi hama	521.213
Pagar	
Jalan Kota	621.97
Jalan Luar Kota	622.97
Jembatan Kota	631.86
Jembatan Luar Kota	632.86
Pagar daerah samping	
Jalan Kota	621.82
Jalan Luar Kota	622.82
Pahlawan	464.1
Pajak	973

Pakaian dinas	025
Paku bahan bangunan	604.34
Palang Merah Indonesia	468
Palawija	521.22
Kacang	521.221
Jagung	521.222
Kedelai	521.225
Ketela pohon	521.223
Ubi-ubian	521.224
Pameran	
Perdagangan	510.13
Non Komersil	487.1
Lukisan	487.1
Foto	487.1
Pamong Desa/Kepala Desa	141.1
Pemberhentian	141.1
Pemilihan	141.1
Pengangkatan	141.1
Pamong Praja	006.1
PAN (Panitia Anggaran Nasional)	
Tingkat Kabupaten/Kota	134.2
Tingkat Provinsi	124.2
Pancasila	180.11
Panen gagal	521.24
Panggilan	
Pegawai	094
Pelamar	811.3
Panti Asuhan	466.3
Panti Jompo	466.4
Papan bahan bangunan	604.6
Papan nama instansi	065.3
Parasamnya Purna Karya Nugraha	002.3
Parit	
Jalan kota	621.51
Jalan luar kota	622.51
Pariwisata	556
Partai	
Bukan Peserta Pemilu	215
Peserta Pemilu	214
Pasang surut irigasi	613
Pasar	511.2
Pasar uang/pasar modal	574
Pasca panen	521.71
Pasir bahan bangunan	604.1
Paspor	185.2
Pastor	453.3
Patok KM	
Jalan kota	621.94
Jalan luar kota	622.94
Patok R.O.W.	
Jalan luar kota	622.95
Jembatan kota	631.85
Jalan kota	621.95
Jembatan luar kota	632.85
Pegawai teladan	861.5
Pejabat Pembuat Akta Tanah	594.4
PKM (Penyuluh Kesehatan Masyarakat)	441.7
Pekan Olah Raga Nasional	426.3
Pekan Raya	510.11

Pekerjaan tanah	
Jalan kota	621.31
Jalan luar kota	622.31
Jembatan kota	631.3
Jembatan luar kota	632.3
Pelabuhan	
Danau	551.43
Feri	551.53
Laut	552.3
Nelayan/Perikanan	523.43
Sungai	551.33
Udara	553.2
Pelajar teladan	421.72
Pelantikan	
Bupati	131
Gubernur	121
Presiden	111
Wakil Presiden	112
Walikota	131
Pelayaran	
Dalam negeri	552.12
Luar negeri	552.13
Pelelangan	510.2
Ikan	523.21
Pelimpahan banjir irigasi	611.13
Pelimpahan samping irigasi	611.38
Pelimpahan pegawai, Lb : Pemindahan	824
Pelimpahan wewenang kepegawaian	875.1
Pemadam kebakaran	364.1
Pemalsuan	355
Ijazah	355.2
Uang	355.1
Pemasaran	511
Pembagian wilayah	
Kabupaten	136
Kotamadya	136
Provinsi	126
Pembangkit listrik	
Tenaga Air	671.21
Tenaga Diesel	671.22
Tenaga Gas	671.23
Tenaga Matahari	671.24
Tenaga Nuklir	671.25
Tenaga Panas Bumi	671.26
Tenaga Uap	671.27
Tenaga Batu Bara	671.28
Pembangunan desa	147
Pembebasan dari jabatan	821.2
Pemberantasan buta huruf	421.9
Pemberantas hama	521.423
Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit	
Menular Langsung (P2ML)	443.2
Pemberantasan penyakit hewan	524.35
Pemberhentian pegawai	880
Alasan Lain	884
Dengan Hak Pensiun	882
Golongan I	882.1
Golongan II	882.2
Golongan III	882.3

Golongan IV	882.4
Karena Meninggal	883
Permintaan Sendiri	881
Tidak Dengan Hormat	888
Untuk Sementara Waktu	887
Pemberontakan	351
Pembibitan	
Tanaman Pangan	521.32
Perikanan	523.31
Perternakan	524.52
Pembinaan kesehatan	441
Pembinaan Hansip	340.14
Pemborong	602
Pembukuan	940
Pembunuhan	352
Pemekaran	
Kabupaten/Kota	135
Kelurahan/Desa	146.2
Provinsi	125
Pemeliharaan arsip	045.6
Pementasan kesenian pada acara gelar senja	019.81
Pemeriksa pegawai	821.24
Pemeriksaan administrasi bendaharawan	962
Pemeriksaan kas	961
Hasil	961
Pemerintahan	100
Pemerintah	
Desa	140
Kabupaten/Kota	130
Kecamatan	138
Provinsi	120
Pusat	110
Pemetaan tanah	594.1
Pemilih	275
Pemilihan Umum	270
Pemindahan arsip	045.32
Pemindahan Ibu Kota	
Kabupaten	135.1
Kota	135.1
Provinsi	125.3
Pemindahan pegawai	824
Golongan I	824.1
Golongan II	824.2
Golongan III	824.3
Golongan IV	824.4
Pemindahan pembukuan	937
Pemotongan hewan	524.71
Pemuda	427
Pemugaran	
Candi	432.21
Lingkungan Desa	413.4
Perumahan Desa	413.4
Pemukiman	
Kembali penduduk/penempatan kembali	147.4
Suku Terasing	467.1
Tata Kota	653
Pemulihan hak guna bangunan	593.55
Pemungutan suara	277
Pemusnahan arsip	045.34

Pemutusan hubungan kerja	567
Penagihan	956
Penataan berkas	045.2
Penataran	
Kepegawaian	893.3
Penawaran Peralatan Kantor	020.1
Pencalonan	
Anggota	
DPR	155.1
DPR Kabupaten/Kota	171.1
DPRD Provinsi	161.1
MPR	151.1
Bupati/Walikota	131
Gubernur	121
Pamong Desa	141.1
Pemilihan Umum	271
Presiden	111
Sekda Kabupaten/Kota	133
Sekda Provinsi	123
Wakil Bupati/Walikota	132
Wakil Gubernur	122
Wakil Presiden	112
Pencemaran	
Tata Kota	
Air	658.3
Udara	658.2
Tata Lingkungan	
Air	660.41
Udara	660.42
Pencurian	353
Pendaftaran	
Pendidikan pegawai	897.2
Penduduk	471
Sekolah	422
Tanah	594
Pendapatan	970
Pendeta	452.3
Pendidikan	
Khusus	420.1
Luar Sekolah	421.9
Pegawai	890
Luar negeri	894
Non reguler	893
Reguler	892
Pendidikan Agama Islam	451.4
Dasar	451.43
Menengah	452.42
Tinggi	452.41
Pendidikan kedinasan	429
Kementerian Dalam Negeri	890
Penelitian	070
Kerjasama	074
Penempatan kembali	
Tugas belajar	826.4
Penerangan	487
Penerangan jalan	656.11
Penerangan lampu penganan	
Jalan Kota	621.92
Jalan Luar Kota	622.92

Jembatan Kota	631.82
Jembatan Luar Kota	632.82
Penerbitan	481
Penerimaan keuangan	933
Pengadaan	
Pangan	501
Pegawai	810
Peralatan kantor	027
Sadang	502
Pengaduan	490
Pengairan	610
Pengamanan pantai	615
Pengambilan batas irigasi	611.24
Pengambilan bebas irigasi dengan pompa	611.25
Penganiayaan	353
Pengangguran	560.1
Pengangkatan	
Anggota	
DPR	155.5
DPRD Kabupaten/Kota	171.2
DPRD Provinsi	161.2
MPR	151.5
Calon Pegawai	813
Golongan I	813.1
Golongan II	813.2
Golongan III	813.3
Golongan IV	813.4
Calon guru Inpres	813.5
Bendaharawan	954
Menjadi Pegawai Negeri Tetap	821
Golongan I	821.11
Golongan II	821.12
Golongan III	821.13
Golongan IV	821.14
Presiden	111
Tenaga	
Asing	815
Bulanan	814.1
Harian	814.2
Lepas	814
Pensiunan	814.3
Wk. Presiden	112
Pengawasan	700
Bidang	
Keamanan	730
Kepegawaian	780
Kesra	740
Ketertiban	730
Keuangan	790
Pekerjaan Umum	760
Pemerintahan	710
Peralatan	702
Perekonomian	750
Organisasi/Ketatalaksanaan	703
Politik	720
Pengawasan gunung berapi	546.7
Pengawetan	045.64
Pengembangan	
Desa	147.5

Landreform	592.6
Ternak	524.5
Pengemis	462.2
Pengendalian sungai	614
Pengerukan laut	552.4
Penggajian pegawai	876
Penggantian nama pegawai	874.2
Penghapusan kekayaan negara	953
Penghargaan ijazah pegawai	833
Penghargaan pegawai	
Bintang	861.1
Hadiah uang	861.4
Kenaikan	
Gaji istimewa	861.3
Pangkat anumerta	861.2
Penghargaan secara adat	002.5
Penghasilan Pamong Praja	142.1
Penghijauan	522.43
Penghitungan masa kerja	831
Pengobatan tradisional	448
Dukun	448.4
Pijat	448.1
Tusuk jarum	448.2
Penguasaan bangunan	
Jalan kota	621.13
Jalan Luar kota	622.13
Jembatan Kota	631.13
Jembatan Luar Kota	632.13
Penguasaan tanaman	
Jalan Kota	621.12
Jalan Luar Kota	622.12
Jembatan Kota	631.12
Jembatan Luar Kota	632.12
Pengusaha perikanan	523.5
Pengujian kesehatan pegawai	812
Pengukuran tanah	594.1
Pengungsi	465.2
Penilaian pegawai	860
Peninggalan kuno	432.2
Penjagaan pantai	552.5
Penjara	186
Pensiun	
Duda	882.5
Janda	882.5
Pegawai	
Golongan I	882.1
Golongan II	882.2
Golongan III	882.3
Golongan IV	882.4
Uang Muka	882.7
Yatim Piatu	882.6
Penerjemah	481.14
Penundaan kenaikan gaji	862.2
Penunjukan pemborong	602.2
Penurunan pangkat	862.3
Penyakit	
Hewan/Ternak	524.31
Kelamin	443.22
Menular	443.1

Daun	521.411
Batang	521.412
Hutan	522.87
Tanaman	521.41
Pencegahan	443.2
Penyaluran minyak bumi	542.3
Penyalahgunaan jabatan	356
Penyebaran ternak	524.53
Penyelewengan	356
Penyelundupan	354
Penyerahan arsip	045.35
Penyesuaian gaji pegawai	832
Golongan I	832.1
Golongan II	832.2
Golongan III	832.3
Golongan IV	832.4
Penyesuaian pangkat pegawai	
Golongan I	832.1
Golongan II	832.2
Golongan III	832.3
Golongan IV	832.4
Penyuluhan	
Gotong royong	411
Kesehatan masyarakat	441.7
Landrefom	592.5
Lapangan KB	479.4
Tanaman pangan	521.13
Penyusutan arsip	045.3
PEPABRI	222.1
Perabot kantor	023
Perabot rumah dinas	012.2
Peradilan	183
Agama Islam	451.6
Perkara tanah	593.71
Perak	544
Peralatan	020
Perikanan	523.41
Pertanian	521.31
Besar P.U.	680
Perampasan	353
Peraturan	
Daerah	
Kabupaten/Kota	188.342
Provinsi	188.341
Lembaga Non Kementerian	188.33
Menteri	188.32
Pemerintah	188.31
Peraturan Perundang-undangan	188
Perawatan arsip	045.6
Perawatan dokter untuk pegawai	843.2
Perawatan kesehatan masyarakat	441.6
Perbaikan kampung perdesaan	413.5
Perbantuan pegawai, Lh : Pemindahan	824
Perbendaharaan	950
Perbuatan cabul	357.2
Perceraian	472.2
Perdagangan	510
Antar Pulau	514
Luar Negeri	515

Perdata	181
Perencanaan	050
Perekonomian	500
Desa	412
Pergudangan	516
Perhitungan anggaran	941
Perhitungan suara	277
Perhotelan	556.61
Perhubungan	550
Darat	551
Laut	552
Udara	553
Peribadatan	
Budha	455.1
Hindu	454.1
Islam	451.1
Katholik	453.1
Protestan	452.1
Perikanan	523
Perimbangan keuangan	971
Perintis kemerdekaan	
Organisasi	221.1
Pembinaan Pahlawan	464.2
Perizinan	503
Perjalanan dinas	090
Menteri ke Daerah	092
Menteri ke Luar Negeri	097
Pejabat tinggi (eselon I) dalam negeri	093
Pejabat tinggi ke Luar Negeri	098
Pegawai di dalam negeri	094
Pegawai ke Luar Negeri	099
Presiden ke Daerah	091
Tamu Asing ke Daerah	095
Wakil Presiden ke Daerah	091
Wakil Presiden ke Luar Negeri	096
Perjan (usaha negara)	538.1
Perjudian	335
Perkapalan	552.2
Perkawinan	472.2
Perkebunan	525
Perkerasan	
Jalan Kota	621.4
Median	621.73
Trotoar	621.62
Jalan luar kota	622.4
Median	622.73
Trotoar	622.62
Jembatan kota	
Bangunan	631.63
Sprit	631.92
Jembatan luar kota	
Bangunan	632.63
Sprit	632.92
Perkeretaapian	551.6
Perkreditan Desa	412.21
Perkosaan	357.2
Perladangan	521.52
Perlebahan	521.234
Perlengkapan sekolah	425.3

Perlombaan desa	414.4
Permodalan	570
Perubahan nama	
Benda Geografis	125.1
Daerah	125.1
Gunung	125.1
Kota	125.1
Pulau	125.1
Selat	125.1
Perpetaan	591.2
Perpindahan penduduk	
Dalam wilayah RI	471.2
Antar Negara	471.3
Perpustakaan	041
Pers	485
Persatuan	
Guru RI (PGRI)	232.1
Sarjana Hukum Indonesia	233.3
Insinyur Indonesia	233.2
Serikat Islam Indonesia	223.3
Wartawan Indonesia (PWT)	237.1
Persawahan	521.51
Perselisihan perburuhan	565
Persero	538.3
Persidangan	
DPR	156
DPRD Kabupaten/Kota	172
DPRD Provinsi	162
MPR	152
Pertahanan	310
Darat	311
Laut	312
Udara	313
Perbatasan	314
Sipil (Hansip)	340
Pertokoan	511.3
Pertunjukan Hiburan	435
Perum	538.2
Pertelaan arsip	045.38
Perunggasan	524.4
Perusahaan daerah	539
Perwakilan Asing	191
Perwakilan RI	194
Pesta olah raga	426.3
Pestisida	
Pemberantas Hama	521.43
Sanitasi	443.53
Peta	591.2
Petani	521.6
Perternakan	524
Petugas Pemilu	274
Pidana	182
Pidato Kenegaraan Presiden	111.2
Pijat	448.1
Pilar	
Jembatan kota	631.52
Jembatan luar kota	632.52
Piloon	
Jembatan kota	631.53

Jembatan luar kota	632.53
Pipa	
Transmisi air minum	692.1
Distribusi air minum	694.2
Pintu air	
Air minum	691.5
Folder	612.33
Pintu pengatur banjir	614.12
Pintu elemen bangunan	649.5
Piutang	
Negara	588
Perdata	181.3
Playwood bahan bangunan	604.6
PMI	468
Pola Klasifikasi	045.1
Poliklinik	445.5
Pegawai	843.1
Polisi pamong praja	331.1
Politik	200
Pompa	
Bensin	542.2
Distribusi air minum	694.3
Instalasi air minum	693.7
Intake air minum	691.8
Unit assaineering	657.23
Pondasi angker jembatan kota	631.43
Pondasi angker jembatan Luar kota	632.43
Pondasi	
Elemen bangunan	649.1
Jembatan Kota	631.4
Jembatan Luar Kota	632.4
Kepala Jembatan	
Jembatan Kota	631.41
Jembatan Luar Kota	632.41
Pilar	
Jembatan Kota	631.42
Jembatan luar kota	632.42
Pondok pesantren	451.44
PORSADE	426.3
Pos	554
Pos Kesehatan hewan	524.32
Posyandu	445.8
PPAT	594.4
Prakualifikasi	602.3
Pramuka	428
Prasekolah	421.1
Prasarana Fisik Pamong Praja	011.1
Prasarana fisik Pemerintah	051
Presiden	111
Amanat	111.2
Pelantikan	111
Pencalonan	111
Pengangkatan	111
Pertanggungjawaban	111.1
Pidato Kenegaraan	111.2
Sumpah	111
Produksi	
Desa	412.1
Pemasaran	412.12

Pengolahan	412.11
Kehutanan	522.2
Perikanan	523.2
Perkebunan	525.2
Peternakan	524.1
Tanaman pangan	521.2
Promosi perdagangan	510.1
Iklan	510.12
Pekan raya	510.11
Protestan	452
Protokol	019
Puasa	451.13
Pullorum	524.33
Pungutan/PNBP	977
Pupuk	521.33
Pusat kegiatan mahasiswa	425.13
Puskesmas	445.4
Puso	521.24

R

Rabies, Lh : Anjing Gila	443.34
Racun	444.2
RADIO	482
Luar Negeri	482.3
Non RRI	482.2
Republik Indonesia	482.1
Siaran Pedesaan	411.54
Ralat SKO	924
Rambu-rambu	
Jalan Raya	551.11
Laut	552.11
Rambu-rambu bangunan pelengkap	
Jalan kota	621.91
Jalan luar kota	622.91
Jembatan kota	631.81
Jembatan luar kota	632.81
Rapat Komisi DPR	156.3
DPRD Kabupaten/Kota	172.4
DPRD Provinsi	162.4
RAS ayam	524.41
REAL ESTATE	648.3
Reboisasi	522.4
Recall	
Anggota DPR	155.3
Anggota MPR	151.3
Reentry	185.4
Registrasi	
Pegawai	873
Penduduk	471
Rehabilitasi	
Pegawai	866
Penderita cacat	461
Rekreasi	556
Rekreasi pegawai	847
Rektor	424
Rel pengaman	
Jalan kota	621.96
Jalan luar kota	622.96
Remaja	427

Repatriasi	465.2
Repelita	050
Reservoir air minum	694.1
Reses	
DPR	156.5
DPRD Kabupaten/Kota	172.1
DPRD Provinsi	162.1
Reshuffle Kabinet	113.1
Resimen Mahasiswa	421.73
Retribusi	974
Reuni pelajar	421.71
Riset	071
Riau	Kw-14
Rohaniawan	
Budha	455.3
Hindu	454.3
Islam	451.3
Katholik	453.3
Protestan	452.3
Rosela sewa tanah	593.11
Rotan	522.22
RUPD	050.1
Rujuk	472.2
Rukun kampung	149.3
Rukun tani	411.62
Rukun tetangga	149.1
Rukun warga	149.2
Rumah	
Rumah Dinas	012
Pejabat Dinas	012.7
Dinas Gol. I	012.3
Dinas Gol. II	012.4
Dinas Gol. III	012.5
Bangunan Lainnya	012.6
Tanah Untuk Rumah Dinas	012.1
Perabotan Rumah Dinas	012.2
Pegawai	845.1
Bangunan Rumah Pejabat Negara	641.2
Perkotaan Bangunan	648.1
Petugas Eksploitasi Folder	612.42
Sehat	413.41
Sengketa	181.2
Tradisional Bangunan	646.4
Rumah ibadat	
Budha	455.2
Hindu	454.2
Islam	451.2
Katholik	453.2
Protestan	452.2
Rumah Bangunan Sementara	
Jalan Kota	621.27
Jalan Luar Kota	622.27
Jembatan Kota	631.27
Jembatan Luar Kota	632.27
Rumah Sakit	445
Bangunan	645.3
RSUP	445.1
RS Jiwa	445.2
RS Mata	445.3

Puskesmas	445.4
Poliklinik	445.5
BKIA	445.6
Rumah Bersalin	445.7
Posyandu	445.8
RS Lainnya	445.9

S

Saham	575
Salah kirim surat	045.8
Saluran Pembawa	
Air minum	691.6
Irigasi	611.3
Induk	611.311
Kwartier	611.315
Pasangan	611.316
Sekunder	611.312
Suplesi	611.313
Tersier	611.314
Tertutup	611.317
Terowongan	611.317
Pasang Surut	613.11
Induk	613.111
Penyimpan Air	613.114
Sekunder	613.112
Tersier	613.113
Folder	612.21
Induk	612.212
Muka	612.211
Saluran Pembuang	
Irigasi	611.4
Induk	611.411
Sekunder	611.412
Tersier	611.413
Pasang Surut	613.21
Induk	613.211
Sekunder	613.212
Tersier	613.213
Pengumpul Air	613.214
Saluran pengendali banjir	
Banjir	614.21
Corepure	614.23
Drainage	614.22
Sambutan Menteri Dalam Negeri	114.1
Sambutan Gubernur	121.1
Samijaga, Lh : Sarana Air Minum dan Jamban Keluarga	443.52
Sampah	658.1
Sandaran Jembatan	
Kota	631.65
Luar Kota	632.65
Sandi	046
SAR	370
Sarana	
Air minum dan jamban keluarga	443.52
Kesenian	431.2
PEMILU	270
Pendidikan	425
Perikanan	523.4

Olah raga	426.2
Usaha Kehutanan	522.3
Usaha Perternakan	524.2
Satelit	555.4
Satya Lencana	002.2
Sawah	521.211
Sawit	525.26
Sayuran	521.231
Screening pegawai	811.2
Sejarah	433
Sekolah	421
Dasar	421.2
Kejuruan	421.5
Menengah	421.3
Pendidikan Luar Biasa	421.8
Pra	421.1
Staf Pimpinan Administrasi	893.1
Tinggi	421.4
Sekretaris	821.22
Daerah Kabupaten/Kota	133
Daerah Provinsi	123
DPRD Kabupaten/Kota	175
DPRD Provinsi	165
Sembilan bahan pokok	511.1
Semen, bangunan	604.5
Sempadan, Lh : Patok R.O.W.	
Seni	
Batik	431.1
Drama	431.1
Lukis	431.1
Musik	431.1
Pahat	431.1
Tari	431.1
Ukir	431.1
Senjata api	333
Dinas	026
Tajam	333
Sengketa	
Gadai tanah	592.43
Ganti rugi tanah	592.2
Absentee	592.22
Kelebihan	592.21
Partekelir	592.23
Pengurus hak tanah	593.7
Perdata	
Rumah	181.2
Tanah	181.1
Perjanjian bagi hasil	592.33
Tanah landreform	592.14
Serangga penyebab penyakit	443.44
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)	251.2
Sertifikat tanah	594.3
SESPA, Lh: Sekolah Staf Pimpinan Administrasi	
Sewa tanah	593.1
Rosela	593.11
SIAP	923
SIAPDA	923.1
Siaran pedesaan	411.54
Silt ekstraktor	611.28

Simposium	
Metode belajar	423.2
Belajar Pegawai	895.2
SKKP/SPP	991
SKO	924
Ralat SKO	924.1
Sosial	460
Spanduk	004.5
Specimen tanda tangan	
Bendaharawan	955
Kepegawaian	875.2
SPJ, Lh : Surat Pertanggungjawaban	992
Split bahan bangunan	604.1
SPMU	
Pembangunan	932
Rutin	931
SPP/uang sekolah	422.4
SSB	555.3
Stabilisasi	
Badan jalan kota	621.32
Badan jalan jalur kota	622.32
Stadion	426.22
Stasiun	
Argo	611.58
Bumi	555.5
Pengukur Air	614.322
Pengukur curah hujan	614.321
Pengukur cuaca	614.323
Pompa air tanah	616.1
Pompa pemasukan	612.22
Pompa pembuangan	612.31
Statistik	Kp-07
Steenslag bahan bangunan	604.1
Strek dam	
Jembatan Kota	631.73
Jembatan Luar kota	632.73
Suaka Marga Satwa	522.51
Subak	411.63
Subsidi	972
Subversif	354
Suku Terasing	467.1
Sulawesi	Kw-7
Selatan	Kw-73
Tengah	Kw-72
Tenggara	Kw-74
Utara	Kw-71
Sumatra	Kw-1
Barat	Kw-13
Selatan	Kw-16
Utara	Kw-12
Sumbangan	
Korban Bencana	466.1
Sosial	466
Uang, Lh : Bantuan Uang	
Sumpah	
Bupati	131
Gubernur	121
Pegawai	877
Presiden	111

Wakil Presiden	112
Sumur Air Minum	691.2
Sumur artesis	547.211
Sumur pompa irigasi	611.26
Surat kabar	481.11
Surat pengantar	045.4
Surat pertanggungjawaban	
Anggaran Pembangunan	935
Anggaran Rutin	934
Surat Kaleng	336
Surat Suara	276.3
Surat Tagihan Piutang	956
Survailance	443.33
Survey	072
Susu ternak rakyat	524.11
Susunan Kabinet	113
Susunan Organisasi	061.1
Swadaya Gotong Royong	411.1
Swadaya Masyarakat	411.1
Swapraja	128
Syphon	
Air minum	
Distribusi	694.5
Transmisi	692.6
Irigasi	
Pembawa	611.36
Pembuang	611.45
Pengendalian sungai	614.18
Folder	
Pembawa	612.25
Pembuang	612.35

T

Tagihan	956
Tahanan	
Kriminal	331
Pemberontakan	351
Tahun Pembelajaran	422.2
Pendidikan Pegawai	897.1
Talang	
Air Jembatan Kota	631.66
Air Jembatan Luar Kota	632.66
Pembawa	611.35
Pembuang	611.44
Taman Mini Indonesia Indah	556.35
Tambak Udang	523.33
Tamu Negara	192
Tanah	
Bonded were house	593.61
Gedung-gedung negeri	593.33
Industrial estate	593.61
Kantor dagang asing	593.322
Kedutaan	593.322
Kehutanan	593.45
Konsulat	593.322
Kritis	591.5
Longsor	362
Milik Belanda	593.53
Perikanan	593.44

Perkebunan Besar	593.41
Perkebunan Rakyat	593.42
Pertanian Pangan	521.5
Perumnas	593.61
Peternakan	593.43
Real Estate	593.61
Rumah Dinas	012.1
Sengketa Perdata	181.1
Transmigrasi	595
Untuk Pegawai	845.2
Tanaman Hias	521.233
Tanaman Pangan	521
Bimas	521.11
Kredit	521.12
Tanda daftar rekanan (TDR)	602.32
Tanda Gambar Pemilu	272
Tanda Jabatan	006
Pamong Praja	006.1
Kehormatan	002
Bintang	002.1
Kepegawaian	861
Monumen	002.4
Secara adat	002.5
Satya Lencana	002.2
Tanda lalu lintas, Lh : rambu-rambu	
Tanda Pengenal Pegawai	873.3
Tangga Irigasi	611.53
Tanggal Lahir Pegawai	874.1
Tanggul	
Banjir	614.11
Irigasi	611.12
Keliling Folder	612.11
Pengamanan Pantai	615.1
Tangki	
Bensin	542.2
Minyak Tanah	542.2
TAP MPR	188.1
Tarif Listrik	671.53
Taspen	842.1
Tata Bangunan	601
Tata Desa	414.3
Tata Guna	
Hutan	522.12
Tanah	591
Fatwa	591.4
Tata Kerja	061.1
Tata Kota	650
Tata Laksana	065
Tata Lingkungan	660
Tata Naskah Dinas	065.1
Tata Niaga	510
Tata Tempat	019.2
Tata tertib kantor	061.2
Keamanan Kantor	017
Tata kepegawaian	870
TBC	443.24
Tebu	
Tanaman	525.24
Sewa Tanah	593.11

Tech oil bahan bangunan	604.4
Tegangan Listrik	
Menengah	671.43
Rendah	671.42
Tinggi	671.44
Teh	525.22
Tekstil	
Industri	534
Pemasaran	510.22
Telegraf	555.3
Telekomunikasi	555
Telepon	555.1
Televisi	483
Telex	555.3
Telur	524.12
Tembaga	543.4
Tembakau	525.23
Tempat pembuatan dan penjualan makanan dan minuman	443.51
Tempat pemungutan suara	276.1
Tenaga	
Air	672
Gas	674
Kerja	560
Asing	569
Sukarela	564
Matahari	675
Medis	446
Minyak	673
Nuklir	676
Panas Bumi	677
Pengajar	424
Sekolah Islam	451.46
Pegawai Negeri	896
Uap	678
Tender bangunan	602.1
Tera	510.3
Terminal	
Danau	
Bangunan	645.6
Sarana Perhubungan Darat	551.22
Bangunan	
Sarana Pembangunan	645.7
Feri	
Bangunan	645.6
Sarana Perhubungan	551.52
Sungai	
Bangunan	645.6
Sarana Bangunan	551.32
Udara	
Bangunan	645.5
Sarana Bangunan	553.2
Ternak, lihat perternakan	524
Teristris pemetaan	594.12
Tesi Pullorum	524.33
Testing	
Pegawai	811.1
Administrasi Pendidikan Pegawai	897.2
Sekolah	422

Tidak berkewarganegaraan	471.55
Timah	543.1
Timbunan Tanah	
Jembatan Kota	631.32
Jembatan Luar Kota	632.32
Tokoh adat	189.1
Tokoh agama	
Budha	455.3
Hindu	454.3
Islam	451.3
Katholik	453.3
Protestan	452.3
Tokoh Masyarakat	189.1
Transfer Uang	586
Transmigrasi	474.6
Tanah Untuk	595
Transmisi	
Air Beku	692
Listrik	671.3
Transportasi	656
Travel Service	556.43
Trotoir Jalan Luar Kota	622.6
Trotoir Jalan Dalam Kota	621.6
Trianggulasi	594.13
Tugas belajar	826
Di Dalam Negeri	826.1
Di Luar Negeri	826.2
Tuli/Bisu	461.4
Tumpang Sari	521
Tuna Susila	462.3
Tuna Sosial	462
Tuna Wisma	462.1
Tuna Runggu/Cacat Telinga/Tuli	461.4
Tuna Netra/Cacat Mata	461.1
Tungro	521.421
Tunjangan	841
Belajar	826.3
Pendidikan Pegawai	898.1
Hari Raya	841.4
Jabatan	841.1
Kehormatan	841.2
Keluarga	841.6
Kematian	841.3
Pangan	841.7
Perjalanan	
Cuti	841.5
Dinas Tetap	841.5
Pindah	841.5
Tuntutan Ganti Rugi	951
Tuntutan Perbendaharaan	952
Turap Penahan	
Jalan Kota	621.98
Jalan Luar Kota	622.98
Jembatan Kota	631.71
Jembatan Luar Kota	632.71

U

Uang	
Buku	898.5

Makan Pegawai	841.7
Makan Pendidikan Pegawai	898.3
Muka Pensiun	882.7
Palsu	355.1
Pesangon Pegawai	885
Sekolah	422.4
Transport Pendidikan Pegawai	898.4
Tunggu	886
Ubi-ubian	521.224
Ucapan	004
Terima Kasih	004.1
Selamat	004.2
Bela Sungkawa	004.3
Lainnya	004.4
UDKP, Lh : Unit Desa Kerja Pembangunan	414.2
Ujian	
Dinas	864
Metode Belajar	423.7
Pendidikan Pegawai	897.2
Untuk Sekolah	422
UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)	441.5
Ulama Islam	451.3
Umbul-umbul	019.5
Umroh	451.16
Undang-undang	188
Dasar	180.2
Gangguan	530.08
Undangan	005
Undian	466.2
Unggul	
Bibit Unggul	524.52
Upacara	
Bendera	019.1
Upah Buruh	561
Urusan Dalam	010
Urbanisasi	471.22
Urusan Haji	456
Urusan Negara	538
Utang Perdata	181.3

V

Vaksinasi	443.2
Verifikasi	930
Veteran	
Cacat	464.3
Organisasi	221.3
Visa	185.1
Vulkanologi	546.1

W

Waduk	611.1
Lapangan	611.55
Wajib Militer	322
Pegawai	827
Wakaf	451.5
Wakil Bupati/Walikota	
Cuti	132
Pelantikan	132
Pemberhentian	132

Pencalonan		132
Pengangkatan		132
Serah Terima		132
Wakil Gubernur		
Cuti		122
Pelantikan		122
Pemberhentian		122
Pencalonan		122
Pengangkatan		122
Serah Terima		122
Wakil Presiden		
Pelantikan		112
Pencalonan		112
Pengangkatan		112
Sumpah		112
Walang Sangit		521.421
Warga Negara		
Asli		471.51
Asing		471.52
Keturunan Asing		471.52
Warning System Banjir		614.31
Wawancara		485.2
Wereng		521.421
Wesel		586
Widya Wisata		423.4
Pendidikan Pegawai		895.4
Wredatama		222.2
	V	
Yayasan Dana Landreform		592.7
	Z	
Zakat		451.12

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur

Plt Kepala Bagian Hukum,



Januar Bayu Irawan, SH

Penata/IIIC

NIP. 19850112 201101 1 003